

**PERBANDINGAN *FRAMING* BERITA PERKARA KORUPSI
PADA MEDIA DARING *REPUBLIKA.CO.ID* DAN *TEMPO.CO***



*Building
Future
Leaders*

Disusun Oleh:

Suci Rahmadhani

2125142213

**Skripsi yang diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sastra**

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Suci Rahmadhani
No. Reg. : 2125142213
Program Studi : Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : **Perbandingan *Framing* Berita Perkara Korupsi Pada Media Daring *Republika.co.id* Dan *Tempo.co***

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I



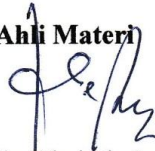
Asisda Wahyu A.P, M.Hum
NIP. 197711262008121001

Pembimbing II



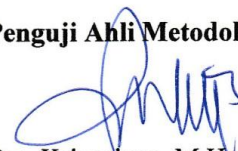
Aulia Rahmawati, M.Hum
NIP. 198009142008012013

Penguji Ahli Materi



Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum
NIP. 197811222006042001

Penguji Ahli Metodologi



Drs. Krisanjaya, M.Hum
NIP. 196807131992031001

Ketua Penguji



Asisda Wahyu A.P, M.Hum
NIP. 197711262008121001



Jakarta, 30 Januari 2018

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni


Dr. Liliانا Muliastuti, M.Pd.
NIP. 19680529 199203 2 001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 2125142213

Prodi : Sastra Indonesia

Fakultas : Bahasa dan Seni

Menyatakan bahwa Tugas Akhir Skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagian bahan acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21 Januari 2018

Perulis,

Suci Rahmadhani

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Jakarta:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmadhani

NIM : 2125142213

Prodi : Sastra Indonesia

Fakultas : Bahasa dan Seni

Judul Skripsi : Perbandingan *Framing* Berita Korupsi Pada Media Daring

Republika.co.id dan Tempo.co

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk menyimpan, mengalihmediakan formatnya, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, dan mempublikasinannya di internet atau media untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk hukum yang timbul atau pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Februari 2018

Suci Rahmadhani
No reg. 2125142213

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kesadaran adalah matahari,
Kesabaran adalah bumi,
Keberanian menjadi cakrawala, dan
Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.

-W.S Rendra-

Teruntuk separuh nafas saya, Mamak dan Sapak

Terima kasih

ABSTRAK

Suci Rahmadhani. *Perbandingan Framing Berita Perkara Korupsi pada Media Daring Republika.co.id dan Tempo.co.* Skripsi, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018.

Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah media daring Republika.co.id dan Tempo.co. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan *framing* berita kasus korupsi pada daring Republika.co.id dan Tempo.co melalui analisis *framing*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik membaca suatu artikel berita, dan teknik catat yakni mencatat setiap data yang ditemukan. Konsep yang digunakan adalah konsep *framing* dengan model analisis *framing* Willian A. Gamson. Secara khusus, peneliti ingin tahu bagaimana pemberitaan kasus korupsi pada daring Republika.co.id dan Tempo.co menggunakan model analisis *framing* Willian A. Gamson. Peneliti dapat menemukan 67 bukti dari substruktur *Framing Devices*. Diantaranya Republika.co.id sebanyak 33, dan Tempo.co sebanyak 34. Peneliti juga menemukan 42 bukti dari substruktur *Reasoning Devices*. Diantaranya Republika.co.id sebanyak 22, dan Tempo.co sebanyak 20.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penulisan skripsi yang berjudul *Perbandingan Framing Berita Perkara Korupsi Pada Media Daring Republik.co.id Dan Tempo.co* ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Program Studi Sastra Indonesia pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pihak yang membantu. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas dukungannya selama ini. Kemudian peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Liliana Mualiaستی, M.Pd. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang selalu mengayomi dan memberi banyak pengarahan demi kemajuan peneliti dan rekan-rekan.
2. Dr. Miftahul Khairah Anwar, M. Hum. Kaprodi Sastra Indonesia yang tak pernah bosan mengingatkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Asisda Wahyu, M.Hum. Pembimbing Materi yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing demi kelancaran pengerjaan skripsi ini.

4. Aulia Rahmawati M.Hum. Pembimbing Metodologi yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dan memberi pengarahannya yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Miftahul Khairah Anwar, M. Hum. sebagai Dosen Penguji Materi, terima kasih banyak Ibu telah atas pengarahannya dan masukan maupun saran sebagai perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. Krisanjaya, M.Hum. sebagai Dosen Penguji Metodologi, terima kasih banyak Bapak atas pengarahannya serta saran sebagai perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Miftahul Khairah Anwar, M.Hum. sebagai pembimbing akademik yang senantiasa memberi kasih sayang dan pengarahannya yang membangun bagi peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Para dosen Prodi Sastra Indonesia maupun Pendidikan Bahasa Indonesia. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan selama peneliti menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rezeki, kesehatan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
9. Seluruh karyawan Tata Usaha Prodi Sastra Indonesia, Pak Ratno, Mas Abu, dan Mbak Ida yang selalu memberikan informasi akademik dan membantu peneliti dalam proses administrasi.
10. Kepada Bapak Suyut dan Mamak Parmi, rasa syukur yang tiada habisnya karena dianugerahi orang tua seperti Bapak dan Mamak dengan kasih sayang yang luar biasa, doa-doa yang luar biasa, juga memberi banyak pembelajaran hidup seperti selalu dekat dengan Allah, terus berusaha jika ingin mencapai

cita-cita, pantang menyerah, sabar, menghargai orang lain, saling menyayangi dan tak lupa untuk bersyukur. Mungkin usaha peneliti ini tidak seberapa dibanding pengorbanan Bapak dan Mamak demi membahagiakan peneliti hingga saat ini. Peneliti merasa bahwa kesederhanaan itulah yang membuat manusia itu lebih bersyukur.

11. Kepada adikku tercinta Raihan Nur Fadilah yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga tambah cerdas dan jadi anak sholeh dan berbakti pada orang tua.
12. Mbah Kati dan Mbah Kakung, terima kasih telah merawat peneliti semenjak kecil hingga dewasa. Kasih sayang yang selalu Mbah berikan dalam perjalanan yang sangat panjang peneliti berjuang mencapai titik ini. Terima kasih menjadikan peneliti orang yang selalu mau belajar dan pantang menyerah dan mensyukuri apapun yang dimiliki serta mengajari bagaimana itu santun kepada siapapun.
13. Sahabat-sahabatku Mia Karnia, Menik Lestari, Riya Cahyani yang selalu memberi dukungan, doa, dan nasihat agar peneliti selalu optimis untuk menyelesaikan skripsi ini 3,5 tahun.
14. Kawan-kawan Mantan Dialektologi Squad; Fatin Mufidah, Ahmad Muzaki, dan Hari Sakti yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada peneliti.
15. Kawan-kawan kelas Linguistik yang telah berjuang selama 3,5 tahun, semoga kita semuanya sukses.

16. Kawan-kawan Indie-Go yang selalu membagi canda dan tawa semoga kalian semua sukses dimana pun kalian berada.
17. Keluarga Besar Karang Taruna Karya Muda yang senantiasa membagi rasa kekeluargaan yang ramah serta wejangan, doa, dan dukungan semenjak peneliti duduk di bangku Sekolah Dasar hingga saat ini, semoga silaturahmi selalu terjalin, dilimpahkan keberkahan serta kesehatan dimanapun kalian berdada.
18. Teman-teman peneliti dari masa kecil hingga saat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas rasa kekeluargaan dan semangat yang diberikan kepada peneliti hingga pada titik ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya, peneliti berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang budiman.

Jakarta, Februari 2018

Suci Rahmadhani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	7
2.1 Framing	7
2.2 Analisis Framing	10
2.3 Model Analisis Willian A. Gamson	14
2.4 Media	17
2.5 Profil <i>Republika.co.id</i>	24
2.6 Profil <i>Tempo.co</i>	25
2.7 Kerangka Berpikir	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Metode Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.3 Objek Penelitian	28
3.4 Fokus Penelitian	29
3.5 Instrumen Penelitian	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Kriteria Analisis	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Data	39
4.2 Analisis Data	42
4.2.1 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 1	42
4.2.2 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 2	49
4.2.3 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 3	54
4.2.4 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 4	62
4.2.5 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 5	68
4.2.6 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 6	74
4.2.7 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 7	80
4.2.8 Berita <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> 8	85
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	92
4.4 Pembahasan	92
4.5 Keterbatasan Penelitian	106

BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bahasa adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Hampir setiap saat manusia menggunakan bahasa terutama untuk berkomunikasi. Hal inilah yang juga diungkapkan Harimurti Kridalaksana mengenai pengertian bahasa, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri ¹.

Berbicara mengenai bahasa, salah satu fungsinya yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang dimaksudkan berkaitan dengan konteks penelitian ini adalah berita. Informasi lisan salah satunya seperti halnya yang ditampilkan dalam berita di televisi. Selain itu, informasi yang disampaikan dengan tulisan atau secara tertulis sebagai salah satu contoh yaitu berita pada media massa cetak maupun daring.

Seiring berkembangnya zaman, penggunaan media dalam menyampaikan berita kian meningkat. Peningkatan ini dapat terlihat dari teknologi yang digunakan maupun jumlah pengguna media untuk mendapatkan berita. Pada era reformasi yang menjadi masa kebebasan bagi media massa, kemudian banyak bermunculan media-media baru. Diantaranya yakni media cetak dan media daring. Sampai saat ini kedua media tersebut mengalami perkembangan pesat. Meskipun

¹Kushartanti dkk.,*Pesona Bahasa*,(Jakarta,2009) hlm.3

terdapat media televisi sebagai pesaing diantara keduanya, utamanya media daring, memiliki kemampuan memberikan informasi yang lebih variatif dan *up-to-date*. Bahkan karenanya, banyak perusahaan penyedia berita media cetak yang membuat situs daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berita. Karena kebutuhan masyarakat akan informasi bersamaan kesibukan dengan masyarakat yang terus meningkat, penggunaan media daring tentunya efektif bagi masyarakat di era sekarang.

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh media daring tersebut, tentu terdapat kekurangan. Dari segi waktu penampilan berita yang cepat, tentu proses yang dilalui tidak sepanjang seperti yang terdapat dalam media cetak. Selain itu dari segi penyajian berita. Sudut pandang yang digambarkan wartawan tentunya sangat berpengaruh untuk isi berita. Dari banyaknya media daring di Indonesia, masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. Hal tersebut tentu mempengaruhi pula terhadap penyajian berita, utamanya *framing* berita tersebut.

Tema dan topik dari media-media tentu juga disesuaikan dengan ideologi yang dianut oleh media tersebut. Di Indonesia sejak satu tahun terakhir, topik yang masih hangat untuk dibicarakan yaitu tentang korupsi. Salah satunya karena terdapat kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus E-KTP. Hal ini dibenarkan oleh Mardikantoro dalam salah satu artikelnya, salah satu topik yang selalu menarik untuk diangkat menjadi beritautama adalah korupsi. Topik tentang korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena masalah korupsi merupakan masalah yang sampai saat ini tidak pernah ada akhirnya. Meningkatnya pembahasan berita mengenai korupsi

tentu dipengaruhi oleh animo masyarakat dalam mengikuti perkembangan pengusutan kasus korupsi. Selain itu, kasus yang selama satu tahun ini sering diperbincangkan menyangkut kehidupan rakyat di Indonesia atau dapat dikatakan sebagai kasus korupsi tingkat nasional. Dalam kutipannya dari Koran Merdeka, jika dilihat dari kawan regional, Indonesia merupakan negara tersubur korupsinya di antara negara-negara di Asia Tenggara².

Ditambahkannya bahwa, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menemui jalan buntu. Penguasaan harta secara tidak sah oleh seseorang atau sekelompok orang di Indonesia memang menjadi magnet dalam memperkaya diri. Dengan demikian, surat kabar pun akan secara signifikan menginformasikan masalah tersebut kepada pembaca.

Meningkatkannya animo masyarakat terhadap berita korupsi ini yang menjadi pemicu media-media saling bersaing untuk mendapatkan berita paling depan dengan seakurat mungkin. Wartawan media berada di kecepatan dalam memperoleh berita. Namun hal ini tidak luput dari pembahasan sebelumnya yaitu tentang ideologi yang dijadikan pedoman masing-masing media. Pengaruh ideologi ini tentu cukup penting dalam penulisan berita. Dapat dilihat dari *framing* (pembingkai) sebuah berita korupsi pada sebuah media daring dengan media daring lainnya dalam mengambil sudut pandang. Konsep berpikir yang dihidupkan dari kedua media pun juga bisa saja berbeda. *Framing* sebuah berita ini sangat memengaruhi asumsi masyarakat terhadap sebuah berita.

²Mardikantoro., <https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/viewFile/2576/2130>., diakses pada 05 September 2017 pkl. 00.35 , hlm.216

Pemberitaan mengenai korupsi dalam dua buah media daring yang berbeda membentuk dua buah asumsi mengenai sebuah berita. Dalam penelitian mengenai *framing* berita korupsi ini, peneliti fokus pada dua buah media daring yaitu *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.

Membahas sedikit mengenai kedua media daring tersebut, keduanya memiliki ideologi yang berbeda. Dapat diketahui melalui awal terbentuknya kedua media daring tersebut. *Republika.co.id* yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang tentunya pemberitaan yang lebih dominan yaitu tentang agama atau religi. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa *Republika.co.id* cukup *update* tentang berita mengenai aspek politik atau yang lebih spesifik mengenai korupsi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan *Tempo.co* yang menamakan dirinya sebagai pionir pemberitaan media massa, tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding *Republika.co.id*. Yang paling mencolok dari sejarah *Tempo.co* ini adalah ketika Tempo masih dalam bentuk surat kabar yang kemudian dibredel karena memberitakan tentang partai Golkar.

Dari perbedaan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk membandingkan *framing* berita korupsi dari kedua media daring tersebut. Dari identifikasi mengenai *framing* berita ini kita dapat mengetahui tujuan atau pesan apa yang ingin disampaikan penulis berita terhadap masyarakat dengan acuan ideologi masing-masing. Selain itu, keberadaan ideologi yang sangat berpengaruh, tidak selalu memberikan perbedaan yang signifikan dalam penggambaran sebuah berita dari dua media daring. Hal ini tentu semakin membuat menarik penelitian

mengenai “Perbandingan *Framing* Berita Korupsi Pada Media Daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjabaran latar belakang tersebut, dapat diambil diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana peran media daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* dalam memberitakan kasus korupsi?
2. Bagaimana penerapan *framing* model William A. Gamson pada berita korupsi daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*?
3. Bagaimana perbandingan *framing* berita perkara korupsi pada media daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu umum, skripsi ini mengambil beberapa batasan masalah, yaitu pada perbandingan pembingkaihan pemberitaan perkara korupsi pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*. Adapun pemberitaan kasus korupsi pada kedua media daring tersebut dibagi atas beberapa topik, yaitu korupsi e-ktip, korupsi pengadaan pupuk, korupsi bantuan desa dan kasus yang berkaitan KPK itu sendiri serta terjadi pada tahun 2017 (Januari-Agustus).

1.4 Rumusan Masalah

Dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan masalah bagaimana perbandingan *framing* (pembingkaihan) berita perkara korupsi pada media *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu menjelaskan perbandingan *framing* (pembingkaihan) berita korupsi pada media *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengolah berita agar layak dibaca oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi kepada masyarakat, khususnya pembaca media daring mengenai perbedaan ataupun persamaan *framing* berita bertema korupsi oleh *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai perbandingan *framing* berita perkara korupsi pada media daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.
- c. Sebagai acuan penelitian mengenai perbandingan *framing* berdasarkan analisis wacana kritis oleh William A. Gamson.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini akan mengulas mengenai *framing*, analisis *framing*, jenis-jenis analisis *framing*, model analisis Willian A. Gamson, media, profil *Republika.co.id*, profil *Tempo.co* dan kerangka berpikir.

2.1 Framing

Framing adalah bagian penting dalam pembuatan sebuah berita. *Framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955. Pada masa itu, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.¹ Setelah itu, konsep tersebut dikembangkan oleh Goffman pada 1974 dengan mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas. Sedangkan di era sekarang, konsep *framing* digunakan dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksi dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.

Dalam hal penjabaran terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang *framing*. Salah satunya yaitu Touchman dan dituliskan oleh Eriyanto, Touchman yang menyamakan *frame* dengan jendela. Bila seseorang melihat lewat jendela, batasan pandangan dapat menjadi penghalang untuk melihat realitas yang

¹Alex Sobur., *Analisis Teks Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 162

sebenarnya. *Frame* menyebabkan terjadinya stereotipisasi.² yang mendefinisikan bahwa, Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media³. Tidak hanya itu, Eriyanto kembali menambahkan, Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Karenanya, seperti dikatakan Frank D. Durham, *framing* membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu.

Beberapa ahli juga memberikan definisi terhadap *framing*, salah satunya adalah Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki yang mengemukakan bahwa *framing* adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita⁴.

Amy Binder pun menambahkan konsep *framing* yaitu skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasikan, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung.

²Ari Subagyo., *Konsep Frame (Bingkai) dalam Antropologi, Ilmu Komunikasi, dan Analisis Wacana*, (Yogyakarta: Program Studi S2 Linguistik FIB UGM, 2013), hlm 124

³Eriyanto., *Analisis Framing*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm 76

⁴*Ibid.*, hlm 79

Dalam hal ini *frame* dapat memudahkan individu untuk memahami makna sebuah peristiwa.

Robert N. Entman menambahkan *framing*, yakni proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain⁵.

Framing, seperti yang dikatakan Todd Gitlin merupakan sebuah strategi untuk membentuk dan menyederhanakan sebuah realitas kemudian ditampilkan kepada khalayak pembaca. Tentunya peristiwa yang ditampilkan pun lebih menonjol dan menarik perhatian khalayak.

Definisi mengenai *framing* ini ditambahi oleh David E. Snow dan Robert Sanford, pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu⁶. Sedangkan William A. Gamson dalam kutipannya menjelaskan tentang *framing* yang merupakan cara bercerita yang terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan tersebut digunakan dalam membentuk struktur pemahaman pesan-pesan yang ingin disampaikan.

Konsep *framing* atau *frame* sendiri, menurut Sudibyo, bukan berasal dari ilmu komunikasi, melainkan konsep yang dipinjam dari ilmu komunikasi,

⁵*Ibid.*, hlm 77

⁶*Ibid.*, hlm 78

melainkan konsep yang dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Analisis *framing* juga memungkinkan disertakannya konsep-konsep sosiologis, politik, dan budaya untuk menganalisis fenomena-fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat benar-benar dipahami menurut konsep-konsep tersebut.

2.2 Analisis *Framing*

Analisis *framing* ini tentunya perlu dilakukan karena dapat membantu dalam memahami makna serta struktur pesan yang ingin disampaikan oleh penulis sebuah berita. Seperti yang dikemukakan oleh Sobur, analisis *framing* tersebut sebagai alternatif untuk lebih memahami makna bahasa, struktur pesan dalam komunikasi, dan upaya media dalam mendefinisikan realitas sosial dalam kemasan teks-teks berita⁷. Dia juga menambahkan bahwa, analisis *framing* merupakan perkembangan terbaru yang lahir dari elaborasi terus menerus terhadap pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menghasilkan suatu metode yang *up-to-date* untuk memahami pelbagai fenomena media mutakhir.

Dalam ranah studi komunikasi, analisis *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi.⁸ Selain itu, masih dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dapat dipakai untuk membedah cara-cara ataupun ideologi media saat mengkonstruksi fakta.

Selain itu, Erving Goffman juga menjabarkan bahwa konsep analisis *framing* secara sosiologis memelihara kelangsungan kebiasaan dalam

⁷Sobur., *op.cit*, hlm. 6

⁸*Ibid.*, hlm 162

mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya.

Dalam menganalisa wacana terdapat beberapa model yang dapat digunakan beberapa model *framing* seperti model *framing* dari Murray Edelman, Robert N. Entman, Zhongdong Pan dan Gerald M. Kosicki, dan William Gamson. Dari masing-masing ahli tersebut memiliki model dan instrumen masing-masing dalam analisis. Berikut ini adalah penjabaran beberapa jenis analisis tersebut:

2.2.1 Jenis-jenis Analisis *Framing*

Terdapat beberapa model analisis *framing* yang dapat digunakan untuk menganalisis artikel berita yaitu:

1. Murray Edelman dengan model yang dia kemukakan yakni menyetarakan *framing* dengan kategorisasi. Kategorisasi disini dapat diartikan lebih halus daripada propaganda. Kategorisasi yang dimaksud yaitu penyederhanaan. Realitas yang kompleks dengan banyak dimensi, ditekankan pada salah satu sisinya sehingga sisi yang lain atau dimensi lain yang merupakan fakta menjadi tidak terliput. Dalam pandangan Edelman, seringkali kategori yang dipakai itu salah salah atau menipu khalayak. Peristiwa dibungkus dengan klasifikasi dan kategori tertentu. Menurut Edelman klasifikasi berhubungan dengan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena dipahami dan dikomunikasikan. Menurutnya, klasifikasi juga dapat menentukan dan

berpengaruh terhadap dukungan atau oposisi politik. Selain itu, klasifikasi juga dapat berpengaruh kepada emosi khalayak ketika memandang atau melihat suatu peristiwa. Apakah pembaca mendukung ataupun menentang suatu isu tergantung pada bagaimana peristiwa tersebut disajikan dan dikomunikasikan.

2. Model framing kedua, Robert N. Entman melihat *framing* dari dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu. Penonjolan isu yang dimaksud adalah membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan biasa. Dalam model Entman ini, terdapat empat bagian yang digunakan dalam analisis. Pertama yaitu pendefinisian masalah. Pada bagian ini, ditekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda tersebut menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. Yang kedua yaitu memperkirakan penyebab masalah, elemen *framing* untuk membingkai siapa yang menjadi aktor dari peristiwa tersebut. Elemen ketiga adalah membuat pilihan moral, yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Elemen selanjutnya adalah menekankan penyelesaian, yakni digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan dan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

3. Model *framing* selanjutnya adalah model *framing* dari Zhongdong Pan dan Gerald M. Kosicki. Frame model ini beranggapan bahwa sebuah *frame* merupakan pusat dari organisasi ide. Kemudian menghubungkannya dengan elemen lain dalam teks berita seperti latar informasi, kutipan sumber, pemakaian kata atau kalimat tertentu. Terdapat empat perangkat dalam model *framing* ini, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pertama yaitu sintaksis, berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan umum berita. Unit yang diamati pada bagan berita yaitu pada *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup. Kedua yaitu skrip yang berhubungan dengan cara wartawan mengisahkan berita. Unit yang diamati yaitu pada 5W+1H. Ketiga yaitu tematik, yang berhubungan dengan cara wartawan menulis fakta. Unit yang diamati yaitu pada paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat. Keempat yaitu retorik, berhubungan dengan cara wartawan menekankan fakta. Unit yang diamati yaitu pada kata, idiom, gambar/foto, grafik.
4. Model *framing* terakhir yaitu dari William A. Gamson. Menurut pandangan Gamson wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa⁹.

⁹Eriyanto., *op.cit*, hlm. 253

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis model William Gamson. Gagasan yang dikemukakan Gamson ini digunakan untuk menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Perangkat yang digunakan bukan hanya perangkat *framing* yang berkaitan dengan isi dari berita tersebut, tetapi juga menggunakan perangkat penalaran untuk menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi lain.

2.3 Model Analisis William A. Gamson

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut. Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*). Menurut mereka, *frame* adalah cara bercerita atau gagasan ide yang terorganisasi sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana¹⁰.

¹⁰*Ibid.*, hlm 261

Judul Berita		Framing Devices (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
		<i>Methapors</i> (perumpamaan)			
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)			
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)			
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)			
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)			
		<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat	Analisis	Analisis	

		Penalaran)			
		<i>Roots</i> (sebab- akibat)			
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)			
		<i>Consequences</i> (efek)			

Analisis model William A. Gamson sehingga data dianalisis menggunakan dua struktur, yaitu *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) dan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran). *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) terbagi menjadi lima bagian, yaitu *Methapors*, *Catchphrases*, *Exemplaar*, *Depiction*, dan *Visual Images*. Sedangkan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Roots*, *Appeals to Principle*, dan *Consequences*.

Dimulai dari perangkat *framing* yang pertama, *metaphors* atau biasa disebut perumpamaan atau pengandaian. Penggunaan metafora ini bisa menjadi petunjuk utama untuk mengetahui makna teks. Metafora juga dapat menjadi alasan pembenaran, landasan berpikir, maupun yang akan ditekankan wartawan kepada publik. Metafora dapat dipahami sebagai cara memindah makna dengan merealisasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kata kiasan seperti, ibarat,

bak, sebagai, umpama, laksana. Menurut Henry Tarigan, metafora merupakan sejenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, dan tersusun rapi. Di dalamnya terdapat dua gagasan yaitu satu sebagai suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan, yang menjadi objek. Gagasan yang kedua yaitu metafora merupakan pembanding terhadap kenyataan tadi. Menurut Imawan yang dituliskan oleh Sobur, metafora berperan ganda. Perangkat pertama yaitu sebagai perangkat diskursif dan ekspresi piranti mental. Peran yang kedua yaitu berasosiasi dengan asumsi atau penilaian, serta memaksa teks membuat sense tertentu. Perangkat *framing* yang kedua yakni *catchphrases*. Perangkat ini mencakup frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Biasanya berupa slogan atau jargon. *Catchphrase* dapat diartikan juga sebagai istilah, bentukan kata, atau frase yang khas yang merupakan cerminan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Ketiga, *exemplaar* atau mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori ataupun perbandingan) yang memperjelas bingkai. Menurut Sobur, *exemplaar* mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna yang lebih untuk dijadikan rujukan. *Exemplaar* sebagai pelengkap bingkai inti yang digunakan untuk membenarkan perspektif. Keempat, *depiction* yaitu penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Biasanya berupa kosakata dan leksikon untuk melabeli sesuatu. *Depiction* juga dapat diartikan sebagai penggambaran fakta dengan memakai istilah, kata, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Pemakaian kata tersebut diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan, pikiran dan tindakan. Kelima, *visual image* yang mencakup gambar,

grafik, ataupun citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. *Visual image* ini juga dapat mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam teks tersebut.

Berlanjut pada *reasoning devices* atau perangkat penalaran. Perangkat penalaran ini terdiri atas tiga perangkat, yaitu *roots*, *appeals to principle*, dan *consequences*. *Roots*, berisi analisis kausal atau sebab akibat. *Roots* (analisis kausal) merupakan pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjaidnya hal yang lain. Kemudian *appeals to principle* yang berisi premis dasar dan juga klaim-klaim moral. *Appeals to principle*, pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumentasi pembenaran berita, berupa pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan sejenisnya. Tujuannya membuat khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya adala untuk memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, cara tertentu, serta membuatnya tertutup/keras dari bentuk penalaran lain. Yang terakhir *consequences* yaitu efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai tersebut.

2.4 Media

Dalam penelitian ini, media merupakan pemegang peran penting yakni sebagai objek yang akan dikaji. Terlepas dari media perannya dalam penelitian ini, media juga mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Bahkan pengaruh yang dibawa media ini utamanya media massa, dapat menentukan proses perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Seperti yang

dikemukakan oleh Sobur bahwa, Media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan, media, terlebih dalam posisinya sebagai institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik.

Sobur mengatakan, media massa dianggap tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan kosong dalam dirinya sendiri. Ia hanya berisi apabila diisi dengan pesan oleh komunikator kepada pihak tertentu¹¹. Pendapat tersebut adalah menurut sebagian orang yang beranggapan bahwa media massa sebenarnya mencari kebenaran dan memberitahukannya kepada masyarakat. Selebihnya hanyalah alat komunikasi saja.

Kemudian negarawan Amerika Serikat, Adlai Stevenson mengatakan, Editor adalah orang yang memisahkan gandum dan kulitnya dan mencetak kulit tersebut¹². Pendapat yang lain mengenai media juga menarik, mengibaratkannya seperti “Dokter menyembunyikan kesalahannya. Pengacara menggantungkannya. Editor menaruhnya di halaman depan” menurut Macnamara¹³. Pengibaran yang disampaikan kedua ahli tersebut menggambarkan seorang wartawan yang juga sebagai penulis berita. Media massa tidak pernah dan tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran atau kenyataan apa adanya. Ia lebih banyak menjanjikan mimpi dan fiksi. Ia mendahului semua itu ia menciptakan peristiwa. Menafsirkan

¹¹Alex Sobur., *op.cit*, hlm 33

¹²*Ibid.*, hlm 33

¹³*Ibid.*, hlm 33

dan mengarahkan terbentuknya kebenaran. Tidak selalu untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu secara setia dan terkontrol. Media di sini, memiliki kewibawaan untuk menulis sebuah berita, terkadang mereka memberitakan karena kepentingan suatu kelompok atau seseorang, namun juga banyak diantaranya yang membuat berita dengan netral dan tidak memihak.

McQuill dalam bukunya *Mass Communication Theories* menyatakan ada 6 (enam) perspektif tentang peran jurnalistik atau media massa dalam konteks masyarakat modern.

1. Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan peristiwa. Media massa merupakan jendela “jendela” untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan kita.
2. Media massa sebagai cermin peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat maupun dunia, dalam wujud refleksi apa adanya. Media massa adalah refleksi fakta, yang terlepas dari rasa suka atau tidak suka.
3. Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai hal informasi atau *issue* yang layak mendapat perhatian atau tidak.
4. Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam.
5. Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau ide kepada publik untuk memperoleh tanggapan atau umpan balik.

6. Media massa sebagai interkulator, yang tidak sekadar tempat “lalu lalang” informais, tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif¹⁴.

Media berita daring, saat ini memang menjadi sumber yang digunakan masyarakat untuk mendapat informasi secepat dan seakurat mungkin. Menurut Syarifudin Yunus, Media massa bukanlah sekadar industri atau bisnis semata (*commercial institution*), yang hanya mencari keuntungan dan menjadi tempat wartawan bekerja, tetapi juga telah tumbuh menjadi institusi sosial dan politik (*social and political institution*) yang mampu menyentuh alam pikiran masyarakat¹⁵. Pengaruhnya terjadi pada masyarakat pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Membicarakan mengenai media, terdapat pendapat dari Syarifudin Yunus tentang peran dari media itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan informasi yang membuat eksistensi dari media massa itu meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa jurnalistik menjadi bagian yang melekat pada dinamika kehidupan sosial yang berfungsi sebagai sarana informasi, sarana hiburan, alat kontrol sosial, dan sebagai pengawal demokrasi. Kini terpulang kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan pilihan media yang dapat memberi pengaruh positif atau negatif dalam setiap penyajian beritanya¹⁶. Pada sudut pandang ini, terlihat bahwa masyarakat juga harus cerdas dalam memilih

¹⁴Syarifudin Yunus., *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm 10

¹⁵*Ibid.*, hlm 9

¹⁶*ibid.*, hlm 9

media yang diikuti. Karena hal tersebut akan berpengaruh bagi pola pikir masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak berita yang menjadi perbincangan paling sering muncul dalam pemberitaan di media televisi maupun daring. Meningkatnya animo masyarakat mengenai pemberitaan isu terkini tersebut tentu dipengaruhi oleh kemudahan yang diberikan oleh media daring. Masyarakat dapat dimanapun dan kapanpun mengetahui berita apapun dalam satu waktu. Bahkan masyarakat dapat selalu mengetahui berita apapun yang sedang hangat pada detik yang sama. Ditambahkan lagi oleh Syarifudin Yunus bahwa, “berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2008 menunjukkan ada 78% masyarakat yang berusia lebih dari 10 tahun ke atas lebih cenderung memanfaatkan media elektronik, khususnya televisi dalam mendapatkan akses informasi, sedangkan sekitar 22% menyatakan memperoleh informasi melalui media cetak, khususnya surat kabar harian dan majalah¹⁷.

Yunus menjelaskan bahwa media *online* sebagai sarana yang mudah untuk mendapat informasi. Tidak dapat dipungkiri media *online* dalam satu dekade belakangan ini sangat marak. Setidaknya saat ini telah ada lebih dari 155 juta *website*, media *online*. Istilah *www* yang merupakan singkatan dari *world wide web* telah hadir sebagai fenomena besar dalam teknologi internet dan menjadi sarana paling mudah dalam mengakses informasi atau berita. Dari sini pula, media *online* hadir dan makin meluas pengaruhnya. Bahkan kini, hampir semua media cetak dan elektronik pun memiliki media *online* sebagai penunjang dan basis

¹⁷*Ibid.*, hlm 8

dokumentasi penyajian informasi dan berita yang dilakukannya. Setiap berita yang disajikan di media cetak maupun media elektronik, kini juga dapat diakses melalui media *online* atau *website* masing-masing media tersebut”.

Dalam sebuah wacana terutama wacana berita tentu terdapat bagian yang dinamakan dengan tajuk berita. Sedikit membahas mengenai tajuk berita, tajuk berita ini dapat menggambarkan sudut pandang dari seorang wartawan maupun penulis berita. Dikatakan oleh Mardikantoro, kaitannya dengan wacana tajuk (anti) korupsi bahwa tajuk dalam sebuah surat kabar adalah manifestasi sikap dan ideologi dari surat kabar tersebut. Namun ideologi yang dimaksud bukanlah yang disampaikan oleh Faucault yaitu *will the power* atau hasrat untuk berkuasa. Namun yang dimaksud disini adalah ideologi dari pengertian yang netral yaitu *worldview* atau pandangan tentang dunia. Ditambahkannya dari pendapat Hamad, bahwa ideologi dalam arti semiotik, yakni titik tolak untuk melakukan produksi dan interpretasi pesan atau nilai moral suatu simbol yang oleh Roland Barthes disebut mitologi.¹⁸

Masih berbicara mengenai berita, selain pandangan tentang keberpihakan sebuah media, wartawan pun juga peran penting dalam pembuatan sebuah berita. Seperti pernyataan Eriyanto kerangka rujukan yang dimiliki kelompok wartawan memungkinkan mereka memunculkan persepsi yang berbeda dengan persepsi pemerintah, atau bahkan persepsi rakyat kebanyakan”. Hal ini menunjukkan kaitan antara penulisan sebuah berita oleh wartawan dengan persepsi pembaca¹⁹.

¹⁸Mardikantoro., *op.cit*, hlm. 217

¹⁹Eriyanto., *op.cit*, hlm xi

Menurut Mardikantoro dalam artikelnya, “setiap surat kabar tentu menunculkan rubrik tajuk. Tajuk atau tajuk rencana adalah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu. Dengan membaca tajuk, bisa dipahami sikap dan pandangan surat kabar tersebut tentang suatu topik tertentu”.

Namun, dari berbagai media berita daring tersebut tentunya memiliki gaya masing-masing dalam menuliskan sebuah topik berita. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Eriyanto mengenai wartawan media massa. Wartawan media massa cenderung memilih seperangkat asumsi tertentu yang berimplikasi bagi pemilihan judul berita, struktur berita, dan keberpihakannya kepada seseorang atau sekelompok orang, meskipun keberpihakan tersebut sering bersifat subtil dan tidak sepenuhnya didasari. Asumsi wartawan bersifat parsial, karena mewakili pihak-pihak lain. Seperti pandangan masing-masing orang terhadap sebuah masalah, mereka selektif dalam memahami lingkungannya dan memiliki perbedaan dalam pendapatnya meskipun itu hanya sedikit.

Kaitannya dengan hal tersebut tentunya peran media massa akan sangat menentukan bagaimana berita itu ditulis atau yang sering kita kenal dengan istilah *framing* (pembingkai) kemudian membentuk sebuah opini di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Dedy N. Hidayat tentang fungsi media massa yaitu, memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk menentukan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik²⁰. Kemudian,

²⁰Agus Sudibyo., *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm vii

menurut Eriyanto framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi dan menulis berita²¹.

2.5 Profil *Republika.co.id*

Republika adalah sebuah koran nasional yang lahir dari kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Republika berdiri sejak tahun 1992 dan pertama kali menerbitkan koran pada 1993 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini harian Republika diterbitkan oleh PT. Republika Media Mandiri dan menjadi harian umum. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. PT Abdi Bangsa kemudian menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors, JakTV, dan Alif TV.

Meskipun berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Di samping itu,

²¹Eriyanto., *op.cit*, hlm 261

Republika juga mempunyai portal berita yang diberi nama Republika Online (ROL). ROL hadir sejak 17 Agustus 1995. ROL adalah portal berita yang menyajikan informasi melalui teks, audio dan video berdasar teknologi hipermedia dan hiperteks. ROL hadir dalam dua bahasa yakni Inggris dan Indonesia.

2.6 Profil Tempo.co

Pada tahun 1971, pada saat majalah berita mingguan Tempo yang pada saat itu dibawah PT. Grafiti Pers sebagai penerbitnya, menerbitkan perdana majalah pada 6 Maret 1971. Kemudian penerbitan majalah ini vakum selama 4 tahun dari 1994-1998 karena dibredel. Pada tahun 1978 pun hadir percetakan PT. Temprint yang berperan menunjang kelancaran penerbitan Tempo.

Pada tahun 2001, bersamaan dengan lahirnya PT. Tempo Inti Media TBK, lahirlah Koran Tempo yang diterbitkan perseroan untuk berkompetisi di “lapak” media harian. Koran Tempo yang menjadi pionir sebagai koran dalam format *compact* di Indonesia ini unggul dalam liputan pemberantasan korupsi, politik, dan ekonomi. PT. Tempo Inti Media Tbk. ini berdomisili di Jalan Palmerah Barat no. 8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Informasi yang disebarkan terus berkembang seiring dengan munculnya produk-produk baru. Kini majalah Tempo English, majalah Travelounge dan media digital tempo.co serta Tempo News Room (TNR), kantor berita yang berfungsi sebagai pusat berita memperkuat Tempo Media Group.

Tempo memasuki bisnis televisi dengan mendirikan Tempo TV yang bekerja sama dengan kantor berita radio KBR 68H. Terdapat Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) yang menyediakan data teks, foto, infografis, dan video untuk mendukung produk-produk grup ataupun pihak luar. Tahun 2013 lahir juga PT.Tempo Inti Media Impresario (PT. TIMI) yakni perusahaan yang mengelola kegiatan-kegiatan (event) yang diselenggarakan atas kerjasama antara Tempo dan pihak luar.

Dibawah pimpinan Bambang Harymurti sebagai Direktur Utama dan empat anggota dewan direksi yang lain, Herry Hernawan, Toriq Hadad, Gabriel Sugrahetty Dian K dan Sri Malela Mahargasarie, Tempo siap menjelajahi usaha penyedia informasi. Tahun 2014 beriringan menghangatnya suhu politik dengan adanya pemilihan Presiden RI, nilai tukar rupiah sempat menjadi merosot tajam yang disertai penurunan indeks Indonesia. Namun ditengah keadaan ekonomi yang menurun, Tempo Media Group berhasil membukukan laba bersih Rp 15 miliar.

Pada 2014, pembangunan Gedung Tempo mendekati tahap akhir. Selain membangun Gedung Tempo, Perseroan melakukan sejumlah investasi strategis di sektor produk digital, di antaranya dengan penambahan jumlah berita yang ditayangkan setiap hari, penambahan server, dan peningkatan frekuensi update berita. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas terjadinya peningkatan kepercayaan publik terhadap portal berita *Tempo.co*, yang jumlah pengunjungnya pada 2014 naik 62,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2014,

Perseroan juga mengembangkan kualitas dan kuantitas penyiaran TV Tempo serta bersiap menyambut siaran *free to air*.

2.7 Kerangka Berpikir

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksikan oleh media. Model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari William A. Gamson. Gagasannya ini digunakan untuk menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. menurutnya, *frame* adalah cara bercerita atau gagasan ide yang terorganisasi sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Dan media merupakan elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Cara bercerita yang dimaksud adalah dalam bentuk kemasan yang membuat sebuah berita tersebut menarik perhatian pembaca.

Media massa merupakan gambaran untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan kita. Salah satu produk media masa berbentuk daring. Dalam menulis sebuah berita dalam media massa, seorang wartawan menggunakan *framing*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kriteria analisis.

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada teori, definisi, dan konsep. Data yang diambil menggunakan metode membaca artikel berita. Selain itu metode yang digunakan mencatat setiap data temuan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak terikat tempat. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017.

3.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah berita kasus korupsi pada media daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*. pemilihan kedua media daring tersebut berdasarkan:

1. Daring ini merupakan surat kabar daring di Indonesia.
2. Di dalam daring ini terdapat berita perkara korupsi yang akan diteliti.
3. Artikel berita yang diteliti sebanyak 16 artikel.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perbandingan *framing* berita perkara korupsi pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.

3.5 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis model William A. Gamson sehingga data dianalisis menggunakan dua struktur, yaitu *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) dan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran). *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) terbagi menjadi lima bagian, yaitu *Methapors*, *Catchphrases*, *Exemplaar*, *Depiction*, dan *Visual Images*. Sedangkan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Roots*, *Appeals to Principle*, dan *Consequences*.

Judul Berita		<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
		<i>Methapors</i> (perumpamaan)			
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)			
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)			
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)			
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)			
		<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	

		<i>Roots</i> (sebab-akibat)			
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)			
		<i>Consequences</i> (efek)			

Analisis model William A. Gamson sehingga data dianalisis menggunakan dua struktur, yaitu *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) dan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran). *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) terbagi menjadi lima bagian, yaitu *Metaphors*, *Catchphrases*, *Exemplars*, *Depiction*, dan *Visual Images*. Sedangkan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Roots*, *Appeals to Principle*, dan *Consequences*.

Dimulai dari perangkat *framing* yang pertama, *metaphors* atau biasa disebut perumpamaan atau pengandaian. Penggunaan metafora ini bisa menjadi petunjuk utama untuk mengetahui makna teks. Metafora juga dapat menjadi alasan pembenaran, landasan berpikir, maupun yang akan ditekankan wartawan kepada publik. Metafora dapat dipahami sebagai cara memindah makna dengan merealisasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kata kiasan seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. Metafora merupakan sejenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, dan tersusun rapi. Di dalamnya terdapat dua gagasan yaitu satu sebagai suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan, yang menjadi objek. Gagasan yang kedua yaitu metafora merupakan pembanding terhadap kenyataan tadi. Menurut Imawan yang dituliskan oleh Sobur, metafora berperan ganda. Perang yang pertama yaitu sebagai perangkat diskursif dan ekspresi piranti mental. Peran yang kedua yaitu berasosiasi dengan asumsi atau

penilaian, serta memaksa teks membuat sense tertentu. Perangkat *framing* yang kedua yakni *catchphrases*. Perangkat ini mencakup frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Biasanya berupa slogan atau jargon. *Catchphrase* dapat diartikan juga sebagai istilah, bentukan kata, atau frase yang khas yang merupakan cerminan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Ketiga, *exemplaar* atau mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori ataupun perbandingan) yang memperjelas bingkai. Menurut Sobur, *exemplaar* mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna yang lebih untuk dijadikan rujukan. *Exemplaar* sebagai pelengkap bingkai inti yang digunakan untuk membenarkan perspektif. Keempat, *depiction* yaitu penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Biasanya berupa kosakata dan leksikon untuk melabeli sesuatu. *Depiction* juga dapat diartikan sebagai penggambaran fakta dengan memakai istilah, kata, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Pemakaian kata tersebut diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan, pikiran dan tindakan. Kelima, *visual image* yang mencakup gambar, grafik, ataupun citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. *Visual image* ini juga dapat mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam teks tersebut.

Berlanjut pada *reasoning devices* atau perangkat penalaran. Perangkat penalaran ini terdiri atas tiga perangkat, yaitu *roots*, *appeals to principle*, dan *consequences*. *Roots*, berisi analisis kausal atau sebab akibat. *Roots* (analisis kausal) merupakan pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjaidnya hal yang lain.

Kemudian *appeals to principle* yang berisi premis dasar dan juga klaim-klaim moral. *Appeals to principle*, pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumentasi pembenaran berita, berupa pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan sejenisnya. Tujuannya membuat khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya adalah untuk memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, cara tertentu, serta membuatnya tertutup/keras dari bentuk penalaran lain. Yang terakhir *consequences* yaitu efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai tersebut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berita korupsi pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* dari Januari 2017 – Oktober 2017 untuk dijadikan sumber data.
2. Menyeleksi dan mengurutkan berita korupsi pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* dari Januari 2017 – Oktober 2017 berdasarkan tanggal.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut dalam menganalisis data:

1. Menginventarisasi berita korupsi pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*, dimulai dari berita yang terdahulu.

2. Memasukkan ke dalam tabel analisis kerja.
3. Menganalisis tiap-tiap bagian berita yang sudah dipindah ke tabel analisis kerja.
4. Mendeskripsikan dari data yang ada.
5. Menginterpretasikan hasil rangkuman data.
6. Melakukan pembahasan dari hasil interpretasi data.
7. Menyimpulkan hasil analisis.

3.8 Kriteria Analisis

Menurut pandangan Gamson (dalam Eriyanto, 2002:263), framing dipahami sebagai seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami memaknai suatu isu. Ide sentral ini akan didukung oleh perangkat wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dan bagian lain saling kohesif (saling mendukung). Terdapat dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan dalam teks berita.

Pertama yaitu *framing devices* (perangkat framing terbagi menjadi lima bagian, yaitu *Metaphors*, *Catchphrases*, *Exemplars*, *Depiction*, dan *Visual Images*. Dimulai dari perangkat *framing* yang pertama, *metaphors* atau biasa disebut perumpamaan atau pengandaian. Penggunaan metafora ini bisa menjadi petunjuk utama untuk mengetahui makna teks. Metafora juga dapat menjadi alasan pembenara, landasan berpikir, maupun yang akan ditekankan wartawan kepada publik. Perangkat *framing* yang kedua yakni *catchphrases*. Perangkat ini mencakup frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Biasanya



berupa slogan atau jargon. Ketiga, *exemplar* atau mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori ataupun perbandingan) yang memperjelas bingkai. Keempat, *depiction* yaitu penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Baisanya berupa kosakata dan leksikon unyutuk melabeli sesuatu. Kelima, *visual image* yang mencakup gambar, grafik, ataupun citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. *Visual image* ini juga dapat mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam teks tersebut.

Sedangkan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Roots*, *Appeals to Principle*, dan *Consequences*. *Reasoning devices* atau perangkat penalaran. Perangkat penalarann ini terdiri atas tiga perangkat, yaitu *roots*, *appeals to principle*, dan *consequences*. *Roots*, berisi analisis kausal atau sebab akibat. Kemudian *appeals to principle* yang berisi premis dasar dan juga klaim-klaim moral. Yang terakhir *consequences* yaitu efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai tersebut.

Salah satu contoh analisis *framing* yang menggunakan model William A. Gamson yaitu Analisis *framing* berita korupsi pada daring *Republika.co.id* dan daring *Tempo.co* yang dijabarkan dengan tabel berikut:

Judul Berita		<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati	Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Terdapat metafora yang mendukung bingkai yang tampak pada kutipan "...kecipratan..."	Ditemukan metafora yang mendukung bingkai yang dibangun dalam kutipan "...uang pelicin..." dalam	Dari kedua berita yang diambil dari dua daring yang berbeda tersebut, yakni <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> dapat dilihat keduanya

Aliran Dana KTP-El	Korupsi E-KTP		dalam kalimat “Lantas siapa saja nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el?” yang menggambarkan seperti ikut mendapat bagian uang dalam kasus korupsi ini. Ada pihak yang mendapat bagian dalam perkara ini.	kalimat “Irman dan Sugiharto, menyatakan uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR” yang menggambarkan seperti uang ataupun imbalan yang digunakan untuk melancarkan tindak korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan fungsi dari uang yang dapat melancarkan urusan dalam perkara ini.	memberikan metafora pada berita yang mereka tuliskan. Metafora dari keduanya sama-sama berhubungan dengan tindak korupsi yang tersangka lakukan. Namun dari keduanya mengambil sudut yang berbeda, yakni dari pihak yang mendapat bagian pada berita <i>Republika.co.id</i> . Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> mengambil pada sudut fungsi uang tersebut sebagai pelancar aksi korupsi. Pada <i>catchphrase</i>
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Dalam <i>catchphrase</i> “Puluhan pihak disebut...” membuktikan benar adanya nama-nama yang bahkan dalam jumlah puluhan yang menikmati dana KTP elektronik.	Untuk mendukung bingkai terdapat perangkat <i>framing catchphrase</i> yang tampak pada frase “...daftar nama penerima uang...” Dalam frase tersebut menggambarkan jumlah dari nama-nama tersangka yang lebih dari 15 orang hingga harus menggunakan daftar untuk mencatat nama-nama tersebut.	kedua berita ini sama-sama menonjolkan pada nama-nama yang menjadi tersangka. Pada <i>exemplaar</i> keduanya sama-sama menyinggung mengenai banyaknya pihak yang mendapat bagian atas kasus korupsi ini, namun berita <i>Republika.co.id</i> lebih menjelaskan lagi dengan jumlah uang yang dikorupsi, sedangkan <i>Tempo.co</i> lebih kepada penjelasan bukti otentik dari daftar tersangka tersebut. Pada <i>depiction</i> , keduanya mengambil diksi masing-masing seperti <i>Republika.co.id</i> lebih jelas memaparkan kerugian negara dan menambahkan kata ‘rangkaian perbuatan’ dan ‘secara bersama-sama’, sedangkan <i>Tempo.co</i>
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	<i>Exemplaar</i> yang membenarkan perspektif tampak pada kalimat “Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengaduan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun.” Menggambarkan bahwa puluhan nama tersebut mendapat cipratan dana dengan jumlah yang fantastis yaitu	<i>Exemplaar</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek KTP elektronik atau <i>e-KTP</i> yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, memuat sederet nama berikut uang yang diterimanya.” Benar adanya bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar yang	menggunakan ‘uang pelicin’ dan ‘ditebar’. Keduanya sama-sama memacu pada sebuah perspektif tentang

			Rp 5,95 triliun.	diumumkan tersebut adalah orang-orang yang menikmati dana KTP elektronik	tersangka yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan dilakukan secara bersama-sama. Pada <i>visual image</i> , kedua daring ini sama-sama melampirkan gambar yang relevan, <i>Republika.co.id</i> lebih kepada wujud dari KTP elektronik tersebut, sedangkan pada <i>Tempo.co</i> lebih kepada berkas-berkas bukti dari kasus korupsi KTP elektronik. Dalam perangkat penalaran <i>roots</i> , keduanya sama-sama menyinggung keterkaitan nama-nama tersangka yang baru ditetapkan dengan terdakwa yang sebelumnya sudah diungkap. Pada klaim moral, keduanya juga menuliskan hal yang sama, yaitu perbuatan dari para tersangka bukan hanya menguntungkan diri sendiri, namun juga untuk korporasi mereka. Pada perangkat penalaran efek, keduanya sama-sama memberi efek kepada KPK untuk segera mengusut dan menindaklanjuti data-data yang telah didapat dari Jaksa.
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> dalam artikel ini menggambarkan bahwa perbuatan dari para pelaku sangat tidak berbudi dan merugikan masyarakat satu negara. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kerugian yang ditanggung negara pun tidak tanggung-tanggung mencapai angka diatas Rp 2 triliun. Hal tersebut tampak pada kalimat "...rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,314 triliun."	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat "...uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR." Sangat membuat geram masyarakat bahwa proyek sebesar itu hanya dijadikan objek korupsi para koruptor. Berbagai cara dilakukan agar proyek ini berjalan dengan mulus. Salah satunya dengan memberi uang pelicin.	
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Relevan yakni gambar tumpukan KTP elektronik yang menjadi proyek sasaran para koruptor.	 Relevan, gambar yang dilampirkan berupa tumpukan berkas yang berkaitan dengan kasus korupsi dana KTP elektronik.	
		<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	<i>Roots</i> tampak pada kalimat "...nama-nama yang disebut keciprat aliran dana	<i>Roots</i> atau sebab akibat yang mendukung bingkai yang dibangun	

			<p>KTP-el...”seperti ungkapan ‘tidak ada asap jika tidak ada api’bahwa nama-nama pelaku merupakan hasil pengusutan dari tersangka yang telah tertangkap sebelumnya. Hingga sederet nama tersebut terungkap.</p>	<p>tampak pada kalimat “Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik karena mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.” Perbuatan melawan hukum membuat terdakwa terjerat hukuman pidana. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga menyeret nama-nama dalam daftar yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum.</p>	
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	<p>Klaim moral yang mendukung bingkai terlihat pada kalimat “Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi.”tindak korupsi memang seharusnya tidak dijadikan kasus yang remeh. Selain sangat merugikan negara, dapat membuat para tersangka tidak jera karena banyak pihak yang ‘diuntungkan’demi kepentingan pribadi dan kelompok.</p>	<p>Klaim moral yang mencolok tampak pada kalimat “selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi.” Tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan pribadi, korupsi KTP elektronik dalam angka yang besar pasti dimanfaatkan oleh korporasi agar mendapat cipratan dana tersebut. Seperti sudah tidak memiliki rasa malu dan berdosa.</p>	
		<i>Consequences</i> (efek)	<p>Kepada KPK agar segera menindaklanjuti dari data yang telah dikantongi agar masyarakat merasa lebih lega akan hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi yang</p>	<p>Kepada KPK dan aparat penegak hukum segera mengusut setuntasnya dan memberi hukuman setimpal bagi pada pelaku tindak korupsi berjamaah ini.</p>	

			merugikan masyarakat.		
--	--	--	--------------------------	--	--

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Objek penelitian ini diperoleh dari daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*. Data diperoleh melalui tahap analisis berupa 16 artikel berita kasus korupsi pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.

Kesepuluh artikel berita kasus korupsi daring *Republika.co.id* yang dipilih oleh peneliti adalah: 1. “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El”; 2. “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK”; 3. “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes”; 4. “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah”; 5. “TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101”; 6. “Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong”; 7. “Pengacara Gubernur Papua Minta Penyidik Perlihatkan Bukti”; 8. “KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka”.

Sementara itu, artikel berita kasus terorisme daring *Tempo.co* adalah: 1. “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP”; 2. “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK”; 3. “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”; 4. “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”; 5. “Puspom TNI Cari Inisiator Utama Kasus Korupsi Heli AW 101”; 6. “Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili”; 7. “Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua”; 8. “Lebih Besar dari E-KTP, Korupsi Konawe Utara Rugikan Negara 2,7 T”.

Keenambelas artikel berita tersebut akan dianalisis menggunakan analisis *Framing* Willan A. Gamson yang terdiri atas dua struktur, yaitu *Framming Devices* (Perangkat *Framing*) dan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran). *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) terbagi menjadi lima bagian, yaitu *Methapors*, *Catchphrases*, *Exemplaar*, *Depiction*, dan *Visual Images*. Sedangkan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Roots*, *Appeals to Principle*, dan *Consequences*.

Kedelapan artikel berita daring *Republika.co.id* terdiri atas 47 paragraf dan 136 kalimat. Masing-masing jumlah pada artikel berita pertama yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El”, yakni sebanyak 5 paragraf dan 44 kalimat. Artikel berita kedua yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” yakni sebanyak 5 paragraf dan 14 kalimat. Artikel berita ketiga berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” dengan rincian sebanyak 5 paragraf dan 8 kalimat. Artikel berita keempat yang berjudul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah”, yakni sebanyak 7 paragraf dan 13 kalimat. Artikel berita kelima berjudul “TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101”, yakni sebanyak 7 paragraf dan 9 kalimat. Artikel berita keenam yang berjudul “Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong”, yakni sebanyak 5 paragraf dan 9 kalimat. Artikel berita ketujuh yang berjudul “Pengacara Gubernur Papua Minta Penyidik Perlihatkan Bukti”, yakni sebanyak 7 paragraf dan 16 kalimat. Artikel berita terakhir dengan judul “KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka”, yakni sebanyak 6 paragraf dan 13 kalimat.

Sementara itu, kedelapan artikel berita daring *Tempo.co* terdiri atas 81 paragraf dan 217 kalimat. Masing-masing jumlah pada artikel berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP”, yakni sebanyak 6 paragraf dan 46 kalimat. Artikel berita kedua yang berjudul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK”, yakni sebanyak 3 paragraf dan 6 kalimat. Artikel berita ketiga yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”, yakni sebanyak 11 paragraf dan 25 kalimat. Artikel berita keempat yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”, yakni sebanyak 10 paragraf dan 26 kalimat. Artikel berita kelima yang berjudul “Puspom TNI Cari Inisiator Utama Kasus Korupsi Heli AW 101”, yakni sebanyak 9 paragraf dan 13 kalimat. Artikel berita keenam yang berjudul “Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili”, yakni sebanyak 8 paragraf dan 15 kalimat. Artikel berita ketujuh yang berjudul “Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua”, yakni sebanyak 7 paragraf dan 16 kalimat. Artikel berita terakhir yang berjudul “Lebih Besar dari E-KTP, Korupsi Konawe Utara Rugikan Negara 2,7 T”, yakni sebanyak 8 paragraf dan 14 kalimat.

Dalam penelitian ini, data disajikan melalui tabel. Tabel yang dipakai akan memuat struktur *Framing Devices* (Perangkat *Framing*) yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu *Methapors*, *Catchphrases*, *Exemplaar*, *Depiction*, dan *Visual Images*. Sedangkan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Roots*, *Appeals to Principle*, dan *Consequences*.

Berikut ini deskripsi data disajikan dalam tabel rekapitulasi data.

Tabel 4.1 tabel rekapitulasi data

Media daring	<i>Framing Devices</i>					<i>Reasoning Devies</i>			Jumlah
	M	C	E	D	VI	R	AtP	C	
<i>Republika.co.id</i>	1	8	8	8	8	7	7	8	55
<i>Tempo.co</i>	2	8	8	8	8	6	6	8	54
Jumlah	3	16	16	16	16	13	13	16	

Keterangan:

M: *Methapors*

C: *Cathphrases*

E: *Exemplaar*

D: *Depiction*

VI: *Visual Images*

R: *Roots*

AtP: *Appeals to Principles*

C: *Consequenses*

4.2 Analisis Data

Berikut merupakan penjabaran dari perangkat *framing* dan penalaran *framing* yang digunakan pada artikel berita yang menjadi objek penelitian.

4.2.1 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 1

Artikel berita pertama yang dijadikan objek penelitian ini berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” pada daring *Republika.co.id* dan “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP” pada daring *Tempo.co*. Kedua artikel ini diberitakan pada tanggal 2 Juni 2017. Berikut adalah analisis artikel beritanya:

- *Republika.co.id* 1

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Artikel pertama yang dijadikan objek penelitian berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El”. Perangkat *framing* pertama yang mendukung bingkai yang dibangun adalah metafora. Terdapat metafora yang mendukung bingkai yang tampak pada kutipan “...kecipratan...” dalam kalimat “Lantas siapa saja nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el?” yang menggambarkan seperti ikut mendapat bagian uang dalam kasus korupsi ini. Perangkatnya selanjutnya yaitu *catchphrase* yang tampak pada kalimat:

“Puluhan pihak disebut...”

Dalam *catchphrase* tersebut membuktikan bahwa benar adanya nama-nama yang menikmati dana KTP elektronik. Nama-nama terduga tersebut bahkan mencapai puluhan jumlahnya. Perangkat *exemplar* yang memperjelas untuk mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengaduan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun.”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa puluhan nama tersebut benar merupakan nama-nama terduga yang mendapat cipratan dana dari korupsi KTP elektronik. Jumlah dana yang masuk ke rekening mereka jumlahnya fantastis yaitu Rp 5,95 triliun. Perangkat *depiction* yang menggambarkan fakta bahwa perbuatan dari para pelaku sangat tidak berbudi dan merugikan masyarakat satu negara.

Apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kerugian yang ditanggung negara pun tidak tanggung-tanggung mencapai angka diatas Rp 2 triliun. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,314 triliun.”

Relevan yakni gambar tumpukan KTP elektronik yang menjadi proyek sasaran para koruptor. Berikut merupakan gambar yang dilampirkan:



B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Selain perangkat *framing*, artikel ini juga memakai perangkat penalaran dalam membangun bingkai. Perangkat penalaran pertama yaitu *roots*. *Roots* yang menggambarkan sebab-akibat tampak pada kalimat:

“nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el”

Seperti ungkapan ‘tidak ada asap jika tidak ada api’ bahwa nama-nama pelaku merupakan hasil pengusutan dari tersangka yang telah tertangkap sebelumnya. Hingga sederet nama tersebut terungkap. Perangkat selanjutnya yaitu klaim moral yang mendukung bingkai terlihat pada kalimat:

“Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi.”

Tindak korupsi memang seharusnya tidak dijadikan kasus yang remeh. Selain sangat merugikan negara, dapat membuat para tersangka tidak jera karena banyak pihak yang ‘diuntungkan’ demi kepentingan pribadi dan kelompok. Perangkat terakhir yaitu *consequences* atau efek yang ditimbulkan dari bingkai yang dibangun. Efek yang timbul dari framing berita yang dibangun yaitu kepada KPK agar segera menindaklanjuti dari data yang telah dikantongi agar masyarakat merasa lebih lega akan hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi yang merugikan masyarakat.

- *Tempo.co* 1

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Sama seperti *Republika.co.id*, berita pada daring *Tempo.co* juga memakai perangkat *framing* dan perangkat penalaran untuk mendukung bingkai yang dibangun. Dalam artikel yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP” ditemukan metafora yang mendukung bingkai yang dibangun dalam kutipan “....uang pelicin...” dalam kalimat “Irman dan Sugiharto, menyatakan uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR” yang menggambarkan seperti uang ataupun imbalan yang

digunakan untuk melancarkan tindak korupsi tersebut. Untuk mendukung bingkai terdapat perangkat *framing catchphrase* yang tampak pada kalimat:

“...daftar nama penerima uang...”

Dalam frase tersebut tergambar jumlah dari nama-nama tersangka yang lebih dari 15 orang hingga harus menggunakan daftar untuk mencatat nama-nama tersebut. Perangkat selanjutnya adalah *exemplaar* yang membenarkan perspektif untuk mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek KTP elektronik atau *e-KTP* yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, memuat sederet nama berikut uang yang diterimanya.”

Benar adanya bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar yang diumumkan tersebut adalah orang-orang yang menikmati dana KTP elektronik. Nama yang diumumkan cukup banyak sehingga perlu dijabarkan dalam bentuk daftar dan rincian uang yang dinikmati tersangka.

Depiction yang mendukung bingkai menggambarkan hal yang dilakukan tersangka-tersebut sangat membuat geram masyarakat bahwa proyek sebesar itu hanya dijadikan objek korupsi para koruptor. Berbagai cara dilakukan agar proyek ini berjalan dengan mulus. Salah satunya dengan memberi uang pelicin. Hal tersebut tampak pada kalimat

“...uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR.”

Gambar yang dilampirkan dalam berita tersebut sudah relevan, gambar yang dilampirkan berupa foto tumpukan berkas yang berkaitan dengan kasus korupsi dana KTP elektronik.



B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Artikel berita pada daring *Tempo.co* ini juga memakai perangkat penalaran untuk mendukung bingkai. Perangkat yang pertama yaitu *roots* atau sebab-akibat. *Roots* yang menandai peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain yang mendukung *framing* tampak pada kalimat:

“Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik karena mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.”

Perbuatan melawan hukum membuat terdakwa terjerat hukuman pidana. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga menyeret nama-nama dalam daftar yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum. Klaim moral yang mencolok tampak pada kalimat:

“...selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi.”

Dalam kalimat tersebut tergambar bahwa perbuatan tersangka tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan pribadi, korupsi KTP elektronik dalam

angka yang besar pasti dimanfaatkan oleh korporasi agar mendapat cipratan dana tersebut. Seperti sudah tidak memiliki rasa malu dan berdosa. Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun adalah kepada KPK dan aparat penegak hukum segera mengusut setuntasnya dan memberi hukuman setimpal pada pelaku tindak korupsi berjamaah ini.

➤ Analisis

Dari kedua berita yang diambil dari dua daring yang berbeda tersebut, yakni *Republika.co.id* dan *Tempo.co* dapat dilihat keduanya memberikan metafora pada berita yang mereka tuliskan. Metafora dari keduanya sama-sama berhubungan dengan tindak korupsi yang tersangka lakukan. Pada *catchphrase* kedua berita ini sama-sama menonjolkan pada nama-nama yang menjadi tersangka. Pada *exemplaar* keduanya sama-sama menyinggung mengenai banyaknya pihak yang mendapat bagian atas kasus korupsi ini, namun berita *Republika.co.id* lebih menjelaskan lagi dengan jumlah uang yang dikorupsi, sedangkan *Tempo.co* lebih kepada penjelasan bukti otentik dari daftar tersangka tersebut. Pada *depiction*, keduanya mengambil diksi masing-masing seperti *Republika.co.id* lebih jelas memaparkan kerugian negara dan menambahkan kata ‘rangkaiian perbuatan’ dan ‘secara bersama-sama’, sedangkan *Tempo.co* menggunakan ‘uang pelicin’ dan ‘ditebar’. Keduanya sama-sama memacu pada sebuah perspektif tentang tersangka yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan dilakukan secara bersama-sama. Pada *visual image*, kedua daring ini sama-

sama melampirkan gambar yang relevan, *Republika.co.id* lebih kepada wujud dari KTP elektronik tersebut, sedangkan pada *Tempo.co* lebih kepada berkas-berkas bukti dari kasus korupsi KTP elektronik. Dalam perangkat penalaran *roots*, keduanya sama-sama menyinggung keterkaitan nama-nama tersangka yang baru ditetapkan dengan terdakwa yang sebelumnya sudah diungkap. Pada klaim moral, keduanya juga menuliskan hal yang sama, yaitu perbuatan dari para tersangka bukan hanya menguntungkan diri sendiri, namun juga untuk korporasi mereka. Pada perangkat penalaran efek, keduanya sama-sama memberi efek kepada KPK untuk segera mengusut dan menindaklanjuti data-data yang telah didapat dari Jaksa.

4.2.2 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 2

Berita kedua yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini dari daring *Republika.co.id* yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” dan dari daring *Tempo.co* dengan judul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK”. Kedua artikel tersebut diberitakan pada tanggal 26 Mei 2017

- *Republika .co.id* 2

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Dalam berita yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” tidak ditemukan perangkat *framing* metafora. Perangkat selanjutnya adalah

catchphrase. *Catchphrase* dalam berita ini menggambarkan bahwa benar adanya fakta bahwa BPK membenarkan kabar mengenai anggotanya yang tertangkap KPK. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“...membenarkan kabar...”

Exemplaar yang membenarkan perspektif untuk mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membenarkan kabar adanya staf audit instansi tersebut yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5) sore.”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa benar adanya penangkapan terhadap anggota BPK. Pembeneran tersebut bahkan diungkapkan oleh BPK sendiri. Dalam *depiction* menjelaskan fakta bahwa tersangka benar-benar terlibat korupsi karena masih ikut andil dalam audit Kementerian Desa. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“...keduanya terlibat dalam audit Kementerian Desa.”



Foto yang dilampirkan kurang relevan, justru foto gedung BPK yang bertuliskan BPK dengan efek hitam putih.

B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Selain menggunakan perangkat *framing*, berita ini juga menggunakan perangkat penalaran untuk mendukung bingkai yang dibangun. Dalam berita ini tidak ditemukan *roots* taua sebab-akibat. Selanjutnya adalah klaim moral tampak menggambarkan bahwa sikap BPK yang memberi dukungan penuh pada KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret anggota BPK ini. Hal tersebut tampak dalam kalimat:

“Ia justru meminta KPK mengusut tuntas temuan ini.”

Efek yang ditimbulkan dari bingkai yang dibangun adalah kepada BPK selalu siap untuk membawa anggotanya yang melakukan tindakan korupsi, hal tersebut tampak pada kalimat:

“BPK siap membawa stafnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke sidang etik dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.”

- *Tempo.co* 2

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Dalam berita yang berjudul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK” tidak ditemukan metafora untuk mendukung bingkai yang dibangun. Perangkat kedua yaitu *Catchphrase* yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kutipan kalimat:

“...menangkap auditor utama...”

Dalam kutipan kalimat tersebut menjelaskan bahwa benar adanya penangkapan yang dilakukan KPK terhadap petinggi BPK tepatnya bagian auditor utama BPK. *Exemplaar* yang memperjelas bingkai tampak pada kalimat:

“Penangkapan diduga terkait dengan audit di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras.”

Kalimat tersebut menjelaskan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap petinggi auditor BPK ini terkait dengan audit di Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. *Depiction* yang mendukung bingkai tampak pada kalimat:

“...pejabat Kementerrian Desa diduga ikut dicokok.”

Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa dalam penangkapan tersebut juga mehyeret pejabat di Kementerian Desa. Mereka tertangkap basah juga terkait dengan kasus korupsi ini. Gambar yang dilampirkan dalam berita ini sudah relevan, tampak gambar dua tangan yang sedang melakukan transaksi uang yang mengisyaratkan itu adalah tindak korupsi.



B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Dalam perangkat penalaran terdapat tiga bagian yaitu sebab-akibat, klaim moral, dan efek. Dalam artikel berita ini tidak ditemukan perangkat penalaran *roots* atau sebab-akibat dan perangkat penalaran klaim moral. Perangkat terakhir adalah efek. Efek yang didapat dari bingkai yang dibangun adalah kepada KPK agar segera memberikan keterangan resmi perihal penangkapan tersangka ini. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun BPK ihwal kronologi penangkapan tersebut.”

➤ Analisis

Kedua berita dari daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* tersebut sama-sama tidak menambahkan metafora dalam berita. Pada perangkat *framing catchphrase*, *Republika.co.id* mengambil perspektif dari sisi adanya orang yang membenarkan kabar, sedangkan pada *Tempo.co* lebih kepada fakta bahwa ada anggota BPK yang ditangkap KPK. Pada perangkat *framing exemplar*, *Republika.co.id* menulis tentang pembenaran kabar oleh BPK dan anggota dibagian mana yang ditangkap. Sedangkan *Tempo.co* lebih menjelaskan kepada hal yang terkait dengan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap anggota BPK. Pada *depiction*, *Republika.co.id* mengambil pada sudut keterlibatan tersangka dalam audit Kementerian Desa sehingga mereka terseret dalam kasus ini. Sedangkan *Tempo.co*, lebih menjelaskan kepada keterkaitan oknum pejabat Kementerian Desa dengan para tersangka. Kedua berita tersebut sama-sama

melampirkan gambar, namun pada *Republika.co.id* gambar yang dilampirkan kurang relevan sehingga kurang mendukung bingkai yang dibangun. Sedangkan pada *Tempo.co* gambar yang dilampirkan sudah relevan dan secara tersirat menggambarkan tindak korupsi. Dalam perangkat penalaran *roots* keduanya sama-sama tidak memberikan perangkat *roots* dalam berita yang disajikan. Begitupun dengan perangkat klaim moral, pada *Tempo.co* tidak menambahkan klaim moral dalam berita yang disajikan. Sedangkan pada *Republika.co.id* menambahkan klaim moral tentang BPK yang memberi dukungan terhadap tugas yang dilaksanakan KPK apalagi dalam kasus yang menyeret nama anggota BPK ini. Dalam perangkat efek, keduanya menonjolkan pada sudut yang berbeda, pada *Republika.co.id* efek untuk BPK sedangkan pada *Tempo.co* efek untuk KPK.

4.2.3 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 3

Artikel berita yang berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” pada daring *Republika.co.id* dan “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais” pada daring *Tempo.co* merupakan artikel berita ketiga yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Kedua artikel ini diberitakan pada tanggal 2 Juni 2017. Berikut adalah analisis artikel beritanya:

- *Republika .co.id* 3

C. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Pembingkai (*Framing Devices*) dalam artikel berita berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” pada daring *Republika.co.id* dibagi menjadi pola yang mendukung bingkai dari *Republika.co.id* terhadap kasus korupsi. Dalam artikel berita tersebut tidak ditemukan metafora. Perangkat lain yang mendukung bingkai yaitu catchphrases. Perangkat *catchphrase* pada berita ini tampak pada

“tidak akan langsung memanggil dan memeriksa”

Dalam kalimat tersebut tergambar bahwa KPK masih akan mempelajari dugaan dan belum mengambil tindakan yang serius. KPK tentu mempertimbangkan berbagai hal untuk melakukan tindakan seperti memanggil terduga dan memeriksanya.

Untuk memperjelas bingkai maka terdapat perangkat *exemplar* yang digunakan untuk membenarkan perspektif. *Exemplar* terlihat pada kalimat:

“jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.”

Dalam kalimat tersebut terlihat alasan mengapa dugaan tersebut perlu dipelajari lebih mendalam lagi karena adanya fakta yang dikemukakan jaksa bahwa Amien Rais adalah salah satu orang yang mendapat aliran dana.

Dalam *depiction*, timbul bukti yang menguatkan bahwa Amien Rais menerima uang Alkes tersebut. Bahkan dijelaskan bahwa uang tersebut masuk ke rekening Amien Rais dalam 6 tahap dengan jumlah nominal yang cukup banyak yakni 600 juta rupiah. Hal tersebut tampak pada kalimat berikut:

“Penuntut umum menyebut Amien menerima uang sebanyak enam kali tahapan dengan total Rp 600 juta.”

Foto yang mendukung bingkai dalam berita ini sudah relevan yakni foto Amien yang sedang diwawancari di kediamannya mengenai kasus ini.

D. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Sebagai penalaran, *Republika.co.id* menggunakan strategi wacana agar *frame* yang diangkatnya seolah-olah benar dengan pandangan tertentu. Penalaran yang pertama yaitu *roots*, dapat dilihat dalam kalimat:

“Pada sidang tuntutan kasus pengadaan alkes dengan terdakwa Siti pada Rabu (31/5) kemarin, jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.”

Dalam kalimat tersebut tampak adanya kaitan antara kasus sebelumnya yang telah disidangkan dengan mengapa Amien Rais ikut terseret dalam kasus ini. Dalam kasus korupsi seperti ini, bila salah satu sudah tertangkap maka akan terungkap tersengka-tersangka berikutnya yang masuk dalam satu kasus tersebut. Apalagi kasus ini merupakan kasus yang berkaitan dengan kesehatan, utamanya masyarakat.

Penalaran selanjutnya adalah *appeals to principle* atau klaim moral yang menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan sebuah kasus korupsi, KPK harus memiliki bukti yang kuat. Apalagi kasus ini baru mulai dibuka saat disebutkan oleh jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Siti. Hal ini terlihat dalam kalimat:

“JuruBicara KPK Febri mengatakan bakal mempelajari terlebih dulu seluruh fakta yang terungkap di persidangan.”

Consequences adalah efek yang didapat dari bingkai yang dibangun pada sebuah berita. Efek yang tampak dari bingkai berita ini kepada masyarakat bahwa dalam mengungkap kebenaran sebuah kasus kita juga harus mendengarkan keterangan yang akan terdakwa berikan, karena hal tersebut bisa saja memengaruhi langkah yang akan KPK ambil selanjutnya. Apakah keterangan terdakwa benar adanya atau hanya alibi. Hal tersebut tergambar dalam kalimat

"kita perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan,"

- *Tempo.co* 3

A. Framing Devices (Perangkat Framing)

Dalam topik yang sama, *Tempo.co* memberikan judul pada beritanya “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”. Perangkat *framing* pertama yang mendukung bingkai ialah *metaphore*. Dalam artikel ini ditemukan sebuah metafora yang mendukung bingkai yang dibangun

dalam kutipan”...dialirkan...” dalam kalimat “Iskandar Marwanto, mengatakan dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlani” yang menggambarkan seperti mengirimkan uang atau memberi dana secara tidak langsung sebagai penunjang maksud yang tersembunyi. Perangkat selanjutnyayang mendukung bingkai ialah *catchphrase*. *Catchphrase* pada berita ini tampak pada:

“menindaklanjuti dugaan”

Pada frase tersebut tampak bahwa KPK cukup serius menanggapi dugaan yang muncul dalam persidangan mengenai korupsi Alkes. Untuk memperjelas bingkai agar mendukung perspektif, dalam artikel ini juga menggunakan *exemplar* yang tampak pada kalimat:

“Dugaan adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu lalu”

Dalam kalimat tersebut tampak menggambarkan terungkapnya dugaan Amien Rais sebagai salah satu pihak yang menerima uang Alkes tersebut. Tanggapan dari KPK pun sigap dengan langsung menindaklanjuti dugaan yang dikemukakan jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Siti tersebut. Perangkat bingkai selanjutnya yaitu *depiction*. *Depiction* mendukung perspektif agar pembaca terarah pada satu asumsi yang dibangun oleh bingkai. *Depiction* dalam artikel ini tampak pada kalimat:

“Berkas tuntutan jaksa mencatat dana disetor ke rekening Amien sebanyak enam kali, mulai 15 Januari 2007 hingga 2 November 2007. Masing-masing transaksi senilai Rp 100 juta.”

Tampak jelas dalam kalimat tersebut bahwa fakta yang menunjukkan bahwa adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan Amien Rais cukup rinci. Hal ini tentu yang membuat KPK harus jeli dan tidak membuang waktu untuk menangani kasus ini.

Foto yang ditampilkan untuk mendukung berita ini kurang relevan, karena foto tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang diberitakan. Memang benar foto tersebut merupakan foto dari Amien Rais, namun dalam kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini.



B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Daring *Tempo.co* juga menggunakan strategi wacana untuk mendukung bingkai yang dibangun. Perangkat penalaran yang pertama yaitu *roots*, dapat dilihat dari kalimat:

“dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlaini, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). "Selanjutnya, Nuki Syahrin, selaku Ketua Yayasan SBF, memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa”

Dari kalimat tersebut menunjukkan kronologi bagaimana Amien Rais terseret dalam kasus ini. Tentunya hal tersebut juga memperkuat fakta bahwa saat ini modus dari tindak korupsi sudah bervariasi. Salah satunya dengan memindahbukukan dana.

Appealsto principals atau klaim moral yang mencolok dalam artikel ini adalah niat baik yang ditunjukkan Amien Rais kepada KPK maupun media bahwa dirinya akan datang ke KPK dan memberikan sejumlah data dalam kasus korupsi besar. pada kalimat berikut:

“Amien justru berencana datang ke KPK, Senin mendatang, untuk memberikan sejumlah data kasus korupsi besar yang melibatkan dua tokoh nasional dan kini belum ditangani.”

Consequences atau efek yang timbul dari bingkai berita yang dibangun adalah kepada KPK agar lebih jeli dan tidak tertipu oleh berbagai modus dalam tindak korupsi. Karena niat baik belum tentu sepenuhnya baik, bisa ada kemungkinan bahwa hal tersebut alibi untuk meringankan tuduhan.

➤ Analisis

Pertama yaitu perangkat *framing*. Dalam perangkat metafora, *Republika.co.id* tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Sedangkan *Tempo.co* menambahkan metafora yaitu kata “dialirkan”. Perangkat kedua yaitu *catchphrase*. Perbedaan yang mencolok dari kedua berita tersebut yaitu pada keseriusan KPK dalam menanggapi kasus ini. Pada *Republika.co.id* masih dalam tahap mempelajari kembali, sedangkan pada *Tempo.co* sudah menandakan keseriusan dari KPK menangani kasus ini. Pada perangkat *exemplar*, *Republika.co.id* memberi alasan mengapa KPK harus mempelajari kembali dugaan kasus ini. Sedangkan ada *Tempo.co* menjelaskan kapan terungkapnya dugaan ini sehingga KPK sigap menanggapi. Dalam perangkat *depiction*, keduanya sama-sama memberi penjelasan tentang fakta adanya dana yang diterima Amien Rais, namun *Tempo.co* lebih detail dalam penjabarannya. Pada *visual images* keduanya sama-sama melamirkan gambar sosok Amien Rais, namun dengan latar tempat dan tujuan yang berbeda. Pada *Republika.co.id* relevan karena perihal tanggapa dari Amien Rais terhadap kasus yang membawa namanya. Sedangkan pada *Tempo.co* merupakan foto Amien Rais dalam hal kunjungan. Selanjutnya yaitu perangkat penalaran. Perangkat penalaran pertama yaitu *roots*. Dalam *roots*, *Republika.co.id* mengungkapkan keterkaitan Amien Rais dengan tersangka Siti Fadilah, sedangkan *Tempo.co* mengungkapkan kronologi yang membuat nama Amien Rais ikut masuk dalam kasus ini. Dalam klaim moral, keduanya menuliskan hal yang berbeda, pada *Republika.co.id* menjelaskan bahwa KPK tidak semata-mata memutuskan seseorang sebagai tersangka, tentu harus memiliki banyak bukti fakta. Sedangkan pada *Tempo.co*

menjelaskan tanggapan Amien Rais atas tuduhan kepadanya tersebut. Untuk perangkat penalaran efek, keduanya sangat berbeda. *Republika.co.id* memberi efek kepada masyarakat agar tidak mudah pendapat buruk jika kebenaran penetapan terduga jika belum ada keputusan dari pihak berwenang. Sedangkan pada *Tempo.co* efek diberikan kepada KPK untuk lebih jeli dan tidak lengan dengan berbagai modus tersangka.

4.2.4 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 4

Berita keempat yang dijadikan objek penelitian ini berjudul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” dari daring *Republika.co.id* dan berjudul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara” dari daring *Tempo.co*. Kedua artikel tersebut diberitakan pada 16 Juni 2017. Berikut adalah analisisnya:

- *Republika.co.id* 4

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Dalam berita keempat yang berjudul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” ini tidak ditemukan metafora. Perangkat *framing* kedua yakni *catchphrase*. *Catchphrase* yang mendukung bingkai menggambarkan benar adanya bahwa kasus korupsi Alkes ini sudah menemui babak akhir dengan dijatuhkannya vonis untuk Siti Fadilah. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Majelis Hakim memvonis...”

Pembenaran perspektif yang mendukung bingkai yang dibangun atau yang disebut *exempla* menggambarkan benar adanya bahwa Siti Fadilah telah divonis atas kasus yang menyeretnya yaitu korupsi Alkes. Siti Supari terbukti bersalah atas korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut meskipun sampai kini Siti belum mengakuinya. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Majelis Hakim memvonis empat tahun penjara terdakwa pengadaan alat kesehatan Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari.”

Perangkatnya selanjutnya menggambarkan fakta untuk mendukung bingkai yang dibangun atau disebut *depiction* tampak pada kalimat:

“...ia mengaku kecewa karena menurutnya fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.”

Dalam kalimat tersebut tampak kekecewaan dari Siti akan fakta di persidangan yang tidak dipakai. Meskipun semikian, Siti sudah terbukti bersalah dan seharusnya tidak mengelak lagi. Foto yang dilampirkan sudah relevan, yaitu foto saat Siti Fadilah tengah menjalani persidangan.



B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Perangkat penalaran pertama yaitu *roots*. *Roots* atau peristiwa yang menandai peristiwa yang lain tampak pada kalimat:

“Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima gratifikasi.”

Dalam kalimat tersebut menggambarkan kejahatan yang dilakukan Siti Fadilah tidak hanya sebelumnya korupsi dari dana pengadaan alat kesehatan, tetapi juga menerima gratifikasi. Seakan belum menemui jera sebelum diberi hukuman. Perangkat penalaran selanjutnya yaitu klaim moral. Klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat:

“Ia menyebut apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negara tetapi fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.”

Dari perkataan Siti tersebut menggambarkan sikap mengelak dan belum tunduk dengan hukum. Seharusnya bila memang sudah tunduk terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya, tidak ada sikap mengkritik ataupun tidak merasa bersalah seperti perkataan Siti Fadilah tersebut. Efek yang didapat dari bingkai yang dibangun adalah efek bagi terdakwa agar lebih menghormati keputusan hakim dan tidak membuat opini yang berlebihan kepada publik.

- *Tempo.co* 4

A. Framing Devices (Perangkat Framing)

Dalam berita daring *Tempo.co* yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara” ini tidak ditemukan metafora. Perangkat kedua yaitu *Catchphrase* yang mendukung bingkai tampak pada kalimat:

“...menjatuhkan vonis...”

Dalam *catchphrase* tersebut memperlihatkan penanganan kasus ini serius, sehingga cepat terselesaikan dan mengakhirinya dengan memberikan hukuman terhadap Siti Fadilah. Perangkat *framing* selanjutnya yaitu *exemplaar* yang memperjelas perspektif dalam bingkai yang dibangun. *Exemplaar* tampak pada kalimat:

“Mejelis hakim meyakini Siti telah menerima duit senilai total Rp 1,9 miliar.”

Dalam *exemplaar* tersebut menjelaskan benar adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Siti Fadilah dengan objek pengadaan alat kesehatan. Kerugian yang diakibatkan cukup besar yaitu RP 1,9 miliar. *Depiction* tampak pada kalimat:

“...duit tersebut diyakini sebagai bagian dari suap pengadaan alat kesehatan karena perusahaan tersebut terlibat dalam pengadaan.”

Tindakan menghalalkan segala cara seperti menerima suap dari pengadaan alat kesehatan dijadikan alternatif bagi Siti Fadilah untuk memperoleh uang. Foto yang dilampirkan sudah relevan yaitu foto Siti Fadilah yang sedang menjalani persidangan.



B. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Perangkat penalaran pertama yang disebut dengan *roots*. *Roots* menandai peristiwa satu dengan peristiwa lain atau disebut dengan sebab-akibat. *Roots* tampak pada kalimat:

“Siti telah terbukti melakukan penunjukan langsung terhadap PT Indofarma untuk pengadaan alat kesehatan *buffer stock*.”

Vonis yang dijatuhkan kepada Siti Fadilah adalah akibat dari tindakannya yang secara langsung menunjuk PT yang menyokong pengadaan alat kesehatan. Hal tersebut berlanjut pada tindak korupsi yang dilakukannya. Klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat:

“Siti berkukuh tidak merasa bersalah dalam pengadaan alat kesehatan saat ia menjabat...”

Keputusan hakim seharusnya sudah menjadi pembelajaran bagi terdakwa. Sikap yang masih menyangkal seperti ini seakan tidak menghormati putusan dari hakim dan menggambarkan tidak ada rasa jera. Efek yang didapat yaitu kepada KPK agar lebih tegas terhadap terdakwa, karena tidak adanya rasa bersalah yang ditunjukkan oleh terdakwa.

➤ Analisis

Pertama yaitu perangkat *framing*. Dalam metafora, keduanya tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Perangkat *framing* kedua yaitu *catchphrase*. Keduanya sama-sama memperlihatkan vonis yang dijatuhkan oleh KPK adalah sebagai bentuk keseriusan KPK menangani kasus ini. Pada *exemplaar*, keduanya sama-sama membenarkan divonisnya Siti Supari ini perihal korupsi pengadaan Alkes. Namun *Tempo.co* lebih memberi penjabaran besarnya kerugian atas kasus Alkes ini. Pada perangkat *depiction*, keduanya juga menuliskan sudut yang berbeda. *Republika.co.id* menuliskan tanggapannya terhadap vonis untuknya. Sedangkan pada *Tempo.co* menjelaskan mengenai modus yang dilakukan Siti Supari hingga namanya ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya yaitu perangkat penalaran. Dalam *roots*, *Republika.co.id* lebih menekankan kepada indikasi yang timbul karena kasus sebelumnya yang juga menyeret nama Siti Supari. Sedangkan pada *Tempo.co* menjelaskan peristiwa yang menyebabkan Siti Supari terungkap menjadi tersangka dalam kasus korupsi Alkes. Berikutnya yaitu Klaim moral. Dalam klaim moral, keduanya menyerukan hal yang senada. Yaitu tanggapan dari Siti Supari yang kurang menghormati keputusan yang sudah dijatuhkan kepadanya. Pada perangkat penalaran efek, *Republika.co.id* lebih menekankan efek kepada tersangka agar menghormati keputusan hakim. Sedangkan pada *Tempo.co* efek diberikan untuk KPK agar lebih tegas terhadap terdakwa mengingat tanggapan terdakwa yang tidak menghormati keputusan hakim.

4.2.5 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 5

Berita kelima ini diambil dari daring *Republika.co.id* dengan judul “TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101” dan daring *Tempo.co* dengan judul “Puspom TNI Cari Inisiator Utama Kasus Korupsi Heli AW 101”. Kedua berita ini diunggah pada tanggal yang sama yakni 5 Agustus 2017. Berikut adalah hasil analisisnya:

- *Republika.co.id* 5

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Perangkat *framing* yang mendukung bingkai dari berita pada daring *Republika.co.id* dengan judul “TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101” terbagi menjadi beberapa bagian. Perangkat *framing* pertama yaitu *metaphor*. Dalam berita ini tidak ditemukan *metaphore*. Perangkat *framing* yang kedua yaitu *catchphrase* yang tampak pada:

“Seluruh aparaturnya pengawasan dan penegakkan hukum di lingkungan TNI berkomitmen”

Terlihat bahwa TNI serius menghadapi masalah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI ini. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Selain itu, mereka juga akan terbuka kepada khalayak dalam penanganan kasus ini.

Untuk menjelaskan bingkai agar membenarkan perspektif diperlukan *exemplaar*. *Exemplaar* dalam berita ini tampak pada kalimat:

“POM TNI hingga saat ini telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland AW-101.”

Dengan bukti tertangkapnya lima orang tersangka dalam kasus ini, membuat TNI lebih keras dalam menyelesaikan kasus ini karena telah mencemarkan nama baik TNI tentunya. Selain itu, lima orang tersangka tidak dapat dikatakan jumlah yang sedikit. Artinya jumlah tersebut tentu belum tuntas, hal ini menjadi PR untuk TNI untuk menelusuri tersangka-tersebut baru.

Depiction yang mendukung bingkai berita tampak pada kalimat:

“Dodik mengumumkan tersangka baru dalam kasus tersebut”

Di satu sisi kerja TNI dalam kasus ini sangat baik, namun di sisi lain tersangka dengan jumlah lima orang tersebut ternyata belum selesai. Ada tersangka baru yang diumumkan artinya nama baik TNI serasa tercoreng oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan jumlah yang bahkan lebih dari lima orang tersebut.

Foto atau *visual images* yang dilampirkan sudah relevan karena menunjukkan foto dari pesawat Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi.

B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Perangkat penalaran pertama yang mendukung bingkai yaitu *roots* atau sebab-akibat yang tampak pada kalimat:

“penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.”

Pada kalimat tersebut terlihat jelas bahwa adanya kaitan antara tersangka sebelumnya dengan tersangka baru. Penyelidikan lebih lanjut dengan tersangka lama, tentunya memudahkan POM TNI untuk mengungkap tersangka baru. Pengusutan kasus ini kan terus berkelanjutan seiring terungkapnya tersangka baru dari waktu ke waktu sampai tuntas.

Klaim moral atau *appels to principals* yang mendukung bingkai adalah usaha keras yang dilakukan POM TNI untuk menyelesaikan kasus ini patut diberi apresiasi. Mereka juga tidak ingin nama baik TNI semakin tercoreng oleh oknum yang belum tertangkap. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas”

Perangkat penalaran yang terakhir yaitu efek atau *consequences*. efek yang didapat dari bingkai yang dibangun adalah untuk masyarakat bahwa tidak perlu khawatir dan menyerahkan kepercayaan pada TNI untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Dan juga TNI yang berjanji untuk terbuka memberikan informasi mengenai perkembangan kasus.

- *Tempo.co* 5

A. Framing Devices (Perangkat Framing)

Perangkat pertama yang mendukung bingkai berita ini adalah metafora. Dalam berita yang disajikan *Tempo.co* ini tidak ditemukan metafora. Perangkat *framing* selanjutnya adalah *catchphrase* yang tampak pada:

“...terus menyidik...”

Frase tersebut menggambarkan keseriusan TNI dalam mengusut kasus ini. Dengan terus menyidik agar terungkap tersangka-tersebut dari kasus korupsi ini hingga tuntas.

Untuk menjelaskan bingkai agar membenarkan perspektif, terdapat perangkat *exemplar* yang tampak pada kalimat:

“Pada Jumat 4 Agustus 2017 kemarin, Puspom TNI telah menetapkan satu tersangka baru, yaitu Marsekal Muda SB”

Dalam kalimat tersebut perlu digarisbawahi bahwa adanya fakta penetapan tersangka baru yang tentunya menggambarkan bahwa tersangka kasus tersebut tidak dalam jumlah yang sedikit. Kasus ini memang harus menjadi perhatian bagi TNI dan terus didalami agar terungkap siapa pelaku utama dari kasus korupsi ini.

Depiction yang mendukung perspektif pada bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“Menurut Dodik, SB adalah bagian dari inisiator terlaksananya pengadaan enam unit helikopter yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 224 miliar.”

TNI sudah mulai menemukan titik terang mengungkap siapa pelaku utama dari kasus korupsi ini dengan keterangan yang didapat melalui tersangka lain yang merupakan bagian dari inisiator. Hal ini tentu bagus untuk dapat menuntaskan kasus ini sampai ke akarnya.

Gambar yang digunakan untuk mendukung bingkai sudah relevan yakni foto pesawat Agusta Westland (AW) 101 yang terparkir dan diberi garis polisi.

B. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Perangkat *roots* atau sebab-akibat yang mendukung penalaran dalam bingkai tersebut tampak pada kalimat:

“Puspom TNI menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga lain.”

Dengan adanya kasus yang menimpa TNI akibat ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab ini, TNI mngambil tindakan lebih serius yakni bekerja sama dengan sejumlah lembaga agar kasus ini secepatnya tuntas. Perlu adanya mengambil jalan lain juga seperti kerjasama dengan BPK untuk menambah fakta-fakta yang mendukung penelusuran terhadap inisiator utama.

Klaim moral yang mendukung bingkai yakni hasil dari usaha TNI untuk menuntaskan kasus ini dengan terlihatnya tersangka yang termasuk dalam bagian dari inisaitor utama. Hal ini tampak pada kalimat:

“Dodik menyatakan penyidiknya sudah mulai melihat 'bayang-bayang' dari inisiator utama dari kasus ini.”

Consequences yang ditimbulkan dari bingkai kepada khalayak umum bahwa pada faktanya TNI tidak asal dalam penetapan tersangka. Mereka juga harus mempunyai bukti yang kuat dan fakta yang mendukung secara sah untuk menetapkan tersangka. Hal ini tampak pada kalimat:

“kita tetap menempatkan tersangka lainnya secara sah,”

➤ Analisis

Perangkat pertama yaitu perangkat *framing*. yang pertama yaitu metafora, berita pada *Republika.co.id* dan *Tempo.co* tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Perangkat *framing* selanjutnya yaitu *catchphrase*. Kedua media ini mengungkapkan dari sisi yang berbeda. Pada *Republika.co.id* tampak jelas tentang komitmen dari TNI. Sedangkan pada *Tempo.co* lebih menonjolkan pada keseriusan TNI menangani kasus ini. Selanjutnya yaitu *exemplaar*, keduanya sama-sama menerangkan tentang perlunya perhatian lebih dari TNI untuk mendalami kasus ini agar cepat terselesaikan dan mengungkap tersangka utama kasus korupsi helikopter ini. Perangkat selanjutnya yakni *depiction*. yang menjadi perbedaan adalah bila di *Tempo.co* sudah ada tanda-tanda menemui titik terang mengungkap pelaku utama korupsi. Sedangkan pada *Republika.co.id* masih pada perlunya pengusutan karena belum ditemukannya tersangka utama. Selanjutnya yaitu *visual images*. Keduanya sama-sama melampirkan gambar helikopter yang menjadi pembahasan utama dalam korupsi ini. Kemudian perangkat penalaran, perangkat *roots* pada kedua media cukup berbeda. Dalam *Republika.co.id*

menerangkan pada keterkaitan antara tersangka baru yang ternyata masih satu kelompok dengan tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada *Tempo.co* menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan TNI tidak lain adalah cara lain untuk mendapatkan lebih banyak bukti dalam menetapkan tersangka. Perangkat selanjutnya yaitu klaim moral, dari kedua media ini sama-sama menunjukkan kerja keras dari TI untuk menuntaskan kasus korupsi helikopter tersebut. Namun dalam *Tempo.co* terdapat penjelasan bahwa usaha yang telah dilakukan TNI membuahkan hasil. Kemudian pada perangkat efek, efek yang didapat dari kedua media tersebut adalah untuk masyarakat agar tidak perlu khawatir dan mempercayai kerja keras TNI dan menuntaskan kasus korupsi helikopter ini.

4.2.6 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 6

Berita keenam yang diambil menjadi objek penelitian dari darin *Republika.co.id* berjudul “Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong” dan dari daring *Tempo.co* berjudul “Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili”. Kedua artikel tersebut diberitakan pada tanggal 7 Agustus 2017. Berikut adalah analisisnya:

- *Republika.co.id* 6

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Dalam artikel yang “Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong” tidak ditemukan metafora dalam berita yang disajikan. *Catchphrase* yang mendukung *framing* tampak dalam kalimat:

“...melimpahkan berkas...”

Dalam kalimat tersebut terlihat bahwa kasus tersebut sudah memasuki tahapan lebih lanjut. Artinya KPK benar-benar serius memproses kasus yang menjerat Andi Narogong. Pembeneran perpektif untuk mendukung bingkai yang dibangun atau yang disebut *exemplaar* tampak pada kalimat:

“Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus KTP-e. Andi adalah terdakwa ketiga yang kami ajukan ke persidangan.”

Dalam *exemplaar* tersebut menunjukkan titik terang yang mulai didapat KPK akan ditetapkannya hukuman bagi tersangka Andi Narogong. *Depiction* yang mendukung bingkai yang dibangun terlihat pada kalimat:

“...pengawasan publik juga sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan...”

Keseriusan KPK dalam menangani kasus ini harus didukung oleh publik juga karena kasusu ini menyangkut kerugian orang banyak. Gambar yang dilampirkan sudah relevan yaitu gambar juru bica KPK yang menyampaikan hal terkait kasus ini.



B. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Perangkat *roots* atau sebab-akibat yang tampak dalam kasus ini, babak sebelumnya sudah ditetapkan pada 23 Maret. Kemudian hal ini adalah keberlanjutan dari babak sebelumnya. Tampak pada kalimat berikut:

“Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 23 Maret lalu.”

Klaim moral yang ditunjukkan dalam artikel ini yang mendukung bingkai yang dibangun memperlihatkan tindakan semacam ini memang seharusnya diberi hukuman yang setimpal agar tersangka jera. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat:

“KPK menjerat Andi Narogong dengan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU N 31 Tahun 1999”

Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun untuk masyarakat agar memberi apresiasi pada KPK yang telah menangani kasus ini dengan profesional.

- *Tempo.co* 6

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Dalam artikel berjudul “Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili” dari daring *Tempo.co* tidak ditemukan metafora yang mendukung

framing yang dibangun. Perangkat kedua yaitu *catchphrase* yang mendukung *framing* tampak dalam kalimat:

“...bakal segera diadili...”

Kalimat tersebut menunjukkan kasus ini sudah hampir menemui titik terang dengan ditetapkannya hukuman terhadap tersangka. *Exemplaar* yang digunakan untuk membenaran perspektif menunjukkan peran dari Andi yang sangat penting dalam kasus korupsi yang sangat besar ini. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Andi adalah terdakwa ketiga yang diajukan ke persidangan. Andi diduga orang yang mengatur proyek *e-KTP*, mulai tahap pembahasan anggaran, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pengadaan.”

Dalam *depiction* berikut memperlihatkan indikasi kata yang tersirat oleh bingkai yang ingin mengungkapkan bahwa hubungan teman dekat tentu akan mempermudah rencana dalam tindak kejahatan korupsi. Hal tersebut terlihat dalam kalimat:

“Beberapa saksi mengatakan Andi adalah teman dekat Setya Novanto.”



Gambar yang dilampirkan sudah relevan yakni foto ketika Andi Narogong menjalani persidangan atas kasus *e-KTP* ini.

B. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Dalam artikel ini tidak ditemukan perangkat penalaran *roots* atau sebab-akibat. Perangkat selanjutnya, klaim moral yang mendukung bingkai adalah fakta bahwa tindakan korupsi sangatlah tercela dan merugikan orang banyak. Tidak hanya itu, memperkaya diri sendiri dengan carayang tidak halal tidak akan pernah berakhir baik dan bila terungkap akan ada hukuman yang sebanding. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.”

Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun adalah untuk masyarakat agar ikut mendukung dan memantau terhadap berjalannya penuntasan kasus ini. Karena kasus ini menyangkut kerugian orang satu negara. Sehingga kepercayaan dari masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut terlihat dalam kalimat:

“Pengawasan publik sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan.”

➤ Analisis

Pada berita keenam ini, perangkat *framing* pertama yaitu metafora, keduanya tidak menggunakan metafora dalam berita yang disajikan Kemudian pada *catchphrase*, *Republika.co.id* menyampaikan keseriusan pihak KPK dalam menangani kasus ini sehingga kasus ini sudah pada tahap pemberian berkas

kepada pihak pengadilan. Sedangkan pada *Tempo.co*, bahkan sudah sampai tahap tersangka yang akan segera diadili. Kemudian pada *exemplaar Republika.co.id* membahas tentang titik terang yang telah didapat KPK untuk mengadili tersangka. Sedangkan pada *Tempo.co*, lebih membahas tentang peran dari Andi Narogong. Perangkat selanjutnya yaitu *depiction*, perbedaan cukup terlihat karena *Republika.co.id* membahas mengenai perlunya pengawasan masyarakat sebagai dukungan terhadap kerja KPK. Sedangkan *Tempo.co* lebih menyinggung tentang keterkaitan hubungan erat antara Andi Narogong dengan Setya Novanto mempermudah kelancaran tindak korupsi. Perangkat *framing* terakhir yaitu *visual images*, keduanya melampirkan gambar dengan latar yang berbeda namun masih relevan dengan bingkai. Yang kedua yaitu perangkat penalaran. Dalam perangkat penalaran *roots*, *Tempo.co* tidak menambahkan *roots* dalam berita yang disajikan. Sedangkan pada *Republika.co.id* lebih membahas pada sisi status peristiwa ini merupakan kelanjutan dari pengusutan kasus korupsi KTP elektronik. Selanjutnya yaitu klaim moral, kedua media ini mengambil sudut yang berbeda, *Republika.co.id* mengambil dari sisi hukuman yang setimpal yang diberikan kepada tersangka. Sedangkan *Tempo.co* mengambil pada sisi modus kejahatan yang dilakukan tersangka. Perangkat penalaran yang terakhir yaitu efek. Kedua media ini memberi efek yang sama yaitu efek kepada masyarakat untuk memberi dukungan kepada KPK dan ikut memantau berjalannya proses hukum kasus korupsi KTP elektronik.

4.2.7 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 7

Berita ketujuh yang diambil sebagai objek penelitian dari daring *Republika.co.id* berjudul “Pengacara Gubernur Papua Minta Penyidik Perlihatkan Bukti” dan dari daring *Tempo.co* dengan judul “Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua”. Kedua artikel tersebut diberitakan pada tanggal 4 September 2017. Berikut ini adalah analisisnya:

- *Republika.co.id* 7

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Dalam membentuk *framing*, artikel berita ini menggunakan perangkat *framing* sebagai pendukung. Perangkat *framing* pertama yaitu metafora. Dalam artikel berita ini tidak ditemukan metafora. Perangkat kedua yaitu *catchphrase* yang tampak pada kalimat:

“...meminta diperlihatkan bukti...”

Dalam kutipan kalimat tersebut menunjukkan keseriusan pengacara Gubernur Papua dalam permintaannya untuk diperlihatkan bukti atas kasus yang menimpa kliennya. *Exemplaar* yang menjelaskan bingkai menggambarkan bahwa alasan mengapa bukti tersebut dipertanyakan oleh pengacara terdakwa karena mengingat status kasus tersebut telah naik menjadi penyidikan. Hal itu tampak pada kalimat:

“Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Diperiksa sejak pagi tadi, Lukas mempertanyakan cara penyidik menaikkan status kasus ke tingkat penyidikan.”

Depiction yang menggambarkan fakta bahwa penyidik tentu mempunyai alasan untuk merahasiakan bukti tersebut. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Lukas datang dan meminta diperlihatkan bukti adanya penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua namun tidak diizinkan”



Gambar yang dilampirkan sudah relevan, yaitu foto dari Gubernur Papua yang terjerat kasus korupsi.

B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Selain menggunakan perangkat *framing*, berita ini juga menggunakan perangkat penalaran sebagai pendukung bingkai yang dibangun. Perangkat penalaran pertama adalah *Roots* yang tampak pada kalimat :

“Mestinya hal itu jauh dilakukan sebelumnya, sebelum mengusut kasus ini harus didapatkan dulu kerugian negaranya.”

Dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa timbulnya pertanyaan dari pengacara Gubernur Papua ini tidak lain karena proses pengusutan yang

menurutnya terbalik. Dal berita ini tidak ditemukan perangkat penalaran klaim moral. Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun yaitu efek kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim untuk menanggapi pertanyaan dari pengacara Gubernur Papua tersebut dan memberi penjelasan agar pengacara tersebut tidak memberi opini yang berlebihan.

- *Tempo.co* 7

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Berita pada daring *Tempo.co* juga menggunakan perangkat *framing* dalam mendukung bingkai yang dibangun. Dalam berita yang berjudul “Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua” tidak ditemukan perangkat *framing* metafora. Perangkat *framing* selanjutnya yaitu *catchphrase* yang tampak pada kalimat:

“...mempertanyakan kerugian negara...”

Dalam kutipan kalimat menunjukkan kesungguhan pertanyaan pengacara perihal besarnya kerugian akibat kasus korupsi ini. *Exemplaar* yang menjelaskan bingkai tampak pada kalimat:

“Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe sehubungan dengan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua tahun 2014-2017.”

Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa hal yang membuat pengacara Gubernur Papua mempertanyakan kerugian negara akibat korupsi kliennya tersebut karena pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya. *Depiction* pendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“Polisi menduga adanya penyelewengan dana beasiswa pelajar Papua.”

Hal yang tergambar dalam kalimat tersebut adalah kasus yang sedang berjalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut dana pendidikan. Apalagi yang dikorupsi adalah dana beasiswa. Melakukan ‘penyelewengan’ terhadap dana yang seharusnya ditujukan untuk pendidikan. Gambar yang dilampirkan dalam berita ini sudah relevan terdapat gambar tangan yang mengisyaratkan sebuah tindakan menyuap.



B. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

Perangkat penalaran *roots* atau sebab-akibat tampak pertanyaan dari pengacara tersebut disebabkan oleh argumennya tentang dua hal yang mendasari sebuah putusan yaitu tangkap tangan juga harus adanya bukti kerugian. Hal ini terlihat pada kalimat:

“Dalam putusan itu, kata dia, salah satu isinya menyatakan kasus korupsi selain dengan tangkap tangan harus juga ada bukti kerugian negaranya.”

Perangkat penalaran selanjutnya adalah klaim moral. Klaim moral dari bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“...jadi kami melihat perkara ini biasa saja tidak ada istimewanya...”

Pernyataan tersebut tentu sangat tidak etis diucapkan melihat kasus ini menyangkut beasiswa pelajar yang harusnya di tangani dengan serius. Perangkat penalaran terakhir adalah efek. Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun adalah kepada penyidik, agar segera mengkonfirmasi kerugian negara yang dikaibatkan kasus ini. Perkara juga harus segera ditindaklanjuti dan dijadikan perhatian agar tersangka dan kuasa hukumnya tunduk terhadap hukum yang ada.

➤ Analisis

Perangkat *framing* pertama yaitu metafira. Kedua media ini tidak menambahkan metafora dalam kedua berita yang disajikan ini. Kemudian *catcphrase*, kedua media ini sebenarnya menyampaikan hal yang senada, namun memiliki kata yang berbeda yakni “meminta diperlihatkan bukti” pada berita *Republika.co.id* dan “mempertanyakan kerugian negara” pada berita *Tempo.co*. perangkat *framing* selanjutnya yaitu *exemplaar*. Kedua media ini sama-sama membahas dari sisi penyebab pengacara mempertanyakan bukti yang membuat kliennya diperiksa lebih lanjut atas kasus korupsi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi. Selanjutnya yaitu *depiction*. pada *depiction* keduanya memiliki sisi yang berbeda. *Republika.co.id* menyinggung mengenai bukti yang tidak ditunjukkan penyidik. Sedangkan pada *Tempo.co* menyinggung tentang

kasus ini berakaitan dengan dana pendidikan. Perangkat *framing* selanjutnya yaitu *visual images*. Foto yang dilampirkan keduanya berbeda latar. *Republika.co.id* melampirkan fot Gubernur Papua sedangkan *Tempo.co* gambar yang memiliki makna tersirat tentang tindak koru[si atau suap. Perangkat yang kedua yaitu perangkat penalaran. Dalam *roots*, kedua media ini menyampaikan hal yang senada yaitu peristiwa yang menyebabkan pengacara Gubernur Papua mempertanyakan buktiyakni karena proses pengusuta yang terbalik. Selanjutnya yaitu klami moral. Dalam berita daring *Republika.co.id* tidak ditemukan klaim moral, sedangkan pada *Tempo.co* klaim moral membahas dari sisi ketiak etisan pertanyaan yang diajukan pengacara Gubernur Papua mengingat kasus ini menyangkut dana pendidikan. Perangkata penlaran yang terakhir yaitu efek. Kedua media sama-sama memberi efek untuk pihak berwenang seperti Tipikor dan penyidik untuk sesegera mungkin mengkonfirmasi pertanyaan yang diajukan pengacara Gubernur Papua agar menjalani proses hukum sesuai ketentuan.

4.2.8 Berita *Republika.co.id* dan *Tempo.co* 10

Berita kedelapan yang diambil dari daring *Republika.co.id* berjudul “KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka” dan daring *Tempo.co* dengan judul “Lebih Besar dari E-KTP, Korupsi Konawe Utara Rugikan Negara 2,7 T”. Kedua berita ini diunggah pada tanggal yang sama yakni 3 Oktober 2017. Berikut adalah hasil analisisnya:

- *Republika.co.id* 8

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Perangkat *framing* pertama yang mendukung bingkai berita ketiga dari daring *Republika.co.id* yang berjudul “KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka” ialah metafora. Dalam artikel ini tidak terdapat metafora yang mendukung bingkai yang dibangun. Perangkat kedua adalah *cathphrase* yang menjelaskan bahwa kasus korupsi bisa terjadi pada siapapun. Sekalipun seorang mantan Bupati. Justru mayoritas pelaku korupsi adalah oknum-oknum pejabat pemerintahan. Hal tersebut tampak pada kalimat:

“Aswad terjatuh...”

Exemplar yang membenarkan perspektif agar memperjelas bingkai yang dibangun terlihat pada kalimat :

“Aswad terjatuh kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan dan eksploitasi serta izin usaha produksi operasi produksi nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dari tahun 2007 sampai 2014.”

Dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh, karena melibatkan seorang mantan bupati. Selain itu, sasaran dari tersangka berkaitan dengan pertambangan yang sudah pasti merugikan negara dalam jumlah yang tidak kecil.

Perangkat selanjutnya yaitu *Depiction*. dengan adanya *depiction* pembaca terarah pada citra tertentu. *Depiction* tampak pada kalimat :

“Aswat, lanjut Saut, diduga menerima suap Rp 13 miliar. Suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan”

Jumlah uang yang digunakan untuk menyuap Aswat nominalnya sangat besar, mencapai belasan miliar rupiah. Gambar yang ditampilkan dalam berita ini kurang relevan, gambar tersebut memang foto Saut Situmorang, namun bukan dalam pemberian keterangan untuk kasus ini. Melainkan untuk memberikan keterangan kepada wartawan mengenai audisi Festival Lagu Suara Anti-korupsi.

B. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Selain perangkat *framing*, berita ini juga menggunakan perangkat penalaran dalam mendukung bingkai yang dibangun. Peristiwa yang menyebabkan munculnya peristiwa lain atau yang disebut *roots* atau sebab-akibat tampak pada kalimat:

“Aswad disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “

Akibat dari kejahatan yang dilakukan Aswat ini dia mendapat ancaman pidana yang sesuai. Klaim moral yang mendukung bingkai yakni perbuatan seorang mantan bupati yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang,

seperti dengan menerima suap dengan iming-iming memberikan izin pertambangan. Hal tersebut tampak pada kalimat berikut :

“suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan”

Efek yang didapat dari bingkai yaitu kepada KPK agar tersangka kasus ini diberi hukuman yang sepadan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya. Tanpa pandang bulu jabatan dari tersangka

- *Tempo.co* 8

A. *Framing Devices* (Perangkat Framing)

Berita yang diambil dari *Tempo.co* ini berjudul “Lebih Besar dari E-KTP, Korupsi Konawe Utara Rugikan Negara 2,7 T”. Perangkat pertama yakni metafora tidak ditemukan dalam artikel ini. Perangkat *Catchphrase* yang mendukung perspektif menunjukkan bahwa kasus korupsi ini tidak sepele karena kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut terlihat pada kalimat :

“...kerugian negara...”

Perangkat selanjutnya yaitu *Exemplaar* yang memperjelas bingkai yang dibangun. *Exemplaar* tampak pada kalimat:

“Saut mengatakan kasus yang melibatkan Aswad ini menyebabkan kerugian negara yang sebanding dengan kasus lain, seperti kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan kerugian Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI Rp 3,7 triliun.”

Menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat dikatakan kasus ringan mengingat kerugian negara yang diakibatkan hampir sama nilainya dengan korupsi KTP elektronik. Apalagi tersangka yang melakukan tindak korupsi dengan kata lain menerima suap hanyalah satu orang mantan bupati. *Depiction* yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat:

“Ia diduga mencabut kuasa pertambangan yang masih dalam pengelolaan PT Antam secara sepihak, kemudian memberikan izin eksplorasi tambang kepada delapan perusahaan lain dan menerbitkan 30 kuasa pertambangan eksplorasi lainnya,”

Gambar yang ditampilkan untuk mendukung bingkai sudah relevan, karena ada kasus korupsi pada pertambangan ini sama halnya dengan kasus KTP elektronik yang mengakibatkan kerugian yg besar. Maka foto yang dicantumkan yakni Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK.

B. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Artikel berita ini juga menggunakan perangkat penalaran sebagai pendukung bingkai yang dibangun. *Roots* atau sebab-akibat yang menandai satu peristiwa dengan peristiwa yang lain tampak pada kalimat:

“[Aswad Sulaiman](#) juga sempat tersandung kasus dugaan korupsi lain, yaitu korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara pada 2010-2011.”

Dalam kalimat tersebut dijelaskan kejahatan yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara ini tidak hanya sekali. Sebelumnya juga telah mendapat catatan hukum dari kasus korupsi lain. Perilaku tersangka ini menunjukkan sikap seakan tidak jera.

Klaim moral yang mendukung bingkai agar pembaca memiliki perspektif yang sama tampak pada kalimat:

“Aswad, kata Saut, telah menguntungkan diri sendiri dengan memberikan perizinan usaha tambang nikel di Kabupaten Konawe secara sepihak.”

Perbuatan korupsi tentu tidak ada yang menganggapnya sebagai perbuatan yang baik. Selain menguntungkan diri sendiri juga pasti merugikan orang lain dan sangat tidak berbudi. Efek yang timbul dari bingkai ini untuk KPK. Dengan nominal sebesar itu tentu bukan kasus yang remeh. Bahkan hampir sama nominalnya dengan kasus KTP elektronik.

➤ Analisis

Perangkat yang pertama yaitu perangkat *framing*. untuk metafora, *Republika.co.id* dan *Tempo.co* tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Selanjutnya yaitu *catchphrase*, *Republika.co.id* membahas dari sisi Aswad yang tertangkap. Sedangkan pada *Tempo.co* membahas dari sisi kerugian negara. Selanjutnya yaitu *exemplaar*, *Republika.co.id* mengambil dari sisi membenaran adanya korupsi yang dilakukan Aswad. Sedangkan pada *Tempo.co* membahas dari sisi berapa nominal kerugian yang ditimbulkan. Perangkat *framing* selanjutnya yakni *depiction*. *Republika.co.id* mengambil dari sisi jumlah nominal kerugian akibat korupsi yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara. Sedangkan pada *Tempo.co* membahas dari sisi tindakan yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara sehingga ia terjerat kasus korupsi ini. Selanjutnya yaitu *visual images*. Kedua media sama-sama melampirkan foto Saut Situmorang yang memberi keterangan mengenai kasus korupsi. Perangkat kedua yaitu perangkat penalaran. Dalam *roots*, *Republika.co.id* membahas dari sisi hukuman yang setimpal yang diberikan kepada tersangka. Sedangkan pada *Tempo.co* membahas dari sisi. Sikap tersangka yang tidak jera, bahkan juga pernah tersandung kasus sebelumnya. Selanjutnya yaitu klaim moral, kedua media sama-sama menyinggung tentang perbuatan yang dilakukan tersangka yang tidak patut dicontoh apalagi tersangka adalah seorang Bupati pada waktu sebelumnya. Perangkat penalaran yang terakhir yaitu efek, efek yang didapa dari kedua berita dari daring berbeda tersebut adalah untuk KPK agar tidak menganggap enteng

kasus ini mengingat nominal kerugian yang ditimbulkan, juga agar ersangka cepat diberi hukuman yang sepadan.

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditemukan 85 bukti pada keseluruhan berita dari substruktur *Framing Devices*. Diantaranya *Republika.co.id* sebanyak 41 yang terdiri dari 1*methapors*, 10*catchphrases*, 10*exemplaar*, 10*depiction*, dan 10*visual images*. Sedangkan *Tempo.co* sebanyak 44 yang terdiri dari 4*methapors*, 10*catchphrases*, 10*exemplaar*, 10*depiction*, dan 10*visual images*. Sedangkan pada *Reasoning Devices*, dapat ditemukan 55 bukti pada keseluruhan berita. Diantaranya *Republika.co.id* sebanyak 28 yang terdiri dari 9*roost*, 9*appeals to principles*, dan 10*consequenses*. Sedangkan *Tempo.co* sebanyak 26 yang terdiri dari 8*roots*, 8*appeals to principles*, dan 10*consequenses*.

4.4 Pembahasan

Pertama yaitu perangkat *framing*. Contoh metafora yang muncul yaitu pada berita pertama yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El”. Terdapat metafora yang mendukung bingkai yang tampak pada kutipan “...kecipratan...” yang menggambarkan seperti ikut mendapat bagian uang dalam kasus korupsi ini.

Sementara itu, contoh metafora yang ditemukan pada berita daring *Tempo.co* tampak lebih banyak, yaitu pada berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP” ditemukan metafora yang mendukung bingkai yang dibangun dalam kutipan “....uang pelicin...” yang menggambarkan seperti uang ataupun imbalan yang digunakan untuk melancarkan tindak korupsi tersebut. Kemudian contoh lain pada berita 3 yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”. Dalam artikel ini ditemukan sebuah metafora yang mendukung bingkai yang dibangun dalam kutipan “...dialirkan...” yang menggambarkan seperti mengirimkan uang atau memberi dana secara tidak langsung sebagai penunjang maksud yang tersembunyi. Contoh metafora selanjutnya yang ditemukan adalah pada berita 5 yang berjudul “Korupsi E-KTP, KPK Sebut Peran Setya Novanto Sudah Terungkap”. Ditemukan metafora yang mendukung *framing* pada kutipan “...peran...” yang menggambarkan ibarat seperti dalam sebuah drama, kasus ini juga terdapat orang-orang yang ikut ambil bagian dalam kasus korupsi ini.

Substruktur kedua yaitu *catchphrase*. Pada daring *Republika.co.id* setiap beritanya terdapat contoh *catchphrase*. Pada berita pertama yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” *catchphrase* yang tampak pada kalimat “Puluhan pihak disebut...”. Dalam *catchphrase* tersebut membuktikan bahwa benar adanya nama-nama yang menikmati dana KTP elektronik. Nama-nama terduga tersebut bahkan mencapai puluhan jumlahnya. Selanjutnya pada berita kedua yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” *Catchphrase* dalam berita ini menggambarkan bahwa benar

adanya fakta bahwa BPK membenarkan kabar mengenai anggotanya yang tertangkap KPK. Hal tersebut tampak pada kalimat "...membenarkan kabar...". pada berita ketiga yang berjudul "KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes", perangkat *catchphrase* pada berita ini tampak pada "tidak akan langsung memanggil dan memeriksa". Dalam kalimat tersebut tergambar bahwa KPK masih akan mempelajari dugaan dan belum mengambil tindakan yang serius. KPK tentu mempertimbangkan berbagai hal untuk melakukan tindakan seperti memanggil terduga dan memeriksanya. Begitu pun pada berita keempat yang berjudul "Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah", *catchphrase* yang mendukung bingkai menggambarkan benar adanya bahwa kasus korupsi Alkes ini sudah menemui babak akhir dengan dijatuhkannya vonis untuk Siti Fadilah. Hal tersebut tampak pada kalimat "Majelis Hakim memvonis...".

Pada berita pertama dari daring *Tempo.co* yang berjudul "Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP", *catchphrase* yang tampak pada kalimat: "...daftar nama penerima uang...". Dalam frase tersebut tergambar jumlah dari nama-nama tersangka yang lebih dari 15 orang hingga harus menggunakan daftar untuk mencatat nama-nama tersebut. Pada berita kedua yang berjudul "Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK", *catchphrase* yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kutipan kalimat: "...menangkap auditor utama...". Dalam kutipan kalimat tersebut menjelaskan bahwa benar adanya penangkapan yang dilakukan KPK terhadap petinggi BPK tepatnya bagian auditor utama BPK. Pada berita ketiga yang berjudul "Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais", *catchphrase* pada berita ini tampak

pada “menindaklanjuti dugaan”. Pada frase tersebut tampak bahwa KPK cukup serius menanggapi dugaan yang muncul dalam persidangan mengenai korupsi Alkes. Tidak berbeda dengan beruta keempat yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”, *catchphrase* yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “...menjatuhkan vonis...”. Dalam *catchphrase* tersebut memperlihatkan penanganan kasus ini serius, sehingga cepat terselesaikan dan mengakhirinya dengan memberikan hukuman terhadap Siti Fadilah.

Substruktur perangkat *framing* yang ketiga adalah *exemplaar*. Contoh *exemplaar* pada berita pertama *Republika.co.id* yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” tampak ada kalimat “Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadaan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun.” Kalimat tersebut menjelaskan bahwa puluhan nama tersebut benar merupakan nama-nama terduga yang mendapat cipratan dana dari korupsi KTP elektronik. Jumlah dana yang masuk ke rekening mereka jumlahnya fantastis yaitu Rp 5,95 triliun. Contoh *exemplaar* pada berita kedua yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” tampak pada kalimat “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membenarkan kabar adanya staf audit instansi tersebut yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5) sore.” Kalimat tersebut menjelaskan bahwa benar adanya penangkapan terhadap anggota BPK. Pembenaran tersebut bahkan diungkapkan oleh BPK sendiri. *Exemplaar* pada berita ketiga yang berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” terlihat pada kalimat

“jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.”. Dalam kalimat tersebut terlihat alasan mengapa dugaan tersebut perlu dipelajari lebih mendalam lagi karena adanya fakta yang dikemukakan jaksa bahwa Amien Rais adalah salah satu orang yang mendapat aliran dana. Contoh *exemplaar* selanjutnya yaitu pada berita keempat yang berjudul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” yang menggambarkan benar adanya bahwa Siti Fadilah telah divonis atas kasus yang menyeretnya yaitu korupsi Alkes. Siti Supari terbukti bersalah atas korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut meskipun sampai kini Siti belum mengakuinya. Hal tersebut tampak pada kalimat “Majelis Hakim memvonis empat tahun penjara terdakwa pengadaan alat kesehatan Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari.”

Sementara itu, pada dari *Tempo.co* contoh pertama yaitu pada berita yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP” yang tampak pada kalimat “Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek KTP elektronik atau *e-KTP* yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, memuat sederet nama berikut uang yang diterimanya.” Benar adanya bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar yang diumumkan tersebut adalah orang-orang yang menikmati dana KTP elektronik. Nama yang diumumkan cukup banyak sehingga perlu dijabarkan dalam bentuk daftar dan rincian uang yang dinikmati tersangka. Pada berita kedua yang berjudul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK” *Exemplaar* yang memperjelas bingkai tampak pada kalimat “Penangkapan diduga terkait dengan audit di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras.” Kalimat tersebut menjelaskan

penangkapan yang dilakukan KPK terhadap petinggi auditor BPK ini terkait dengan audit di Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Dalam berita ketiga yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”, *exemplaar* tampak pada kalimat “Dugaan adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu lalu”. Dalam kalimat tersebut tampak menggambarkan terungkapnya dugaan Amien Rais sebagai salah satu pihak yang menerima uang Alkes tersebut. Tanggapan dari KPK pun sigap dengan langsung menindaklanjuti dugaan yang dikemukakan jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Siti tersebut. Contoh selanjutnya yaitu pada berita keempat yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”, *exemplaar* tampak pada kalimat “Mejelis hakim meyakini Siti telah menerima duit senilai total Rp 1,9 miliar.” Dalam *exemplaar* tersebut menjelaskan benar adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Siti Fadilah dengan objek pengadaan alat kesehatan. Kerugian yang diakibatkan cukup besar yaitu RP 1,9 miliar.

Substruktur perangkat *framing* yang keempat yaitu *depiction*. contoh *depiction* yang diambil dari berita pertama daring *Republika.co.id* yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” menggambarkan fakta bahwa perbuatan dari para pelaku sangat tidak berbudi dan merugikan masyarakat satu negara. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kerugian yang ditanggung negara pun tidak tanggung-tanggung mencapai angka diatas Rp 2 triliun. Hal tersebut tampak pada kalimat

“Rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,314 triliun.” Contoh lainnya yakni pada berita kedua yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” yang menjelaskan fakta bahwa tersangka benar benar terlibat korupsi karena masih ikut andil dalam audit Kementerian Desa. Hal tersebut tampak pada kalimat “...keduanya terlibat dalam audit Kementerian Desa.” Contoh selanjutnya yaitu pada berita ketiga yang berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” Dalam *depiction*, timbul bukti yang menguatkan bahwa Amien Rais menerima uang Alkes tersebut. Bahkan dijelaskan bahwa uang tersebut masuk ke rekening Amien Rais dalam 6 tahap dengan jumlah nominal yang cukup banyak yakni 600 juta rupiah. Hal tersebut tampak pada kalimat berikut “Penuntut umum menyebut Amien menerima uang sebanyak enam kali tahapan dengan total Rp 600 juta.” Pada berita keempat yang berjudul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” *depiction* tampak pada kalimat “...ia mengaku kecewa karena menurutnya fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.” Dalam kalimat tersebut tampak kekecewaan dari Siti akan fakta di persidangan yang tidak dipakai. Meskipun semikian, Siti sudah terbukti bersalah dan seharusnya tidak mengelak lagi.

Pada berita daring *Tempo.co*, contoh *depiction* pada berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP” menggambarkan hal yang dilakukan tersangka-tersebut sangat membuat geram masyarakat bahwa proyek sebesar itu hanya dijadikan objek korupsi para koruptor. Berbagai cara dilakukan agar proyek ini berjalan dengan mulus. Salah satunya dengan memberi uang pelicin. Hal tersebut tampak pada kalimat “...uang

pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR.” Pada berita kedua yang berjudul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK” juga ditemukan *depiction* yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “...pejabat Kementerian Desa diduga ikut dicokok.” Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa dalam penangkapan tersebut juga mehyeret pejabat di Kementerian Desa. Mereka tertangkap basah juga terkait dengan kasus korupsi ini. Contoh *depiction* selanjutnya yang ditemukan pada berita ketiga yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais” tampak pada kalimat “Berkas tuntutan jaksa mencatat dana disetor ke rekening Amien sebanyak enam kali, mulai 15 Januari 2007 hingga 2 November 2007. Masing-masing transaksi senilai Rp 100 juta.” Tampak jelas dalam kalimat tersebut bahwa fakta yang menunjukkan bahwa adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan Amien Rais cukup rinci. Hal ini tentu yang membuat KPK harus jeli dan tidak membuang waktu untuk menangani kasus ini. Pada berita keempat dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara” *Depiction* tampak pada kalimat “...duit tersebut diyakini sebagai bagian dari suap pengadaan alat kesehatan karena perusahaan tersebut terlibat dalam pengadaan.” Tindakan menghalalkan segala cara seperti menerima suap dari pengadaan alat kesehatan dijadikan alternatif bagi Siti Fadilah untuk memperoleh uang.

Substruktur perangkat *framing* terakhir yaitu *visual image*. Pada berita *Republika.co.id* pertama yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” gambar yang dilampirkan sudah eleven yakni gambar tumpukan KTP elektronik yang menjadi proyek sasaran para koruptor.

Pada berita kedua dengan judul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK” Foto yang dilampirkan kurang relevan, justru foto gedung BPK yang bertuliskan BPK dengan efek hitam putih. *Visual image* yang dilampirkan pada berita ketiga yang berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” sudah relevan yakni foto Amien yang sedang diwawancari di kediamannya mengenai kasus ini. Pada berita keempat dengan judul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” Foto yang dilampirkan sudah relevan, yaitu foto saat Siti Fadilah tengah menjalani persidangan.

Pada daring *Tempo.co*, terdapat *visual image* pada berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP” Gambar yang dilampirkan dalam berita tersebut sudah relevan, gambar yang dilampirkan berupa foto tumpukan berkas yang berkaitan dengan kasus korupsi dana KTP elektronik. Pada berita kedua dengan judul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK”, gambar yang dilampirkan dalam berita ini sudah relevan, tampak gambar dua tangan yang sedang melakukan transaksi uang yang mengisyaratkan itu adalah tindak korupsi. *Visual image* selanjutnya yang dilampirkan pada berita ketiga dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais” kurang relevan, karena foto tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang diberitakan. Memang benar foto tersebut merupakan foto dari Amien Rais, namun dalam kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Pada berita keempat dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara” Foto yang dilampirkan sudah relevan yaitu foto Siti Fadilah yang sedang menjalani persidangan.

Perangkat kedua yaitu perangkat penalaran (*Reasoning Devices*). Substruktur pertama dalam perangkat penalaran yaitu *roots*. Pada daring *Republika.co.id*, berita pertama yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” *Roots* yang menggambarkan sebab-akibat tampak pada kalimat “nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el”. Seperti ungkapan ‘tidak ada asap jika tidak ada api’ bahwa nama-nama pelaku merupakan hasil pengusutan dari tersangka yang telah tertangkap sebelumnya. Hingga sederet nama tersebut terungkap. Contoh *roots* berikutnya tampak pada berita ketiga dengan judul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes”, *roots* dapat dilihat dalam kalimat “Pada sidang tuntutan kasus pengadaan alkes dengan terdakwa Siti pada Rabu (31/5) kemarin, jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.” Dalam kalimat tersebut tampak adanya kaitan antara kasus sebelumnya yang telah disidangkan dengan mengapa Amien Rais ikut terseret dalam kasus ini. Dalam kasus korupsi seperti ini, bila salah satu sudah tertangkap maka akan terungkap tersangka-tersangka berikutnya yang masuk dalam satu kasus tersebut. Apalagi kasus ini merupakan kasus yang berkaitan dengan kesehatan, utamanya masyarakat. Pada berita keempat dengan judul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” *Roots* tampak pada kalimat “Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima gratifikasi.” Dalam kalimat tersebut menggambarkan kejahatan yang dilakukan Siti Fadilah tidak hanya sebelumnya korupsi dari dana pengadaan alat kesehatan, tetapi juga menerima gratifikasi. Seakan belum menemui jera sebelum diberi hukuman.

Pada daring *Tempo.co* berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP”*Roots* tampak pada kalimat “Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik karena mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.” Perbuatan melawan hukum membuat terdakwa terjatuh hukuman pidana. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga menyeret nama-nama dalam daftar yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum.*Roots* selanjutnya ditemukan pada berita ketiga dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais” dapat dilihat dari kalimat “...dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlani, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). “Selanjutnya, Nuki Syahrin, selaku Ketua Yayasan SBF, memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa” Dari kalimat tersebut menunjukkan kronologi bagaimana Amien Rais terseret dalam kasus ini. Tentunya hal tersebut juga memperkuat fakta bahwa saat ini modus dari tindak korupsi sudah bervariasi. Salah satunya dengan memindahbukukan dana. Pada berita keempat yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”*Roots* tampak pada kalimat “Siti telah terbukti melakukan penunjukan langsung terhadap PT Indofarma untuk pengadaan alat kesehatan *buffer stock*.” Vonis yang dijatuhkan kepada Siti Fadilah adalah akibat dari tindakannya yang secara langsung menunjuk PT yang menyokong pengadaan alat kesehatan. Hal tersebut berlanjut pada tindak korupsi yang dilakukannya.

Substruktur perangkat penalaran yang kedua yaitu *Appeals to Principals* atau klaim moral. Pada daring *Republika.co.id* berita pertama yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El” klaim moral yang mendukung bingkai terlihat pada kalimat “Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi.” Tindak korupsi memang seharusnya tidak dijadikan kasus yang remeh. Selain sangat merugikan negara, dapat membuat para tersangka tidak jera karena banyak pihak yang ‘diuntungkan’ demi kepentingan pribadi dan kelompok. Pada berita kedua dengan judul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK”, klaim moral tampak menggambarkan bahwa sikap BPK yang memberi dukungan penuh pada KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret anggota BPK ini. Hal tersebut tampak dalam kalimat “Ia justru meminta KPK mengusut tuntas temuan ini.” Klaim moral selanjutnya tampak pada berita ketiga yang berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” yang menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan sebuah kasus korupsi, KPK harus memiliki bukti yang kuat. Apalagi kasus ini baru mulai dibuka saat disebutkan oleh jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Siti. Hal ini terlihat dalam kalimat “Juru Bicara KPK Febri mengatakan bakal mempelajari terlebih dulu seluruh fakta yang terungkap di persidangan.” Pada berita keempat dengan judul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah” klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “Ia menyebut apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negara tetapi fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.” Dari perkataan Siti tersebut menggambarkan sikap mengelak dan belum tunduk dengan hukum. Seharusnya bila memang sudah tunduk terhadap vonis

yang dijatuhkan kepadanya, tidak ada sikap mengkritik ataupun tidak merasa bersalah seperti perkataan Siti Fadilah tersebut.

Sementara itu, pada daring *Tempo.co* berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP“, klaim moral yang mencolok tampak pada kalimat “...selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi.” Dalam kalimat tersebut tergambar bahwa perbuatan tersangka tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan pribadi, korupsi KTP elektronik dalam angka yang besar pasti dimanfaatkan oleh korporasi agar mendapat cipratan dana tersebut. Seperti sudah tidak memiliki rasa malu dan berdosa. Klaim moral selanjutnya tampak pada berita ketiga dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”. klaim moral yang mencolok dalam artikel ini adalah niat baik yang ditunjukkan Amien Rais kepada KPK maupun media bahwa dirinya akan datang ke KPK dan memberikan sejumlah data dalam kasus korupsi besar yang dijelaskan pada kalimat berikut “Amien justru berencana datang ke KPK, Senin mendatang, untuk memberikan sejumlah data kasus korupsi besar yang melibatkan dua tokoh nasional dan kini belum ditangani.” Pada berita keempat dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”, klaim moral tampak pada kalimat “Siti berkukuh tidak merasa bersalah dalam pengadaan alat kesehatan saat ia menjabat...” Keputusan hakim seharusnya sudah menjadi pembelajaran bagi terdakwa. Sikap yang masih menyangkal seperti ini seakan tidak menghormati putusan dari hakim dan menggambarkan tidak ada rasa jera.

Substruktur perangkat penalaran yang terakhir yaitu *consequences* atau efek. Pada berita pertama daring *Republika.co.id* yang berjudul “Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El”, efek yang timbul dari framing berita yang dibangun yaitu kepada KPK agar segera menindaklanjuti dari data yang telah dikantongi agar masyarakat merasa lebih lega akan hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi yang merugikan masyarakat. Dari berita kedua yang berjudul “BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK”, efek yang ditimbulkan dari bingkai yang dibangun adalah kepada BPK selalu siap untuk membwa anggotanya yang melakukan tindakan korupsi, hal tersebut tampak pada kalimat “BPK siap membawa stafnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke sidang etik dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.” Efek dari berita ketiga yang berjudul “KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes” adalah kepada masyarakat bahwa dalam mengungkap kebenaran sebuah kasus kita juga harus mendengarkan keterangan yang akan terdakwa berikan, karena hal tersebut bisa saja memengaruhi langkah yang akan KPK ambil selanjutnya. Apakah keterangan terdakwa benar adanya atau hanya alibi. Hal tersebut tergambar dalam kalimat “kita perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan,”. Pada berita keempat yang berjudul “Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah”, efek yang didapat dari bingkai yang dibangun adalah efek bagi terdakwa agar lebih menghormati keputusan hakim dan tidak membuat opini yang berlebihan kepada publik.

Pada daring *Tempo.co* berita pertama yang berjudul “Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP”, efek yang timbul dari bingkai yang

dibangun adalah kepada KPK dan aparat penegak hukum segera mengusut setuntasnya dan memberi hukuman setimpal pada pelaku tindak korupsi berjamaah ini. Pada berita kedua yang berjudul “Berita Terkini, KPK Tangkap Pejabat BPK”, efek yang didapat dari bingkai yang dibangun adalah kepada KPK agar segera memberikan keterangan resmi perihal penangkapan tersangka ini. Hal tersebut tampak pada kalimat “Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun BPK ihwal kronologi penangkapan tersebut.” Kemudian pada berita ketiga yang berjudul “Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais”, efek yang timbul dari bingkai berita yang dibangun adalah kepada KPK agar lebih jeli dan tidak tertipu oleh berbagai modus dalam tindak korupsi. Karena niat baik belum tentu sepenuhnya baik, bisa ada kemungkinan bahwa hal tersebut alibi untuk meringankan tuduhan. Dalam berita keempat dengan judul “Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara”, efek yang didapat yaitu kepada KPK agar lebih tegas terhadap terdakwa, karena tidak adanya rasa bersalah yang ditunjukkan oleh terdakwa.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi penelitian yang dilakukan. Keterbatasan tersebut diantaranya:

- A. Pengetahuan terbatas mengenai teori analisis *framing* yang menyebabkan teori yang ada dalam penelitian ini masih belum mendalam.

- B. Penelitian ini hanya meneliti artikel berita yang disajikan oleh daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*. Idealnya penelitian bisa menggunakan media daring ataupun media lainnya, tetapi daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* sudah mewakilkan dari surat kabar tersebut.
- C. Penelitian ini hanya melihat dari analisis *framing* dari model Willam A. Gamson pada daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co*.
- D. Penelitian ini melihat analisis *framing* dari segi linguistik, bukan dari ilmu komunikasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis *framing* dalam pemberitaan daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* dengan menggunakan model analisis *framing* Willian A. Gamson, penulis memperoleh kesimpulan :

1. Daring *Republika.co.id* dan *Tempo.co* membingkai berita korupsi dilihat dari sisi bagaimana kasus-kasus tersebut diusut oleh KPK dan berbagai akibat yang ditimbulkan dari tindak korupsi.
2. Daring *Republika.co.id* lebih banyak menonjolkan pada perangkat penalaran dibandingkan daring *Tempo.co*. Sedangkan daring *Tempo.co* lebih menonjolkan pada perangkat *framing* utamanya penggunaan metafora yang variatif.
3. Pada *Framing Devices*, dapat ditemukan 67 bukti dari substruktur Framing Devices. Diantaranya *Republika.co.id* sebanyak 33, dan *Republika.co.id* sebanyak 34.
4. Pada *Reasoning Devices*, dapat ditemukan 42 bukti dari substruktur *Reasoning Devices*. Diantaranya *Republika.co.id* sebanyak 22, dan *Tempo.co* sebanyak 20.

5.2 Saran

1. Penggunaan analisis *framing* ini bukan hanya dalam meneliti bidang linguistik, tetapi juga dapat digunakan di bidang ilmu komunikasi.
2. Selain analisis *framing*, penelitian melalui objek media bisa menggunakan metodologi lain yang masih berkaitan dengan analisis teks media. Hal seperti ini memperluas referensi dalam kajian analisis teks media.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Kushartanti. Dkk. (2009). *Pesona Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sobur, Alex. (2002). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS
- Yunus, Syarifudin. (2015). *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardikantoro, Hari Bakti. (2014).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/viewFile/2576/2130> diakses pada 05 September pukul 00.35
- <https://profil.merdeka.com/indonesia/r/republika/> diakses pada 9 September 2017 pukul 16.24
- <https://korporat.tempo.co/tentang> diakses pada 09 September 2017 pukul 16:01
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/06/02/oqwjv3428-kpk-pelajari-dugaan-amien-terima-uang-alkes> diakses pada 22 November pukul 13.00
- <https://nasional.tempo.co/read/880774/kasus-korupsi-alkes-kpk-telusuri-dugaan-setoran-ke-amien-rais> diakses pada 22 November pukul 13.05
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/03/ox8yoq384-kpk-tetapkan-mantan-bupati-konawe-utara-sebagai-tersangka> diakses pada 23 November pukul 14.50
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/04/ovrbm330-pengacara-gubernur-papua-minta-penyidik-perlihatkan-bukti> diakses pada 23 November pukul 17.05
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/05/ou6qm0280-tni-janji-transparan-soal-kasus-pengadaan-helikopter-aw101> diakses pada 22 November pukul 14.55
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/07/oub1gd354-korupsi-ktpel-kpk-limpahkan-berkas-andi-narogong> diakses pada 22 November pukul 15.15

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/09/omjb8l384-ini-dia-namanama-yang-disebut-menikmati-aliran-dana-ktpel> diakses pada tanggal 22 November pukul 16.00

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/06/16/orn2qd330-divonis-4-tahun-penjara-ini-kata-siti-fadilah> diakses pada tanggal 23 November pukul 17.00

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/26/oqkddu365-bpk-benarkan-dua-anggotanya-ditangkap-kpk> diakses pada tanggal 22 November pukul 12.15

<https://nasional.tempo.co/read/1021760/lebih-besar-dari-e-ktp-korupsi-konawe-utara-rugikan-negara-27-t> diakses pada tanggal 22 November pukul 11.55

<https://nasional.tempo.co/read/897322/puspom-tni-cari-inisiator-utama-kasus-korupsi-heli-aw-101> diakses pada tanggal 23 November pukul 12.15

<https://nasional.tempo.co/read/897710/kasus-korupsi-e-ktp-kpk-andi-narogong-segera-diadili> diakses pada tanggal 23 November pukul 13.15



<https://nasional.tempo.co/read/854213/ini-daftar-nama-terduga-penerima-duit-korupsi-e-ktp> diakses pada tanggal 23 November pukul 13.25

<https://nasional.tempo.co/read/885186/kasus-korupsi-alkes-siti-fadilah-supari-divonis-4-tahun-penjara> diakses pada tanggal 23 November pukul 19.00

<https://nasional.tempo.co/read/879029/berita-terkini-kpk-tangkap-pejabat-bpk> diakses pada tanggal 23 November pukul 19.35

<https://nasional.tempo.co/read/905836/pengacara-pertanyakan-kerugian-negara-korupsi-gubernur-papua> diakses pada tanggal 23 November pukul 20.50



Judul Berita		Framing Devices (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El	Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Terdapat metafora yang mendukung bingkai yang tampak pada kutipan "...kecipratan..." dalam kalimat "Lantas siapa saja nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el?" yang menggambarkan seperti ikut mendapat bagian uang dalam kasus korupsi ini. Ada pihak yang mendapat bagian dalam perkara ini.	Ditemukan metafora yang mendukung bingkai yang dibangun dalam kutipan "...uang pelicin..." dalam kalimat "Irman dan Sugiharto, menyatakan uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR" yang menggambarkan seperti uang ataupun imbalan yang digunakan untuk melancarkan tindak korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan fungsi dari uang yang dapat melancarkan urusan dalam perkara ini.	Dari kedua berita yang diambil dari dua daring yang berbeda tersebut, yakni <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> dapat dilihat keduanya memberikan metafora pada berita yang mereka tuliskan. Metafora dari keduanya sama-sama berhubungan dengan tindak korupsi yang tersangka lakukan. Namun dari keduanya mengambil sudut yang berbeda, yakni dari pihak yang mendapat bagian pada berita <i>Republika.co.id</i> .
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Dalam <i>catchphrase</i> "Puluhan pihak disebut..." membuktikan benar adanya nama-nama yang bahkan dalam jumlah puluhan yang menikmati dana KTP elektronik.	Untuk mendukung bingkai terdapat perangkat <i>framing catchphrase</i> yang tampak pada frase "...daftar nama penerima uang..." Dalam frase tersebut tergambarkan jumlah dari nama-nama tersangka yang lebih dari 15 orang hingga harus menggunakan daftar untuk mencatat nama-nama tersebut.	Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> mengambil pada sudut fungsi uang tersebut sebagai pelancar aksi korupsi. Pada <i>catchphrase</i> kedua berita ini sama-sama menonjolkan pada nama-nama yang menjadi tersangka. Pada <i>exemplaar</i> keduanya sama-sama menyinggung mengenai banyaknya pihak yang mendapat bagian atas kasus korupsi ini, namun berita <i>Republika.co.id</i> lebih menjelaskan lagi dengan jumlah uang yang dikorupsi, sedangkan
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	<i>Exemplaar</i> yang membenarkan perspektif tampak pada kalimat "Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadaan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun." Menggambarkan bahwa puluhan nama tersebut mendapat cipratan dana dengan jumlah yang fantastis	<i>Exemplaar</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat "Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek KTP elektronik atau <i>e-KTP</i> yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, memuat sederet nama berikut uang yang diterimanya." Benar adanya bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar yang diumumkan tersebut	lebih menjelaskan lagi dengan jumlah uang yang dikorupsi, sedangkan

			yaitu Rp 5,95 triliun.	adalah orang-orang yang menikmati dana KTP elektronik	<i>Tempo.co</i> lebih kepada penjelasan bukti otentik dari daftar tersangka tersebut. Pada <i>depiction</i> , keduanya mengambil diksi masing-masing seperti <i>Republika.co.id</i> lebih jelas memaparkan kerugian negara dan menambahkan kata ‘rangkaian perbuatan’ dan ‘secara bersama-sama’, sedangkan <i>Tempo.co</i> menggunakan ‘uang pelicin’ dan ‘ditebar’. Keduanya sama-sama memacu pada sebuah perspektif tentang tersangka yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan dilakukan secara bersama-sama. Pada <i>visual image</i> , kedua daring ini sama-sama melampirkan gambar yang relevan,
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> dalam artikel ini menggambarkan bahwa perbuatan dari para pelaku sangat tidak berbudi dan merugikan masyarakat satu negara. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kerugian yang ditanggung negara pun tidak tanggung-tanggung mencapai angka diatas Rp 2 triliun. Hal tersebut tampak pada kalimat “...rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,314 triliun.”	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “...uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR.” Sangat membuat geram masyarakat bahwa proyek sebesar itu hanya dijadikan objek korupsi para koruptor. Berbagai cara dilakukan agar proyek ini berjalan dengan mulus. Salah satunya dengan memberi uang pelicin.	<i>Republika.co.id</i> lebih kepada wujud dari KTP elektronik tersebut, sedangkan pada <i>Tempo.co</i> lebih kepada berkas-berkas bukti dari kasus korupsi KTP elektronik. Dalam perangkat penalaran <i>roots</i> , keduanya sama-sama menyinggung keterkaitan nama-nama tersangka yang baru ditetapkan dengan terdakwa yang sebelumnya sudah diungkap. Pada klaim moral, keduanya juga
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Relevan yakni gambar tumpukan KTP elektronik yang menjadi proyek sasaran para koruptor.	 Relevan, gambar yang dilampirkan berupa tumpukan berkas yang berkaitan dengan kasus korupsi dana KTP elektronik.	
		Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	<i>Roots</i> tampak pada kalimat “...nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el...” seperti ungkapan ‘tidak ada asap jika tidak ada api’ bahwa nama-nama pelaku merupakan hasil pengusutan dari tersangka yang telah	<i>Roots</i> atau sebab akibat yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat “Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik karena mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.”	

			tertangkap sebelumnya. Hingga sederet nama tersebut terungkap.	Perbuatan melawan hukum membuat terdakwa terjatuh hukuman pidana. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga menyeret nama-nama dalam daftar yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum.	menuliskan hal yang sama, yaitu perbuatan dari para tersangka bukan hanya menguntungkan diri sendiri, namun juga untuk korporasi mereka. Pada perangkat penalaran efek, keduanya sama-sama memberi efek kepada KPK untuk segera mengusut dan menindaklanjuti data-data yang telah didapat dari Jaksa.
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Klaim moral yang mendukung bingkai terlihat pada kalimat "Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi." tindak korupsi memang seharusnya tidak dijadikan kasus yang remeh. Selain sangat merugikan negara, dapat membuat para tersangka tidak jera karena banyak pihak yang 'diuntungkan' demi kepentingan pribadi dan kelompok.	Klaim moral yang mencolok tampak pada kalimat "selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi." Tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan pribadi, korupsi KTP elektronik dalam angka yang besar pasti dimanfaatkan oleh korporasi agar mendapat ciptaan dana tersebut. Seperti sudah tidak memiliki rasa malu dan berdosa.	
		<i>Consequences</i> (efek)	Kepada KPK agar segera menindaklanjuti dari data yang telah dikantongi agar masyarakat merasa lebih lega akan hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi yang merugikan masyarakat.	Kepada KPK dan aparat penegak hukum segera mengusut setuntasnya dan memberi hukuman setimpal bagi pada pelaku tindak korupsi berjamaah ini.	

2. 26 Mei 2017



Judul Berita		<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
BPK Benarkan Dua	Berita Terkini,	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	Kedua berita dari daring <i>Republika.co.id</i> dan

Anggotanya Ditangkap KPK	KPK Tangkap Pejabat BPK	<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Dalam <i>catchphrase</i> menggambarkan bahwa benar adanya fakta bahwa BPK membenarkan kabar mengenai anggotanya yang tertangkap KPK. Hal tersebut tampak pada kalimat "...membenarkan kabar..."	<i>Catchphrase</i> yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kutipan kalimat "...menangkap auditor utama..." yang menjelaskan bahwa benar adanya penangkapan yang dilakukan KPK terhadap petinggi BPK tepatnya bagian auditor utama BPK.	<i>Tempo.co</i> tersebut sama-sama tidak menambahkan metafora dalam berita. Pada perangkat <i>framing catchphrase</i> , <i>Republika.co.id</i> mengambil perspektif dari sisi adanya orang yang membenarkan kabar, sedangkan pada <i>Tempo.co</i> lebih kepada fakta bahwa ada anggota BPK yang ditangkap KPK. Pada perangkat <i>framing exemplaar</i> , <i>Republika.co.id</i> menulis tentang pembenaran kabar oleh BPK dan anggota dibagian mana yang ditangkap. Sedangkan <i>Tempo.co</i> lebih menjelaskan kepada hal yang terkait dengan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap anggota BPK. Pada <i>depiction</i> , <i>Republika.co.id</i> mengambil pada sudut keterlibatan tersangka dalam audit Kementerian Desa sehingga mereka terseret dalam kasus ini. Sedangkan <i>Tempo.co</i> , lebih menjelaskan kepada keterkaitan oknum pejabat Kementerian Desa dengan para tersangka. Kedua berita tersebut sama-sama melampirkan gambar, namun pada <i>Republika.co.id</i> gambar yang dilampirkan kurang
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	<i>Exemplaar</i> yang membenarkan perspektif tampak pada kalimat "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membenarkan kabar adanya staf audit instansi tersebut yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5) sore." kalimat tersebut menjelaskan bahwa benar adanya penangkapan terhadap anggota BPK. Pembenaran tersebut bahkan diungkapkan oleh BPK sendiri.	<i>Exemplaar</i> yang memperjelas bingkai tampak pada kalimat "Penangkapan diduga terkait dengan audit di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi." Penangkapan yang dilakukan KPK terhadap petinggi auditor BPK ini terkait dengan audit di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	Dalam <i>depiction</i> menjelaskan fakta bahwa tersangka benar benar terlibat korupsi karena masih ikut andil dalam audit Kementerian Desa. Hal tersebut tampak pada kalimat "...keduanya terlibat dalam audit Kementerian Desa."	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat "...pejabat Kementerian Desa diduga ikut dicokok." Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa dalam penangkapan tersebut juga menyeret pejabat di Kementerian Desa. Mereka tertangkap basah juga terkait dengan kasus korupsi ini.	
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Foto yang dilampirkan kurang relevan, justru foto gedung BPK yang bertuliskan BPK dengan efek hitam putih.	 Gambar yang dilampirkan dalam berita ini sudah relevan, tampak gambar dua tangan yang sedang melakukan transaksi uang yang mengisyaratkan itu	

				adalah tindak korupsi.	relevan sehingga kurang mendukung bingkai yang dibangun. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> gambar yang dilampirkan sudah relevan dan secara tersirat menggambarkan tindak korupsi.
		Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	Dalam perangkat penalaran <i>roots</i> keduanya sama-sama tidak memberikan perangkat <i>roots</i> dalam berita yang disajikan. Begitupun dengan perangkat klaim moral, pada <i>Tempo.co</i> tidak menambahkan klaim moral dalam berita yang disajikan. Sedangkan pada <i>Republika.co.id</i> menambahkan klaim moral tentang BPK yang memberi dukungan terhadap tugas yang dilaksanakan KPK apalagi dalam kasus yang menyeret nama anggota BPK ini. Dalam perangkat efek, keduanya menonjolkan pada sudut yang berbeda, pada <i>Republika.co.id</i> efek untuk BPK sedangkan pada <i>Tempo.co</i> efek untuk KPK.
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Dalam klaim moral tampak bahwa sikap BPK yang memberi dukungan penuh pada KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret anggota BPK ini. Hal tersebut tampak dalam kalimat “Ia justru meminta KPK mengusut tuntas temuan ini.”	Tidak ditemukan dalam artikel	
		<i>Consequences</i> (efek)	Efek yang ditimbulkan dari bingkai yang dibangun adalah kepada BPK selalu siap untuk membawa anggotanya yang melakukan tindakan korupsi, hal tersebut tampak pada kalimat “BPK siap membawa stafnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke sidang etik dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.”	Efek yang didapat adalah kepada KPK agar segera memberikan keterangan resmi perihal penangkapan tersangka ini. Tampak pada kalimat “Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun BPK ihwal kronologi penangkapan tersebut.”	

3. 2 juni 2017

Judul Berita		Framing Devices (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes	Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Ditemukan sebuah metafora yang mendukung bingkai yang dibangun dalam kutipan "...dialirkan..." dalam kalimat "Iskandar Marwanto, mengatakan dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlani" yang menggambarkan seperti mengirimkan uang atau memberi dana secara tidak langsung sebagai penunjang maksud yang tersembunyi.	Pertama yaitu perangkat <i>framing</i> . Dalam perangkat metafora, <i>Republika.co.id</i> tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Sedangkan <i>Tempo.co</i> menambahkan metafora yaitu kata "dialirkan". Perangkat kedua yaitu <i>catchphrase</i> . Perbedaan yang mencolok dari kedua berita tersebut yaitu pada keseriusan KPK dalam menanggapi kasus ini. Pada <i>Republika.co.id</i> masih dalam tahap mempelajari kembali, sedangkan pada <i>Tempo.co</i> sudah menandakan keseriusan dari KPK menangani kasus ini. Pada perangkat <i>exemplaar</i> , <i>Republika.co.id</i> memberi alasan mengapa KPK harus mempelajari kembali dugaan kasus ini. Sedangkan ada <i>Tempo.co</i> menjelaskan kapan terungkapnya dugaan ini sehingga KPK sigap menanggapi. Dalam perangkat <i>depiction</i> , keduanya sama-sama memberi penjelasan
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Dalam berita ini catchphrases yang mendukung adalah pada frasa "...tidak akan langsung memanggil dan memeriksa..." yang menggambarkan bahwa KPK masih akan mempelajari dugaan dan belum mengambil tindakan yang serius.	Catchphrase yang mendukung terlihat pada frasa "...menindaklanjuti dugaan..." yang menggambarkan bahwa KPK mulai serius untuk menelusuri dugaan adanya uang yang disetorkan ke Amien Rais.	
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	Perangkat lain yang mendukung perspektif adalah <i>exemplaar</i> pada kalimat "...jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa." menjelaskan mengapa dugaan tersebut perlu dipelajari karena adanya fakta yang dikemukakan jaksa bahwa Amien Rais	<i>Exemplaar</i> yang membenarkan perspektif tampak pada kalimat "Dugaan adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu lalu." Menggambarkan terungkapnya dugaan Amien Rais sebagai salah satu pihak yang menerima uang Alkes tersebut. Tanggapan dari	



			adalah salah satu orang yang mendapat aliran dana.	KPK pun sigap dengan langsung menindaklanjuti dugaan yang dikemukakan jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Siti tersebut.	tentang fakta adanya dana yang diterima Amien Rais, namun <i>Tempo.co</i> lebih detail dalam penjabarannya.
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	Perangkat <i>framing</i> berikutnya yang mendukung perspektif yaitu <i>depiction</i> yang tampak pada kalimat “Penuntut umum menyebut Amien menerima uang sebanyak enam kali tahapan dengan total Rp 600 juta.” Menunjukkan fakta di persidangan bahwa benar adanya uang yang diterima Amien Rais.	<i>Depiction</i> yang mendukung perspektif tampak pada kalimat berikut “Berkas tuntutan jaksa mencatat dana disetor ke rekening Amien sebanyak enam kali, mulai 15 Januari 2007 hingga 2 November 2007. Masing-masing transaksi senilai Rp 100 juta.” Membuktikan bahwa ada fakta dimana benar adanya aliran dana yang disetor untuk Amien Rais sehingga perlu KPK perlu penelusuran lebih lanjut terhadap kasus ini.	Pada <i>visual images</i> keduanya sama-sama melamirkan gambar sosok Amien Rais, namun dengan latar tempat dan tujuan yang berbeda. Pada <i>Republika.co.id</i> relevan karena perihai tanggap dari Amien Rais terhadap kasus yang membawa namanya. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> merupakan foto Amien Rais dalam hal kunjungan. Selanjutnya yaitu perangkat
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Gambar yang disisipkan untuk mendukung bingkai sangat relevan yakni gambar Mantan Ketum PAN Amien Rais yang menyampaikan keterangan pers untuk menanggapi soal dana senilai Rp 600 juta yang diduga mengalir ke dirinya, di kediamannya di Gandaria, Jakarta Selatan.	 Foto yang disisipkan kurang relevan, karena justru tidak ada kaitannya foto dengan berita yang ditulis yakni gambar Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mendatangi kediaman pendiri Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri,”	perangkat penalaran. Perangkat penalaran pertama yaitu <i>roots</i> . Dalam <i>roots</i> , <i>Republika.co.id</i> mengungkapkan keterkaitan Amien Rais dengan tersangka Siti Fadilah, sedangkan <i>Tempo.co</i> mengungkapkan kronologi yang membuat nama Amien Rais ikut masuk dalam kasus ini. Dalam klaim moral, keduanya menuliskan hal yang berbeda, pada <i>Republika.co.id</i> menjelaskan bahwa
		Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	KPK tidak semata-mata memutuskan seseorang sebagai tersangka, tentu harus memiliki banyak bukti fakta. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> menjelaskan
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	<i>Roots</i> terlihat dalam kalimat “Pada sidang tuntutan kasus pengadaan alkes dengan terdakwa Siti pada Rabu (31/5) kemarin, jaksa menyebut Amien sebagai salah satu	<i>Roots</i> atau sebab-akibat yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat “...dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlaini,	

			<p>pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.” Adanya kaitan antara Siti tersangka kasus korupsi yang telah dipersidangkan yang membuat Amien ikut terseret kasus ini.</p>	<p>Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). "Selanjutnya, Nuki Syahrin, selaku Ketua Yayasan SBF, memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa” dari kronologi ini dapat dikaitkan dengan terseratnya Amien Rais yang didakwa juga mendapat aliran dana ini. Modus korupsi pun juga kian berkembang, seperti dengan cara memindahbukukan rekening.</p>	<p>tanggapan Amien Rais atas tuduhan kepadanya tersebut. Untuk perangkat penalaran efek, keduanya sangat berbeda.</p> <p><i>Republika.co.id</i> memberi efek kepada masyarakat agar tidak mudah pendapat buruk jika kebenaran penetapan terduga jika belum ada keputusan dari pihak berwenang. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> efek diberikan kepada KPK untuk lebih jeli dan tidak lengan dengan berbagai modus tersangka.</p>
		<p><i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)</p>	<p>Untuk memperjelas bingkai terdapat pula penjelasan pada perangkat <i>exemplaar</i> untuk membenarkan perspektif yaitu pada kalimat “JuruBicara KPK Febri mengatakan bakal mempelajari terlebih dulu seluruh fakta yang terungkap di persidangan.” Mengapa dugaan tersebut masih dipelajari, karena KPK tentu harus meninjau kembail fakta-fakta yang ada.</p>	<p>“Amien justru berencana datang ke KPK, Senin mendatang, untuk memberikan sejumlah data kasus korupsi besar yang melibatkan dua tokoh nasional dan kini belum ditangani.” Menunjukkan adanya tanggapan yang baik dari Amien Rais mengenai dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya.</p>	
		<p><i>Consequences</i> (efek)</p>	<p>Efek yang tampak dari bingkai berita ini kepada masyarakat bahwa dalam mengungkap kebenaran sebuah kasus kita juga harus mendengarkan keterangan yang akan terdakwa berikan, karena hal tersebut bisa saja memengaruhi langkah yang akan KPK ambil selanjutnya. Apakah keterangan terdakwa</p>	<p><i>Consequemces</i> atau efek yang timbul dari bingkai yang dibangun yaitu kepada KPK untuk waspada dan jeli terhadap berbagai macam modus tindak korupsi. Adanya niat baik dari terduga belum tentu menjadi niat yang benar-benar baik karena bisa saja memungkinkan hal tersebut adalah upaya agar meringankan dugaan yang dituduhkan.</p>	

			benar adanya atau hanya alibi. Hal tersebut tergambar dalam ungkapan "kita perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan,"		
--	--	--	---	--	--

4. 16 Juni 2017



Judul Berita		Framing Devices (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah	Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	Pertama yaitu perangkat <i>framing</i> . Dalam metafora, keduanya tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Perangkat <i>framing</i> kedua yaitu <i>catchphrase</i> . Keduanya sama-sama memperlihatkan vonis yang dijatuhkan oleh KPK adalah sebagai bentuk keseriusan KPK menangani kasus ini. Pada <i>exemplaar</i> , keduanya sama-sama membenarkan divonisnya Siti Supari ini perihal korupsi pengadaan Alkes. Namun <i>Tempo.co</i> lebih memberi penjabaran besarnya kerugian atas kasus Alkes ini. Pada perangkat <i>depiction</i> , keduanya juga menuliskan sudut yang berbeda. <i>Republika.co.id</i> menuliskan tanggapannya
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	<i>Catchphrase</i> tampak pada kalimat "Majelis Hakim memvonis..." benar adanya bahwa kasus korupsi Alkes ini sudah menemui babak akhir dengan dijatuhkannya vonis untuk Siti Fadilah.	<i>Catchphrase</i> yang mendukung bingkain tampak pada kalimat "...menjatuhkan vonis..." memperlihatkan penanganan kasus ini serius sehingga cepat terselesaikan dan mengakhirinya dengan memberikan hukuman terhadap Siti Fadilah	
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	Pembenaran perspektif yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat "Majelis Hakim memvonis empat tahun penjara terdakwa pengadaan alat kesehatan Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari." benar adanya divonisnya Siti Fadilaah atas kasus yang menyeretnya yaitu korupsi Alkes. Siti Supari terbukti bersalah atas korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut meskipun sampai kini	<i>Exemplaar</i> yang mendukung bingkai yang dibangun "Mejelis hakim meyakini Siti telah menerima duit senilai total Rp 1,9 miliar." Menjelaskan benar adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Siti Fadilah dengan objek pengadaan alat kesehatan. Kerugian yang diakibatkan cukup besar yaitu RP 1,9 miliar.	

			Siti belum mengakuinya.		terhadap vonis untuknya.
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> tampak pada kalimat “ia mengaku kecewa karena menurutnya fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.” tampak kekecewaan dari Siti akan fakta di persidangan yang tidak dipakai. meskipun semikian, Siti sudah terbukti bersalah dan seharusnya tidak mengelak lagi.	<i>Depiction</i> tampak pada kalimat “...duit tersebut diyakini sebagai bagian dari suap pengadaan alat kesehatan karena perusahaan tersebut terlibat dalam pengadaan.” Tindakan menghalalkan segala cara seperti menerima suap dari pengadaan alat kesehatan dijadikan alternatif bagi Siti Fadilah untuk memperoleh uang.	Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> menjelaskan mengenai modus yang dilakukan Siti Supari hingga namanya ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya yaitu perangkat penalaran. Dalam <i>roots</i> , <i>Republika.co.id</i> lebih menekankan kepada indikasi yang timbul karena kasus sebelumnya yang juga menyeret nama Siti Supari. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> menjelaskan peristiwa yang menyebabkan Siti Supari terungkap menjadi tersangka dalam kasus korupsi Alkes. Berikutnya yaitu Klaim moral. Dalam klaim moral, keduanya menyerukan hal yang senada. Yaitu tanggapan dari Siti Supari yang kurang menghormati keputusan yang sudah dijatuhkan kepadanya. Pada perangkat penalaran efek, <i>Republika.co.id</i> lebih menekankan efek kepada tersangka agar menghormati kepuasan hakim. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> efek diberikan untuk KPK agar lebih tegas terhadap terdakwa mengingat tanggapan terdakwa yang tidak
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Foto yang dilampirkan sudah relevan, yaitu foto saat Siti Fadilah tengah menjalani persidangan.	 Foto yang dilampirkan sudah relevan yaitu foto Siti Fadilah yang sedang menjalani persidangan.	
		<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	<i>Roots</i> tampak pada kalimat “Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima gratifikasi.” kejahatan yang dilakukan Siti Fadilah tidak hanya sebelumnya korupsi dari dana pengadaan alat kesehatan, tetapi juga menerima gratifikasi. Seakan belum menemui jera sebelum diberi hukuman.	“Siti telah terbukti melakukan penunjukan langsung terhadap PT Indofarma untuk pengadaan alat kesehatan <i>buffer stock</i> .” Vonis yang dijatuhkan kepada Siti Fadilah adalah akibat dari tindakannya yang secara langsung menunjuk PT yang menyokong pengadaan alat kesehatan. Hal tersebut berlanjut pada tindak korupsi yang dilakukannya.	
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “Ia menyebut apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negara tetapi fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.” dari perkataan	Klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “Siti berkukuh tidak merasa bersalah dalam pengadaan alat kesehatan saat ia menjabat,” keputusan hakim seharusnya sudah menjadi pembelajaran	

			Siti tersebut menggambarkan sikap mengelak dan belum tunduk dengan hukum. Seharusnya bila memang sudah tunduk terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya, tidak ada sikap mengkritik ataupun tidak merasa bersalah seperti perkataan Siti Fadilah tersebut.	bagi terdakwa. Sikap yang masih menyangkal seperti ini seakan tidak menghormati putusan dari hakim dan menggambarkan tidak ada rasa jera.	menghormati keputusan hakim.
		<i>Consequences</i> (efek)	Efek yang didapat dari bingkai yang dibangun adalah efek bagi terdakwa agar lebih menghormati keputusan hakim dan tidak membuat opini yang berlebihan kepada publik.	Efek yang didapat yaitu kepada KPK agar lebih tegas terhadap terdakwa, karena tidak adanya rasa bersalah yang ditunjukkan oleh terdakwa.	

5. 5 Agustus 2017



Judul Berita		<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101	Puspom TNI Cari Inisiator Utama Kasus Korupsi Heli AW 101	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	Perangkat pertama yaitu perangkat <i>framing</i> . yang pertama yaitu metafora, berita pada <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Perangkat <i>framing</i> selanjutnya yaitu <i>catchphrase</i> . Ksdua media ini mengungkapkan dari sisi yang berbeda. Pada <i>Republika.co.id</i> tampak jelas tentang komitmen dari TNI. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> lebih menonjolkan pada keseriusan TNI menangani kasus ini. Selanjutnya yaitu <i>exemplaar</i> , keduanya
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Perangkat <i>catchphrase</i> yang mendukung perspektif tampak pada frasa “Seluruh aparat pengawasan dan penegakkan hukum di lingkungan TNI berkomitmen...”, artinya TNI tidak menganggap remeh kasus ini. Mereka akan berusaha untuk mengungkap kasus-kasus dari oknum yang ada di TNI.	Kata atau frasa yang mendukung perspektif yang dibentuk yaitu “terus menyidik” mrnggambarkan bahwa TNI serius menangani kasus ini.	
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	Perangkat <i>framing</i> yang membenarkan perspektif terdapat	Penggambaran <i>exemplaar</i> yang membenarkan perspektif	

			pada kalimat "POM TNI hingga saat ini telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland AW-101." Mengapa TNI terus mendalami dan berjanji untuk transparan, karena sudah terungkapnya kasus korupsi yang tentunya TNI dan membuat citra tidak baik pada TNI.	tampak pada kalimat "Pada Jumat 4 Agustus 2017 kemarin, Puspom TNI telah menetapkan satu tersangka baru, yaitu Marsekal Muda SB." bahwa kasus ini memang harus menjadi perhatian bagi TNI dan terus didalami agar terungkap siapa pelaku utama dari kasus korupsi ini.	sama-sama menerangkan tentang perlunya perhatian lebih dari TNI untuk mendalami kasus ini agar cepat terselesaikan dan mengungkap tersangka utama kasus korupsi helikopter ini. Perangkat selanjutnya yakni <i>depiction</i> , yang menjadi perbedaan adalah bila di <i>Tempo.co</i> sudah ada tanda-tanda menemui titik terang mengungkap pelaku utama korupsi. Sedangkan pada <i>Republika.co.id</i> masih pada perlunya pengusutan karena belum ditemukannya tersangka utama. Selanjutnya yaitu <i>visual images</i> . Keduanya sama-sama melampirkan gambar helikopter yang menjadi pembahasan utama dalam korupsi ini. Kemudian perangkat penalaran, perangkat <i>roots</i> pada kedua media cukup berbeda. Dalam <i>Republika.co.id</i> menerangkan pada keterkaitan antara tersangka baru yang ternyata masih satu kelompok dengan tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan TNI tidak lain adalah cara lain untuk mendapatkan lebih banyak bukti dalam menetapkan tersangka. Perangkat selanjutnya yaitu klaim moral, dari kedua media ini sama-sama menunjukkan kerja keras dari TI untuk menuntaskan kasus korupsi helikopter tersebut. Namun dalam <i>Tempo.co</i> terdapat penjelasan bahwa usaha yang telah dilakukan TNI membuahkan hasil. Kemudian pada perangkat
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai berita ini terdapat pada kalimat "Dodik mengumumkan tersangka baru dalam kasus tersebut" bila TNI harus terus mengusut kasus korupsi pembelian pesawat ini karena adanya tersangka-tersebut yang belum terungkap.	"Menurut Dodik, SB adalah bagian dari inisiator terlaksananya pengadaan enam unit helikopter yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 224 miliar." TNI sudah mulai menemukan titik terang mengungkap siapa pelaku utama dari kasus korupsi ini dengan keterangan yang didapat melalui tersangka lain yang merupakan bagian dari inisiator.	
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Perangkat gambar yang mendukung bingkai sudah relevan karena menunjukkan foto dari pesawat Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi.	 Gambar yang digunakan untuk mendukung perangkat bingkai sudah relevan yakni foto pesawat Agusta Westland (AW) 101 yang terparkir dan diberi garis polisi.	
		Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	Perangkat <i>roots</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat "Penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang	"Puspom TNI menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga lain." perlu adanya mengambil jalan lain juga seperti kerjasama dengan BPK untuk menambah fakta-fakta yang mendukung penelusuran terhadap inisiator utama.	

			telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.”penetapan tersangka baru masih satu kelompok dengan tersangka lama		efek, efek yang didapat dari kedua media tersebut adalah untuk masyarakat agar tidak perlu khawatir dan mempercayai kerja keras TNI dan menuntaskan kasus korupsi helikopter ini.
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas.” menunjukkan usaha keras TNI untuk menuntaskan kasus ini adalah hal yang patut dicontoh.	Klaim moral yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “Dodik menyatakan penyidiknyanya sudah mulai melihat 'bayang-bayang' dari inisiator utama dari kasus ini.” Usaha keras TNI yang membuahkan hasil dengan ditemukannya bagian dari inisaior utama.	
		<i>Consequences</i> (efek)	Efek yang timbul dari perangkat yang mendukung bingkai yakni kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir dan menyerahkan kepercayaan pada TNI untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Dan juga TNI yang berjanji untuk terbuka memberikan informasi mengenai perkembangan kasus.	<i>Consequences</i> yang ditimbulkan dari bingkai kepada khalayak umum bahwa pada faktanya TNI tidak asal dalam penetapan tersangka. Mereka juga harus mempunyai bukti yang kuat dan fakta yang mendukung secara sah untuk menetapkan tersangka. Hal ini tampak pada kalimat “kita tetap menempatkan tersangka lainnya secara sah,”	

6. 7 Agustus 2017



Judul Berita		<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				
Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong	Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	Pada berita kedelapan ini, perangkat <i>framing</i> pertama yaitu metafora, keduanya tidak menggunakan metafora dalam berita yang disajikan. Kemudian pada <i>catchphrase</i> , <i>Republika.co.id</i> menyampaikan
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Dalam kalimat “...melimpahkan berkas...” sudah memasuki tahapan lebih lanjut dari kasus ini. Artinya KPK benar-benar serius	Dalam kalimat “...bakal segera diadili...” menunjukkan kasus ini sudah hampir menemui titik terang dengan ditetapkannya hukuman terhadap tersangka.	

			memproses kasus yang menjerat Andi Narogong.		keseriusan pihak KPK dalam menangani kasus ini sehingga kasus ini sudah pada tahap pemberian berkas kepada pihak pengadilan. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> , bahkan sudah sampai tahap tersangka yang akan segera diadili. Kemudian pada <i>exemplaar</i> <i>Republika.co.id</i> membahas tentang titik terang yang telah didapat KPK untuk mengadili tersangka. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> , lebih membahas tentang peran dari Andi Narogong. Perangkat selanjutnya yaitu <i>depiction</i> , perbedaan cukup terlihat karena <i>Republika.co.id</i> membahas mengenai perlunya pengawalan masyarakat sebagai dukungan terhadap kerja KPK. Sedangkan <i>Tempo.co</i> lebih menyinggung tentang keterkaitan hubungan erat antara Andi Narogong dengan Setya Novanto mempermudah tindak korupsi. Perangkat <i>framing</i> terakhir yaitu <i>visual images</i> , keduanya melampirkan gambar dengan latar yang berbeda namun masih relevan dengan bingkai. Yang kedua yaitu perangkat penalaran. Dalam perangkat penalaran <i>roots</i> , <i>Tempo.co</i> tidak menambahkan <i>roots</i> dalam berita yang disajikan. Sedangkan pada <i>Republika.co.id</i> lebih membahas pada sisi status peristiwa ini merupakan kelanjutan dari pengusutan kasus korupsi KTP elektronik. Selanjutnya yaitu klaim moral, kedua media ini
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	Pembenaran untuk mendukung bigkai yang dibangun tampak pada kalimat “Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus KTP-e. Andi adalah terdakwa ketiga yang kami ajukan ke persidangan.” menunjukkan titik terang yang mulai didapat KPK akan ditetapkannya hukuman bagi tersangka Andi Narogong.	<i>Exemplaar</i> yang digunakan untuk pembenaran perspektif tampak pada kalimat “Andi adalah terdakwa ketiga yang diajukan ke persidangan. Andi diduga orang yang mengatur proyek <i>e-KTP</i> , mulai tahap pembahasan anggaran, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pengadaan.” Menunjukkan peran dari Andi yang sangat penting dalam kasus korupsi yang sangat besar ini.	
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai yang dibangun terlihat pada kalimat “...pengawalan publik juga sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan...” keseriusan KPK dalam menangani kasus ini harus didukung oleh publik juga karena kasus ini menyangkut kerugian orang banyak.	Dalam <i>depiction</i> berikut memperlihatkan indikasi kata yang tersirat oleh bingkai yang ingin mengungkapkan bahwa hubungan teman dekat tentu akan mempermudah rencana dalam tindak kejahatan korupsi. Hal tersebut terlihat dalam kalimat “Beberapa saksi mengatakan Andi adalah teman dekat Setya Novanto”	
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Gambar yang dilampirkan sudah relevan yaitu gambar juru bicara KPK yang menyampaikan hal terkait kasus ini.	 Gambar yang dilampirkan sudah relevan yakni foto ketika Andi Narogong menjalani persidangan atas kasus e-KTP ini.	
		Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	Dalam kasus ini babak sebelumnya sudah ditetapkan pada 23 Maret. Dan hal ini adalah keberlanjutandari babak sebelumnya.	Tidak ditemukan dalam artikel	

			Tampak pada kalimat berikut “Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 23 Maret lalu.”		mengambil sudut yang berbeda, <i>Republika.co.id</i> mengambil dari sisi hukuman yang setimpal yang diberikan kepada tersangka. Sedangkan <i>Tempo.co</i> mengambil pada sisi modus kejahatan yang dilakukan tersangka. Perangkat penalaran yang terakhir yaitu efek. Kedua media ini memberi efek yang sama yaitu efek kepada masyarakat untuk memberi dukungan kepada KPK dan ikut memantau berjalannya proses hukum kasus korupsi KTP elektronik.
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Tindakan semacam ini memang seharusnya diberi hukuman yang setimpal agar tersangka jera. Dapat dilihat dari kalimat “KPK menjerat Andi Narogong dengan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU N 31 Tahun 1999”	Klaim moral yang mendukung bingkai adalah fakta bahwa tindakan korupsi sangatlah tercela dan merugikan orang banyak. Tidak hanya itu, memperkaya diri sendiri dengan carayang tidak halal tidak akan pernah berakhir baik dan bila terungkap akan ada hukuman yang sebanding. Hal tersebut tampak pada kalimat “Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.	
		<i>Consequences</i> (efek)	Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun untuk masyarakat agar memberi apresiasi pada KPK yang telah menangani kasus ini dengan profesional.	Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun adalah untuk masyarakat agar ikut mendukung dan memantau terhadap berjalannya penuntasan kasus ini. Karena kasus ini menyangkut kerugian orang satu negara. Sehingga kepercayaan dari masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut terlihat dalam kalimat “Pengawasan publik sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan.”	

7. 4 september 2017

Judul Berita		<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framming)	Analisis <i>Republika.co.id</i>	Analisis <i>Tempo.co</i>	Analisis
<i>Republika.co.id</i>	<i>Tempo.co</i>				
Pengacara Gubernur	Pengacara Pertanyakan	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	Perangkat <i>framing</i> pertama yaitu metafira. Kedua media ini tidak



Papua Minta Penyidik Perlihatkan Bukti	Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua	<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Kalimat "...meminta diperlihatkan bukti..." menunjukkan keseriusan pengacara Gubernur Papua dalam permintaannya untuk diperlihatkan bukti atas kasus yang menimpa kliennya.	Kalimat "...mempertanyakan kerugian negara..." menunjukkan kesungguhan pengacara perihal besarnya kerugian akibat kasus korupsi ini.	menambahkan metafora dalam kedua berita yang disajikan ini. Kemudian <i>catcphrase</i> , kedua media ini sebenarnya menyampaikan hal yang senada, namun memiliki kata yang berbda yakni "meminta diperlihatkan bukti" pada berita <i>Republika.co.id</i> dan "mempertanyakan kerugian negara" pada berita <i>Tempo.co</i> . perangkat <i>framing</i> selanjutnya yaitu <i>exemplaar</i> . Kedua media ini sama-sama membahas dari sisi penyebab pengacara mempertanyakan bukti yang membuat kliennya diperiksa lebih lanjut atas kasus korupsi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi. Selanjutnya yaitu <i>depiction</i> . pada <i>depiction</i> keduanya memiliki sisi yang berbeda. <i>Republika.co.id</i> menyinggung mengenai buiti yang tidak ditunjukkan penyidik. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> menyinggung tentang kasus ini berakaitan dengan dana pendidikan. Perangkat <i>framing</i> selanjutnya yaitu <i>visual images</i> . Foto yang dilampirkan keduanya berbeda latar. <i>Republika.co.id</i> melampirkan fot Gubernur Papua sedangkan <i>Tempo.co</i> gambar yang memiliki makna tersirat tentang tindak koru[si atau suap. Perangkat yang kedua yaitu perangkat penalaran. Dalam <i>roots</i> , kedua media ini menyampaikan hal yang senada yaitu peristiwa yang menyebabkan pengacara
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	<i>Exemplaar</i> yang menjelaskan bingkai tampak pada kalimat "Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Diperiksa sejak pagi tadi, Lukas mempertanyakan cara penyidik menaikkan status kasus ke tingkat penyidikan." Bukti tersebut dipertanyakan karena status kasus ini telah naik menjadi penyidikan.	<i>Exemplaar</i> yang menjelaskan bingkai tampak pada kalimat "Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe sehubungan dengan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua tahun 2014-2017." Hal yang membuat pengacara Gubernur Papua mempertanyakan kerugian negara akibat korupsi kliennya tersebut.	
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat "Lukas datang dan meminta diperlihatkan bukti adanya penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua namun tidak diizinkan." penyidik tentu mempunyai alasan untuk merahasiakan bukti tersebut.	<i>Depiction</i> pendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat "Polisi menduga adanya penyelewengan dana beasiswa pelajar Papua." Kasus ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut dana pendidikan. Apalagi yang dikorupsi adalah dana beasiswa.	
		<i>Visual Images</i> (perangkat gambar)	 Gambar yang dilampirkan sudah relevan, yaitu foto dari Gubernur Papua yang terjerat kasus korupsi.	 Relevan, terdapat gambar tangan yang mengisyaratkan sebuah tindakan menyuap.	

		Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)	Analisis	Analisis	Gubernur Papua mempertanyakan buktiyakni karena proses pengusuta yang terbalik. Selanjutnya yaitu klami moral. Dalam berita daring <i>Republika.co.id</i> tidak ditemukan klaim moral. sedangkan pada <i>Tempo.co</i> klaim moral membahas dari sisi ketiak etisan pertanyaan yang diajuka pengacara Gubernur Papua mengingat kasus ini menyangkut dana pendidikan. Perangkat penlaran yang terakhir yaitu efek. Kedua media sama-sama memberi efek untuk pihak berwenang seperti Tipikor dan penyidik untuk sesegera mungkin mengkonfirmasi pertanyaan yang diajukan pengacara Gubernur Papua agar menjalani proses hukum sesuai ketentuan.
		<i>Roots</i> (sebab-akibat)	<i>Roots</i> tampak pada kalimat “Mestinya hal itu jauh dilakukan sebelumnya, sebelum mengusut kasus ini harus didapatkan dulu kerugian negaranya.” Timbulnya pertanyaan dari pengacara Gubernur Papua ini tidak lain karena proses pengusutan yang menurutya terbalik.	Pertanyaan dari pengacara tersebut disebabkan oleh argumennya tentang dua hal yang mendasari sebuah putusan yaitu tangkap tangan juga harus adanya bukti kerugian. Hal ini tampak pada kalimat“Dalam putusan itu, kata dia, salah satu isinya menyatakan kasus korupsi selain dengan tangkap tangan harus juga ada bukti kerugian negaranya.”	
		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Tidak ditemukan	Klaim moral daribingkai yang dibangun tampak pada kalimat “jadi kami melihat perkara ini biasa saja tidak ada istimewanya” pertanyaan tersebut tentu sangat tidak etis diucapkan melihat kasus ini menyangkut beasiswa pelajar yang harusnya di tangani dengan serius.	
		<i>Consequences</i> (efek)	Efek yang timbul dari bingkai yang dibangun yaitu efek kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim untuk menanggapi pertanyaan dari pengacara Gubernur Papua tersebut dan memberi penjelasan agar pengacara tersebut tidak memberi opini yang berlebihan.	Kepada penyidik, agar segera mengkonfirmasi kerugian negara yang dikaibatkan kasus ini. Agar segera ditindaklanjuti dan dijadikan perhatian agar tersangka dan kuasa hukumnya tunduk terhadap hukum yang ada.	

8. 3 oktober 2017

Judul Berita		Framing Devices (Perangkat Framming)	Analisis Republika.co.id	Analisis Tempo.co	Analisis
Republika.co.id	Tempo.co				

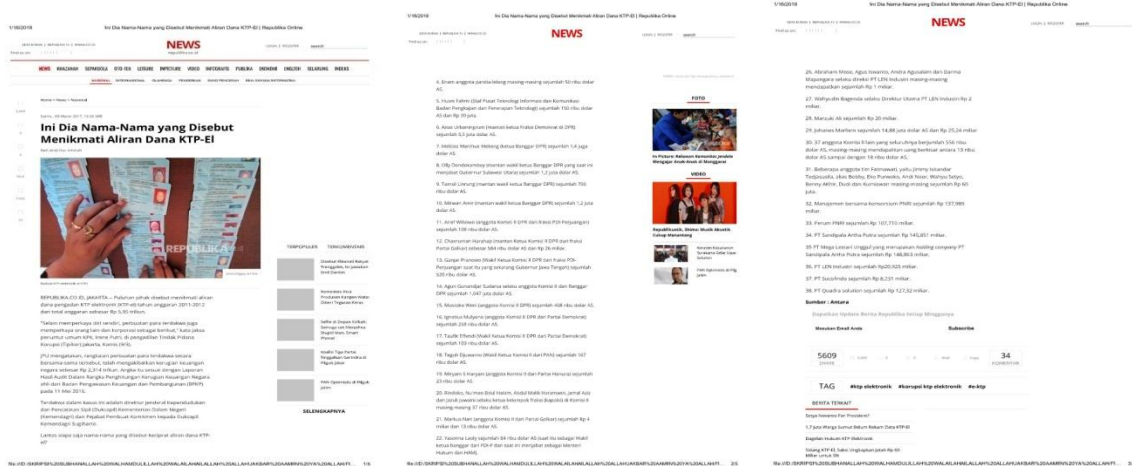
KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka	Lebih Besar dari E-KTP, Korupsi Konawe Utara Rugikan Negara 2,7 T	<i>Methapors</i> (perumpamaan)	Tidak ditemukan dalam artikel	Tidak ditemukan dalam artikel	Perangkat yang pertama yaitu perangkat <i>framing</i> . untuk metafora, <i>Republika.co.id</i> dan <i>Tempo.co</i> tidak menambahkan metafora dalam berita yang disajikan. Selanjutnya yaitu <i>catchphrase</i> , <i>Republika.co.id</i> membahas dari sisi Aswad yang tertangkap. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> membahas dari sisi kerugian negara. Selanjutnya yaitu <i>exemplaar</i> , <i>Republika.co.id</i> mengambil dari sisi pembenaran adanya korupsi yang dilakukan Aswad. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> membahas dari sisi berapa nominal kerugian yang ditimbulkan. Perangkat <i>framing</i> selanjutnya yakni <i>depiction</i> . <i>Republika.co.id</i> mengambil dari sisi jumlah nominal kerugian akibat korupsi yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> membahas dari sisi tindakan yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara sehingga ia terjatuh kasus korupsi ini. Selanjutnya yaitu <i>visual images</i> . Kedua media sama-sama melampirkan foto Saut Situmorang yang memberi keterangan mengenai kasus korupsi. Perangkat kedua yaitu perangkat penalaran. Dalam <i>roots</i> , <i>Republika.co.id</i> membahas dari sisi hukuman yang setimpal yang diberikan kepada tersangka. Sedangkan pada <i>Tempo.co</i> membahas dari sisi. Sikap tersangka yang
		<i>Catchphrases</i> (jargon atau slogan)	Perangkat <i>framing</i> , <i>catchphrase</i> yang mendukung tampak pada “Aswad terjatuh...” yang menjelaskan bahwa kasus korupsi bisa terjadi pada siapapun. Sekalipun seorang mantan Bupati.	<i>Catchphrase</i> yang mendukung perspektif adalah “...kerugian negara...” bahwa kasus korupsi ini tidak sepele karena kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang sangat besar.	
		<i>Exemplaar</i> (pembenaran perspektif)	<i>Exemplaar</i> yang mendukung perspektif dalam bingkai terlihat pada kalimat “Aswad terjatuh kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan dan eksploitasi serta izin usaha produksi operasi produksi nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dari tahun 2007 sampai 2014. “ menjelaskan benarnya korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Konawe Utara dan dalam jumlah yang besar berkaitan dengan pertambangan.	<i>Exemplaar</i> yang memperjelas bingkai yang dibangun untuk membentuk perspektif tampak pada kalimat “Saut mengatakan kasus yang melibatkan Aswad ini menyebabkan kerugian negara yang sebanding dengan kasus lain, seperti kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan kerugian Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI Rp 3,7 triliun.” Besarnya kerugian yang ditanggung negara hampir sama besarnya dengan kerugian akibat korupsi KTP elektronik. Kasus ini bukanlah sebuah kasus yang remeh dilihat dari nominalnya. Apalagi hanya dilakukan oleh satu orang tersangka.	
		<i>Depiction</i> (leksikon melabeli sesuatu)	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai tampak pada kalimat “Aswad, lanjut Saut, diduga menerima suap Rp 13 miliar. Suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan.” adanya indikasi bukti bahwa Aswad mantan Bupati Konawe Utara ini menerima uang sogokan dari pengusaha tambang.	<i>Depiction</i> yang mendukung bingkai yang dibangun tampak pada kalimat “Ia diduga mencabut kuasa pertambangan yang masih dalam pengelolaan PT Antam secara sepihak, kemudian memberikan izin eksplorasi tambang kepada delapan perusahaan lain dan menerbitkan 30 kuasa pertambangan eksplorasi lainnya,” menganggap benar segala hal demi mendapatkan uang adalah cara yang tidak	

				<p>tepat. Apalagi perihal pemberian izin secara sepihak ditambah lagi dengan menerima suap hingga mengakibatkan kerugian besar bagi negara.</p>	<p>tidak jera, bahkan juga pernah tersandung kasus sebelumnya. Selanjutnya yaitu klaim moral, kedua media sama-sama menyinggung tentang perbuatan yang dilakukan tersangka yang tidak patut dicontoh apalagi tersangka adalah seorang Bupati pada waktu sebelumnya. Perangkat penalaran yang terakhir yaitu efek, efek yang didapa dari kedua berita dari daring berbeda tersebut adalah untuk KPK agar tidak menganggap enteng kasus ini mengingat nominal kerugian yang ditimbulkan, juga agar tersangka cepat diberi hukuman yang sepadan.</p>
		<p><i>Visual Images</i> (perangkat gambar)</p>	 <p>Gambar yang ditampilkan dalam berita ini kurang relevan, gambar tersebut memang foto Saut Situmorang, namun bukan dalam pemberian keterangan untuk kasus ini. Melainkan untuk memberikan keterangan kepada wartawan mengenai audisi Festival Lagu Suara Anti-korupsi.</p>	 <p>Gambar yang ditampilkan untuk mendukung bingkai sudah relevan, karena ada kasus korupsi pada pertambangan ini sama halnya dengan kasus KTP elektronik yang mengakibatkan kerugian yg besar. Maka foto yang dicantumkan yakni Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK.</p>	
		<p>Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)</p>	<p>Analisis</p>	<p>Analisis</p>	
		<p><i>Roots</i> (sebab-akibat)</p>	<p>Peristiwa yang menyebabkan munculnya peristiwa lain atau yang disebut <i>roots</i> atau sebab-akibat tampak pada kalimat “Aswad disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “ Akibat dari kejahatan yang dilakukan Aswat ini dia mendapat ancaman pidana yang sesuai.</p>	<p><i>Roots</i> atau sebab-akibat yang menandai satu peristiwa dengan peristiwa yang lain tampak pada kalimat “Aswad Sulaiman juga sempat tersandung kasus dugaan korupsi lain, yaitu korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara pada 2010-2011.” Kejahatan yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara ini tidak hanya sekali. Sebelumnya juga telah mendapat catatan hukum dari kasus korupsi juga. Seakan tidak jera.</p>	

		<i>Appeals to Principles</i> (klaim moral)	Klaim moral yang mendukung bingkai yakni perbuatan seorang mantan bupati yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti dengan menerima suap dengan iming-iming memberikan izin pertambangan. Hal tersebut tampak pada kalimat berikut "...suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan"	Klaim moral yang mendukung bingkai agar pembaca memiliki perspektif yang sama tampak pada kalimat "Aswad, kata Saut, telah menguntungkan diri sendiri dengan memberikan perizinan usaha tambang nikel di Kabupaten Konawe secara sepihak." Perbuatan korupsi tentu tidak ada yang menganggapnya sebagai perbuatan yang baik. Selain menguntungkan diri sendiri juga pasti merugikan orang lain dan sangat tidak berbudi.	
		<i>Consequences</i> (efek)	Efek yang didapat dari bingkai yaitu kepada KPK agar tersangka kasus ini diberi hukuman yang sepadan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya.	Efek yang timbul dari bingkai ini untuk KPK. Dengan nominal sebesar itu tentu bukan kasus yang remeh. Bahkan hampir sama nominalnya dengan kasus KTP elektronik.	

A. BeritaRepublika.co.id

1. Berita 1



Ini Dia Nama-Nama yang Disebut Menikmati Aliran Dana KTP-El

Red: Andi Nur Aminah

Kamis , 09 Maret 2017, 13:26 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengaduan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun.

"Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut," kata jaksa penuntut umum KPK, Irene Putri, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3).

JPU mengatakan, rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,314 triliun. Angka itu sesuai dengan

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 11 Mei 2016.

Terdakwa dalam kasus ini adalah direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen kepada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Lantas siapa saja nama-nama yang disebut keciprat aliran dana KTP-el?

1. Gamawan Fauzi (mantan mendagri) sejumlah 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta.
2. Diah Anggraini (mantan sekjen Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dolar AS dan Rp 22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan (ketua panitia pengadaan) sebesar 615 ribu dolar AS dan Rp 25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing sejumlah 50 ribu dolar AS.
5. Husni Fahmi (Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) sejumlah 150 ribu dolar AS dan Rp 30 juta.
6. Anas Urbaningrum (mantan ketua Fraksi Demokrat di DPR) sejumlah 5,5 juta dolar AS.
7. Melcias Marchus Mekeng (ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juga dolar AS.
8. Olly Dondokambey (mantan wakil ketua Banggar DPR yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara) sejumlah 1,2 juta dolar AS.
9. Tamsil Linrung (mantan wakil ketua Banggar DPR) sejumlah 700 ribu dolar AS.
10. Mirwan Amir (mantan wakil ketua Banggar DPR) sejumlah 1,2 juta dolar AS.
11. Arief Wibowo (anggota Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan) sejumlah 108 ribu dolar AS.

12. Chaeruman Harahap (mantan Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar) sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp 26 miliar.
13. Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan saat itu yang sekarang Gubernur Jawa Tengah) sejumlah 520 ribu dolar AS.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR sejumlah 1,047 juta dolar AS.
15. Mustoko Weni (anggota Komisi II DPR) sejumlah 408 ribu dolar AS.
16. Ignatius Mulyono (anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat) sejumlah 258 ribu dolar AS.
17. Taufik Effendi (Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat) sejumlah 103 ribu dolar AS.
18. Teguh Djuwarno (Wakil Ketua Komisi II dari PAN) sejumlah 167 ribu dolar AS.
19. Miryam S Haryani (anggota Komisi II dari Partai Hanura) sejumlah 23 ribu dolar AS.
20. Rindoko, Nu'man Bdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku ketua kelompok fraksi (kapolsi) di Komisi II masing-masing 37 ribu dolar AS.
21. Markus Nari (anggota Komisi II dari Partai Golkar) sejumlah Rp 4 miliar dan 13 ribu dolar AS.
22. Yasonna Laoly sejumlah 84 ribu dolar AS (saat itu sebagai Wakil ketua banggar dari PDI-P dan saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM).
23. Khatibul Umam Wiranu (anggota Komisi II dari fraksi Partai Demokrat) sejumlah 400 ribu dolar AS.
24. M Jafar Hapsah (mantan ketua Fraksi Partai Demokrat) sejumlah 100 ribu dolar AS.
25. Ade Komarudin (Sekretaris Fraksi Partai Golkar) sejumlah 100 ribu dolar AS.

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar.
28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah 14,88 juta dolar AS dan Rp 25,24 miliar
30. 37 anggota Komisi II lain yang seluruhnya berjumlah 556 ribu dolar AS, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara 13 ribu dolar AS sampai dengan 18 ribu dolar AS.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila, alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny AKhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137,989 miliar.
33. Perum PNRI sejumlah Rp 107,710 miliar.
34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145,851 miliar.
- 35 PT Mega Lestari Unggul yang merupakan *holding company* PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148,863 miliar.
36. PT LEN Industri sejumlah Rp20,925 miliar.
37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8,231 miliar.
38. PT Quadra solution sejumlah Rp 127,32 miliar.

Sumber : Antara

2. Berita 2



Badan Pemeriksa Keuangan | ANTARA/Andika Wahyu

BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK

| rep : Sapto Andika Candra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membenarkan kabar adanya staf audit instansi tersebut yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5) sore. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qasasi menyebutkan, berdasarkan informasi yang ia terima ada dua pegawai BPK ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Rinciannya, seorang adalah auditor utama III dan satu lagi adalah staf auditor. Namun ia meminta media untuk menunggu keterangan resmi dari KPK. "Kalau *you* tanya soal OTT KPK, benar. Ada staf kami yang ditangkap," kata Achsanul, Jumat (26/5).

Namun Achsanul mengaku belum mengetahui secara siapa dan atas kasus apa stafnya ditangkap KPK. Ia

BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK

| rep : Sapto Andika Candra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membenarkan kabar adanya staf audit instansi tersebut yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5) sore. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qasasi menyebutkan, berdasarkan informasi yang ia terima ada dua pegawai BPK ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Rinciannya, seorang adalah auditor utama III dan satu lagi adalah staf auditor. Namun ia meminta media untuk menunggu keterangan resmi dari KPK. "Kalau *you* tanya soal OTT KPK, benar. Ada staf kami yang ditangkap," kata Achsanul, Jumat (26/5).

Namun Achsanul mengaku belum mengetahui secara rinci siapa dan atas kasus apa stafnya ditangkap KPK. Ia menyebutkan, informasi yang diterima jajaran pimpinan BPK, keduanya terlibat dalam audit Kementerian Desa. Meski begitu ia menolak memberi keterangan lebih lanjut mengenai latar belakang penangkapan.

BPK, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada KPK. Ia justru meminta KPK mengusut tuntas temuan ini.

Achsanul menyebut, BPK siap membawa stafnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke sidang etik dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan. "BPK menyerahkan kepada KPK. Kami turuti temuannya seperti apa," katanya.

BPK Benarkan Dua Anggotanya Ditangkap KPK

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Angga Indrawan

Jumat , 26 Mei 2017, 21:25 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membenarkan kabar adanya staf audit instansi tersebut yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5) sore. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qasasi menyebutkan, berdasarkan informasi yang ia terima ada dua pegawai BPK ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Rinciannya, seorang adalah auditor utama III dan satu lagi adalah staf auditor. Namun ia meminta media untuk menunggu keterangan resmi dari KPK. "Kalau *you* tanya soal OTT KPK, benar. Ada staf kami yang ditangkap," kata Achsanul, Jumat (26/5).

Namun Achsanul mengaku belum mengetahui secara rinci siapa dan atas kasus apa stafnya ditangkap KPK. Ia menyebutkan, informasi yang diterima jajaran pimpinan BPK, keduanya terlibat dalam audit Kementerian Desa. Meski begitu ia menolak memberi keterangan lebih lanjut mengenai latar belakang penangkapan.

BPK, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada KPK. Ia justru meminta KPK mengusut tuntas temuan ini.

Achsanul menyebut, BPK siap membawa stafnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke sidang etik dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan. "BPK menyerahkan kepada KPK. Kami tunggu temuannya seperti apa," katanya.

3. Berita 3



Mantan Ketua Umum PAN Amien Rais menyampaikan keterangan pers untuk menanggapi soal dana senilai Rp 600 juta yang diduga mengalir ke dirinya, di kediamannya di Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6). | Republika/Umar Mukhtar

KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan langsung memanggil dan memeriksa mantan Ketua Umum PAN Amien Rais terkait kasus pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa Siti Fadilah Supari.

Juru Bicara KPK Febri mengatakan bakal mempelajari terlebih dulu seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Dia menyatakan poses persidangan pengadaan alkes dengan terdakwa Siti masih berjalan. Belum lagi setelah itu ada agenda putusan.

"Setelah tuntutan kemarin, tentu kita perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu



KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan langsung memanggil dan memeriksa mantan Ketua Umum PAN Amien Rais terkait kasus pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa Siti Fadilah Supari.

Juru Bicara KPK Febri mengatakan bakal mempelajari terlebih dulu seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Dia menyatakan poses persidangan pengadaan alkes dengan terdakwa Siti masih berjalan. Belum lagi setelah itu ada agenda putusan.

"Setelah tuntutan kemarin, tentu kita perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan," ujar dia saat dikonfirmasi, Jumat (2/6).

Pada sidang tuntutan kasus pengadaan alkes dengan terdakwa Siti pada Rabu (31/5) kemarin, jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.

Penuntut umum menyebut Amien menerima uang sebanyak enam kali tahapan dengan total Rp 600 juta. Menyidik kasus itu berdasarkan perhitungan BPK dan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar.

KPK Pelajari Dugaan Amien Terima Uang Alkes

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ratna Puspita

Republika/Umar Mukhtar

Jumat, 02 June 2017, 11:16 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan langsung memanggil dan memeriksa mantan Ketua Umum PAN Amien Rais terkait kasus pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa Siti Fadilah Supari.

Juru Bicara KPK Febri mengatakan bakal mempelajari terlebih dulu seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Dia menyatakan poses persidangan pengadaan alkes dengan terdakwa Siti masih berjalan. Belum lagi setelah itu ada agenda putusan.

"Setelah tuntutan kemarin, tentu kita perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa dan setelah itu ada agenda putusan," ujar dia saat dikonfirmasi, Jumat (2/5).

Pada sidang tuntutan kasus pengadaan alkes dengan terdakwa Siti pada Rabu (31/5) kemarin, jaksa menyebut Amien sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari terdakwa.

Penuntut umum menyebut Amien menerima uang sebanyak enam kali tahapan dengan total Rp 600 juta. KPK menyidik kasus itu berdasarkan perhitungan BPK adanya indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar.

4. Berita 4



Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Kata Siti Fadilah

Rep: Santi Sopia/ Red: Bilal Ramadhan

Jumat , 16 Juni 2017, 19:01 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim memvonis empat tahun penjara terdakwa pengadaan alat kesehatan Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Siti juga dikenakan denda Rp 200 juta, subsidi dua bulan kurungan.

Siti mengaku sudah menduga sejak awal terkait vonis nya tersebut. Tetapi ia mengaku kecewa karena menurutnya fakta persidangan tidak dipakai sama sekali.

"Ya memang yang menentukan hukuman ya mereka, mau enggak mau, ini Indonesia raya, saya sangat prihatin mudah-mudahan cepat dibenahi deh masalah hukum Indonesia korban nya kan banyak sekali kayak begini bukan memberantas korupsi ini namanya memberantas korupsi dengan korup koruptor data," kata Siti di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Siti, akan lain cerita kalau fakta persidangan dipakai. Ia menyebut apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negara tetapi fakta persidangan tidak dipakai sama sekali. Fakta persidangan yang dimaksud Siti yaitu berupa rekaman data. Siti mengaku sejauh ini belum terpikir akan mengajukan banding.

"Ini Indonesia raya biasanya begitu tuntutan vonisnya dua perempat atau dua pertiga, tapi saya sudah menduga dari awal tapi ini Indonesia raya, saya sangat shock dan kecewa, fakta persidangan kok gak dipakai," katanya.

Hakim Ketua sidang Ibnu Basuki Widodo saat membacakan amar putusan menyatakan Siti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menteri Kesehatan RI 2004-2009 itu juga dinyatakan menerima uang gratifikasi.

"Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima gratifikasi," kata Ibnu.

5. Berita 5



Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasang garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2). | Republika/ Pool/Widodo S Jusuf

TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

l rep : Dadang Kurnia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komando Pusat Polisi Militer TNI berjanji akan menangani kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland AW-101 secara transparan. Transparansi dalam penegakkan hukum tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

"Seluruh aparaturnya pengawasan dan penegakkan hukum di lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (5/8).

POM TNI hingga saat ini telah menetapkan lima orang

lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (5/8).

POM TNI hingga saat ini telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland AW-101. Itu setelah Dodik mengumumkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda SB.

"POM TNI telah menetapkan Marsda TNI S.B. sebagai tersangka dan peningkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," ucap Dodik.

Dodik menjelaskan, penetapan tersangka itu juga dibarengi dengan pengamanan barang bukti uang yang diamankan atau disita melalui pemblokiran rekening BRI dan Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp 139 miliar lebih.

Demikian juga penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini masih bersifat sementara, karena penyidik POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, profesional dan proporsional, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua, tambah Dodik.

TNI Janji Transparan Soal Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Hazliansyah



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komando Pusat Polisi Militer TNI berjanji akan menangani kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland AW-101 secara transparan. Transparansi dalam penegakkan hukum tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

"Seluruh aparaturnya pengawasan dan penegakkan hukum di lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (5/8).

POM TNI hingga saat ini telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland AW-101. Itu setelah Dodik mengumumkan tersangka

baru dalam kasus tersebut, yakni mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda SB.

"POM TNI telah menetapkan Marsda TNI S.B. sebagai tersangka dan peningkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," ucap Dodik.

Dodik menjelaskan, penetapan tersangka itu juga dibarengi dengan pengamanan barang bukti uang yang diamankan atau disita melalui pemblokiran rekening BRI a.n Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp 139 miliar lebih.

Demikian juga penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini masih bersifat sementara, karena penyidik POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, profesional dan proposional, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua, tambah Dodik.

6. Berita 6



Juru Bicara KPK Febri Diansyah | Antara/Sigrid Kurniawan

Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong

| rep : Dian Fath Risalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Berkas terdiri sekitar 5 ribu halaman, yang memuat lebih dari 6 ribu barang bukti, sekitar 150 saksi dan 8 orang ahli," ujar Jubir KPK Febri Diansyah, Senin (7/8).

Febri mengatakan, sidang Andi Narogong akan dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Ia menambahkan, pengawalan publik juga sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan.

"Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus KTP-el. Andi adalah terdakwa ketiga yang kami ajukan ke persidangan. Pengawalan publik sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan," kata Febri.

Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong

| rep : Dian Fath Risalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Berkas terdiri sekitar 5 ribu halaman, yang memuat lebih dari 6 ribu barang bukti, sekitar 150 saksi dan 8 orang ahli," ujar Jubir KPK Febri Diansyah, Senin (7/8).

Febri mengatakan, sidang Andi Narogong akan dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Ia menambahkan, pengawalan publik juga sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan.

"Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus KTP-e. Andi adalah terdakwa ketiga yang kami ajukan ke persidangan. Pengawalan publik sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan," kata Febri.

Seperti diketahui, Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 23 Maret lalu. KPK menjerat Andi Narogong dengan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Korupsi KTP-El, KPK Limpahkan Berkas Andi Narogong

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan

Senin , 07 August 2017, 14:43 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Berkas terdiri sekitar 5 ribu halaman, yang memuat lebih dari 6 ribu barang bukti, sekitar 150 saksi dan 8 orang ahli," ujar Jubir KPK Febri Diansyah, Senin (7/8).

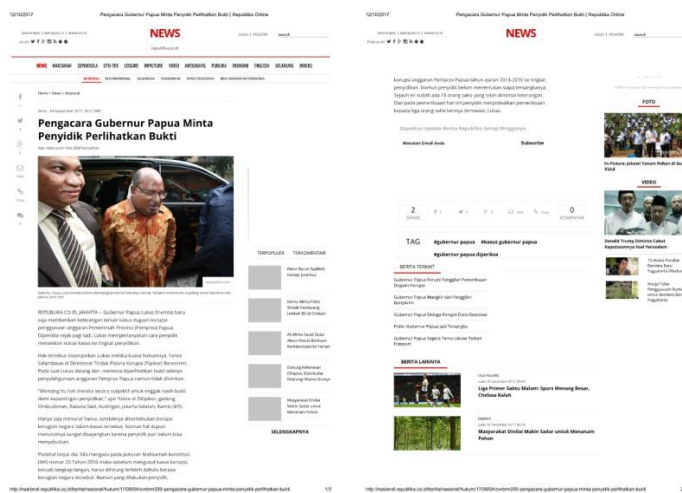
Febri mengatakan, sidang Andi Narogong akan dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Ia menambahkan, pengawalan publik juga sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan.

"Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus KTP-e. Andi adalah terdakwa ketiga yang kami ajukan ke persidangan. Pengawalan publik sangat diperlukan agar kasus ini

bisa dituntaskan," kata Febri.

Seperti diketahui, Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 23 Maret lalu. KPK menjerat Andi Narogong dengan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

7. Berita 7



Pengacara Gubernur Papua Minta Penyidik Perlihatkan Bukti

Senin , 04 September 2017, 20:21 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi

(Pemprov) Papua. Diperiksa sejak pagi tadi, Lukas mempertanyakan cara penyidik menaikkan status kasus ke tingkat penyidikan.

Hak tersebut disampaikan Lukas melalui kuasa hukumnya, Yance Salambauw di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim. Pada saat Lukas datang dan meminta diperlihatkan bukti adanya penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua namun tidak diizinkan.

"Memang itu hak mereka secara subjektif untuk enggak kasih bukti demi kepentingan penyidikan," ujar Yance di Ditipikor, gedung Ombudsman, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/9).

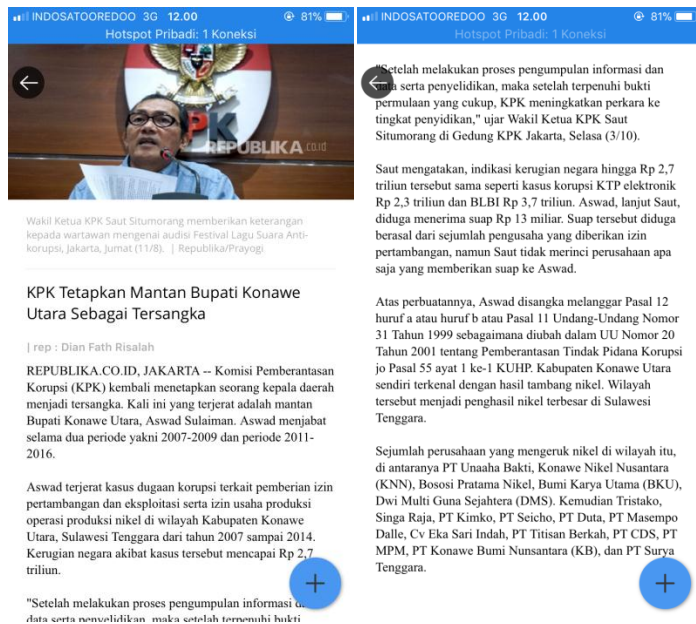
Hanya saja menurut Yance, setidaknya diberitahukan berapa kerugian negara dalam kasus tersebut. Namun hal itupun menurutnya sangat disayangkan karena penyidik pun belum bisa menyebutkan.

Padahal lanjut dia, bila mengacu pada putusan Mahkamah konstitusi (MK) nomor 25 Tahun 2016 maka sebelum mengusut kasus korupsi, kecuali tangkap tangan, harus dihitung terlebih dahulu berapa kerugian negara tersebut. Namun yang dilakukan penyidik, menurutnya justru terbalik.

"Mestinya hal itu jauh dilakukan sebelumnya, sebelum mengusut kasus ini harus didapatkan dulu kerugian negaranya. Sekarang saja baru mau diitung-itung. Ini kan proses yang menurut kami terbalik," jelasnya.

Seperti diketahui polisi sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi anggaran Pemprov Papua tahun ajaran 2013-2016 ke tingkat penyidikan. Namun penyidik belum menentukan siapa tersangkanya. Sejauh ini sudah ada 15 orang saksi yang telah dimintai keterangan. Dan pada pemeriksaan hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan kepada tiga orang saksi lainnya termasuk, Lukas.

8. Berita 8



KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andi Nur Aminah

Republika/Prayogi

Selasa , 03 October 2017, 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang kepala daerah menjadi tersangka. Kali ini yang terjerat adalah mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Aswad menjabat selama dua periode yakni 2007-2009 dan periode 2011-2016.

Aswad terjerat kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan dan eksploitasi serta izin usaha produksi operasi produksi nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dari tahun 2007 sampai 2014. Kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 2,7 triliun.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi dan data serta penyelidikan, maka setelah terpenuhi bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ke tingkat penyidikan," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/10).

Saut mengatakan, indikasi kerugian negara hingga Rp 2,7 triliun tersebut sama seperti kasus

korupsi KTP elektronik Rp 2,3 triliun dan BLBI Rp 3,7 triliun. Aswad, lanjut Saut, diduga menerima suap Rp 13 miliar. Suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan, namun Saut tidak merinci perusahaan apa saja yang memberikan suap ke Aswad.

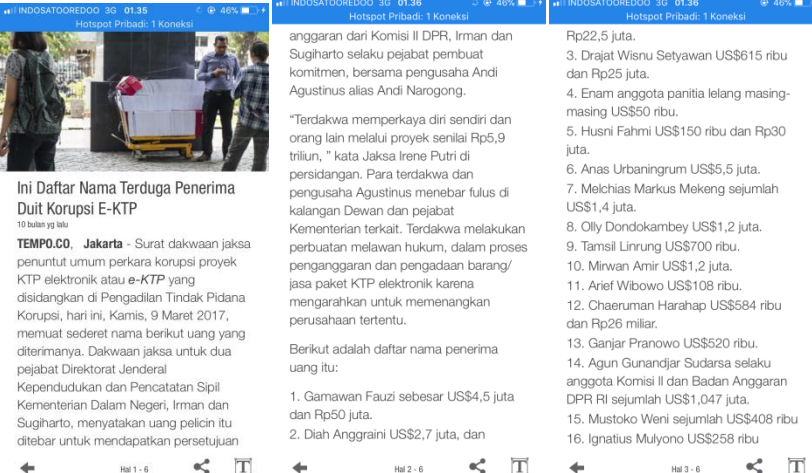
Atas perbuatannya, Aswad disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kabupaten Konawe Utara sendiri terkenal dengan hasil tambang nikel. Wilayah tersebut menjadi penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tenggara.

Sejumlah perusahaan yang mengeruk nikel di wilayah itu, di antaranya PT Unaaha Bakti, Konawe Nikel Nusantara (KNN), Bososi Pratama Nikel, Bumi Karya Utama (BKU), Dwi Multi Guna Sejahtera (DMS). Kemudian Tristako, Singa Raja, PT Kimko, PT Seicho, PT Duta, PT Masempo Dalle, Cv Eka Sari Indah, PT Titisan Berkah, PT CDS, PT MPM, PT Konawe Bumi Nusantara (KB), dan PT Surya Tenggara.

B. BeritaTempo.co

1. Berita 1



The screenshot shows a news article from Tempo.co. The title is "Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP". The article is dated 10 bulan yang lalu. The text mentions a letter from the Attorney General's Office (Jaksa) regarding the corruption of the E-KTP project. It lists several names and amounts, including Gamawan Fauzi (US\$4.5 million), Diah Anggraini (US\$2.7 million), and Ignatius Mulyono (US\$258 thousand). The article also mentions that the names were obtained from a list provided by the DPR.

Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP
10 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, memuat sederet nama berikut uang yang diterimanya. Dakwaan jaksa untuk dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Imman dan Sugiharto, menyatakan uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR, Imman dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui proyek senilai Rp5,9 triliun," kata Jaksa Irene Putri di persidangan. Para terdakwa dan pengusaha Agustinus menebar fulus di kalangan Dewan dan pejabat Kementerian terkait. Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik karena mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Berikut adalah daftar nama penerima uang itu:

1. Gamawan Fauzi sebesar US\$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US\$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US\$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US\$50 ribu.
5. Husni Fahmi US\$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US\$5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US\$1,4 juta.
8. Oilly Dondokambey US\$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US\$700 ribu.
10. Mirwan Amir US\$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US\$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US\$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US\$520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US\$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US\$408 ribu.
16. Ignatius Mulyono US\$258 ribu.

- 17. Taufik Effendi US\$103 ribu.
- 18. Teguh Djuwarno US\$167 ribu.
- 19. Miryam S Haryani sejumlah US\$23 ribu.
- 20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US\$37 ribu.
- 21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US\$13 ribu.
- 22. Yasona Laoly US\$84 ribu.
- 23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US\$400 ribu.
- 24. M Jafar Hapsah sejumlah US\$100 ribu.
- 25. Ade Komarudin sejumlah US\$100 ribu.
- 26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darna Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
- 27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama

- PT LEN Industri Rp2 miliar.
- 28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
- 29. Johannes Marlem sejumlah US\$14,880 juta dan Rp25 miliar
- 30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US\$56 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US\$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
- 31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
- 32. Manajemen bersama konsorsium PNRII sejumlah Rp137 miliar.

Baca:
Soap E-KTP Mengalir Sampai Jauh

Selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi. Inilah perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam dakwaan:

- 1. Perum PNRII menerima sejumlah Rp107,7 miliar.
- 2. PT Sandipala Artha Putra Rp145 miliar.
- 3. PT Mega Lestari Unggul, perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148 miliar.
- 4. PT LEN Industri Rp20 miliar.
- 5. PT Sucofindo Rp8 miliar.
- 6. PT Quadra solution sebesar Rp127 miliar.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP

Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP

Oleh:

Tempo.co

Kamis, 9 Maret 2017 12:42 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi proyek KTP elektronik atau *e-KTP* yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, memuat sederet nama berikut uang yang diterimanya. Dakwaan jaksa untuk dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, menyatakan uang pelicin itu ditebar untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR, Irman dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui proyek senilai Rp5,9 triliun,” kata Jaksa Irene Putri di persidangan. Para terdakwa dan pengusaha Agustinus menebar fulus di kalangan Dewan dan pejabat Kementerian terkait. Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik karena mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Berikut adalah daftar nama penerima uang itu:

1. Gamawan Fauzi sebesar US\$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US\$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US\$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US\$50 ribu.
5. Husni Fahmi US\$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US\$5,5 juta.

7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US\$1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US\$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US\$700 ribu.
10. Mirwan Amir US\$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US\$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US\$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US\$520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US\$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US\$408 ribu
16. Ignatius Mulyono US\$258 ribu
17. Taufik Effendi US\$103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US\$167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US\$23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US\$37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US\$13 ribu.
22. Yasona Laoly US\$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US\$400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US\$100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US\$100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johannes Marliem sejumlah US\$14,880 juta dan Rp25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US\$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US\$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

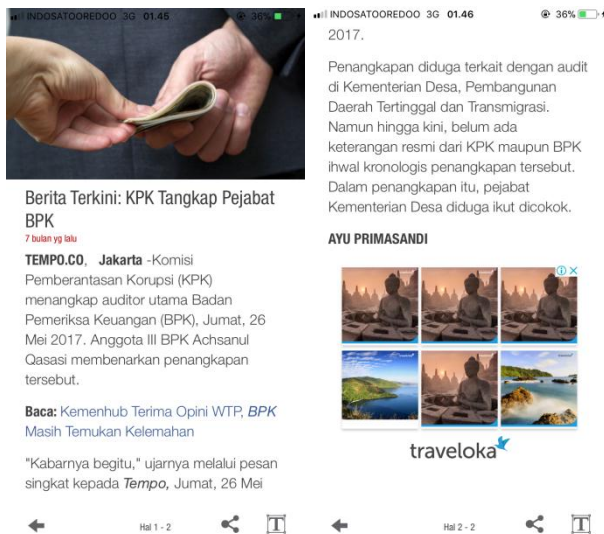
Baca:**[Suap E-KTP Mengalir Sampai Jauh](#)**

Selain diterima perorangan, jaksa juga menyebut terdakwa memperkaya korporasi. Inilah perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam dakwaan:

1. Perum PNRI menerima sejumlah Rp107,7 miliar.
2. PT Sandipala Artha Putra Rp145 miliar.
3. PT Mega Lestari Unggul, perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148 miliar.
4. PT LEN Industri Rp20 miliar.
5. PT Sucofindo Rp8 miliar.
6. PT Quadra solution sebesar Rp127 miliar.

MAYA AYU PUSPITASARI

2. Berita 2



Berita Terkini: KPK Tangkap Pejabat BPK

Oleh :

[Tempo.co](https://www.tempo.co)

Jumat, 26 Mei 2017 20:24 WIB



TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat, 26 Mei 2017. Anggota III BPK Achsanul Qasasi membenarkan penangkapan tersebut.

Baca: [Kemenhub Terima Opini WTP, BPK Masih Temukan Kelemahan](#)


"Kabarnya begitu," ujarnya melalui pesan singkat kepada *Tempo*, Jumat, 26 Mei 2017.

Penangkapan diduga terkait dengan audit di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK

maupun BPK ihwal kronologis penangkapan tersebut. Dalam penangkapan itu, pejabat Kementerian Desa diduga ikut dicokok.

AYU PRIMASANDI

3. Berita 3



Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais

7 bulan yg lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti dugaan adanya aliran dana kepada mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais, dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan penyidik akan terus memantau dan mencermati persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, tersebut.

Menurut Laode, penyidik dapat memanggil **Amien Rais** jika dianggap perlu untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. "Pasti kan nanti perlu diklarifikasi, tapi nanti dilihat dulu," katanya, kemarin.

Baca juga: Hari Ini Amien Rais Jelaskan Soal Duit Alkes Rp 600 Juta

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik akan menganalisis semua fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah berikutnya. "Nanti juga penuntut umum akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang ke KPK," ujarnya.

Dugaan adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu lalu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 itu dituding menerima

dana senilai total Rp 600 juta dari proyek yang kini menyebabkan Siti dituntut 6 tahun penjara tersebut.

Jaksa penuntut umum KPK, Iskandar Marwanto, mengatakan dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlaine, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). "Selanjutnya, Nuki Syahrin, selaku Ketua Yayasan SBF, memerintahkan untuk memindabukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa," katanya.

Berkas tuntutan jaksa mencatat dana disorot ke rekening Amien sebanyak enam kali, mulai 15 Januari 2007 hingga 2 November 2007. Masing-masing transaksi senilai Rp 100 juta. Duit tersebut merupakan bagian dari Rp 5,78 miliar hasil keuntungan PT Mitra Medidua, **supplier** PT Indofarma Tbk, yang menjadi

rekanan pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan senilai Rp 15,5 miliar untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Adapun Indofarma hanya untung Rp 364,6 juta.

Dalam kasus yang menyebabkan negara merugi hingga Rp 6,1 miliar tersebut, Siti Fadilah didakwa karena menunjuk langsung Indofarma sebagai pelaksana proyek pengadaan **buffer stock** obat flu burung. Siti juga dituding menerima gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar dari sejumlah pihak yang terkait dengan proyek ini.

Ditemui di rumahnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Amien Rais enggan berkomentar banyak tentang tuduhan dia menerima dana proyek alat kesehatan. Dia berencana menjelaskan secara detail kepada awak media hari ini di rumahnya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Hal 1 - 6

INDOSATOOREDOO 4G 12.04

100%

Dia justru merasa senang dengan rencana KPK membuka lagi kasus ini. "Ini *blessing in disguise* (berkah tersembunyi)," kata Amien, kemarin.

Tak mau menunggu dipanggil, Amien justru berencana datang ke KPK, Senin mendatang, untuk memberikan sejumlah data kasus korupsi besar yang melibatkan dua tokoh nasional dan kini belum ditangani. "Siapa? Nanti, *gitu aja*, ya."

Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap tak yakin ada aliran duit haram ke rekening mantan petinggi partai, termasuk **Amien Rais**, dari Sutrisno Bachir Foundation. Menurut dia, sebagai pengusaha, Sutrisno memang terkenal gemar membantu tokoh-tokoh nasional yang memiliki ide, visi, dan semangat yang sama dengannya. "Kalaupun ada sumbangan dari Sutrisno Bachir, saya yakin sumbangan itu bersumber dari dana yang halal. Bukan bersumber dari kejahatan Siti Fadilah," katanya.

Hal 5 - 6

Hal 2 - 6

INDOSATOOREDOO 4G 12.04

100%

Hal 3 - 6

INDOSATOOREDOO 4G 12.04

100%

Hal 4 - 6

INDOSATOOREDOO 3G 12.04

100%

Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais

Oleh:

Tempo.co

Jumat, 2 Juni 2017 08:49 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti dugaan adanya aliran dana kepada mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, [Amien Rais](#), dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan penyidik akan terus memantau dan mencermati persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, tersebut.

Menurut Laode, penyidik dapat memanggil [Amien Rais](#) jika dianggap perlu untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. "Pasti kan nanti perlu diklarifikasi, tapi nanti dilihat dulu," katanya, kemarin.

Baca juga: [Hari Ini Amien Rais Jelaskan Soal Duit Alkes Rp 600 Juta](#)

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik akan menganalisis semua fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah berikutnya. "Nanti juga penuntut umum akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang ke KPK," ujarnya.

Dugaan adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu lalu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 itu dituding menerima dana senilai total Rp 600 juta dari proyek yang kini menyebabkan Siti dituntut 6 tahun penjara tersebut.

Jaksa penuntut umum KPK, Iskandar Marwanto, mengatakan dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlaini, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). "Selanjutnya, Nuki Syahrin, selaku Ketua Yayasan SBF, memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa," katanya.

Berkas tuntutan jaksa mencatat dana disetor ke rekening Amien sebanyak enam kali, mulai 15 Januari 2007 hingga 2 November 2007. Masing-masing transaksi senilai Rp 100 juta. Duit tersebut merupakan bagian dari Rp 5,78 miliar hasil keuntungan PT Mitra Medidua, *supplier* PT Indofarma Tbk, yang menjadi rekanan pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan senilai Rp 15,5 miliar untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Adapun Indofarma hanya untung Rp 364,6 juta.

Dalam kasus yang menyebabkan negara merugi hingga Rp 6,1 miliar tersebut, Siti Fadilah didakwa karena menunjuk langsung Indofarma sebagai pelaksana proyek pengadaan *buffer stock* obat flu burung. Siti juga dituding menerima gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar dari sejumlah pihak yang terkait dengan proyek ini.

Ditemui di rumahnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Amien Rais enggan berkomentar banyak tentang tuduhan dia menerima dana proyek alat kesehatan. Dia berencana menjelaskan secara detail kepada awak media hari ini di rumahnya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

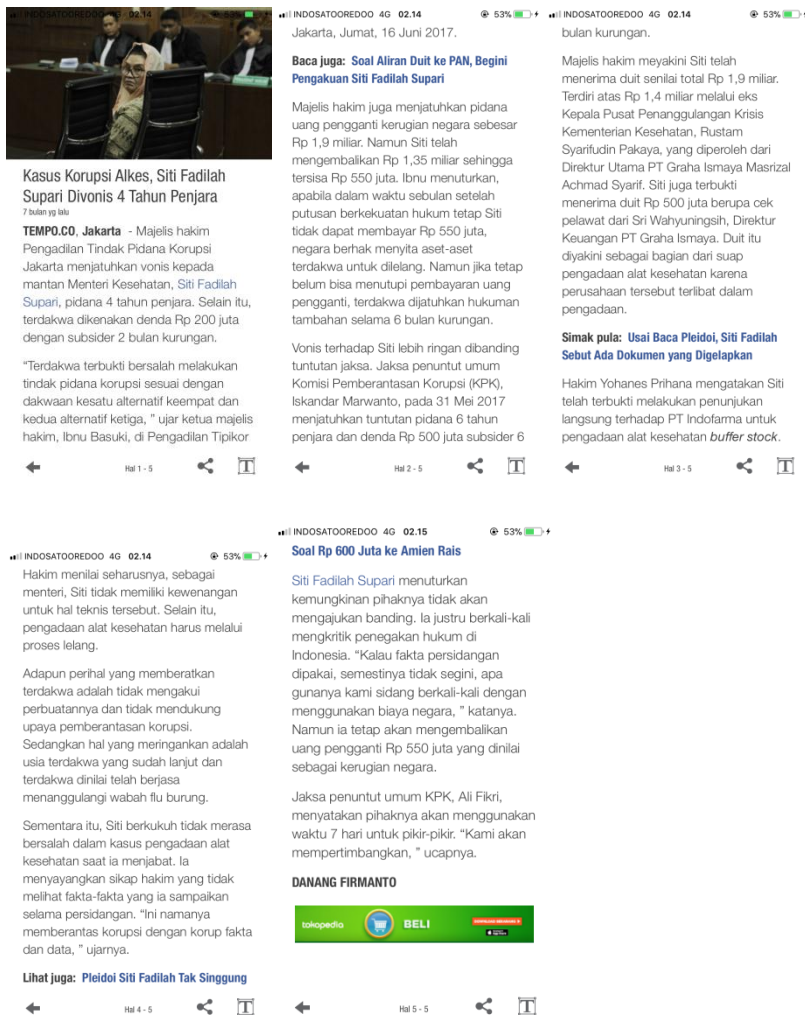
Dia justru merasa senang dengan rencana KPK membuka lagi kasus ini. "Ini *blessing in disguise* (berkah tersembunyi)," kata Amien, kemarin.

Tak mau menunggu dipanggil, Amien justru berencana datang ke KPK, Senin mendatang, untuk memberikan sejumlah data kasus korupsi besar yang melibatkan dua tokoh nasional dan kini belum ditangani. "Siapa? Nanti, *gitu aja*, ya."

Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap tak yakin ada aliran duit haram ke rekening mantan petinggi partai, termasuk [Amien Rais](#), dari Sutrisno Bachir Foundation. Menurut dia, sebagai pengusaha, Sutrisno memang terkenal gemar membantu tokoh-tokoh nasional yang memiliki ide, visi, dan semangat yang sama dengannya. "Kalaupun ada sumbangan dari Sutrisno Bachir, saya yakin sumbangan itu bersumber dari dana yang halal. Bukan bersumber dari kejahatan Siti Fadilah," katanya.

**DANANG FIRMANTO | HUSSEIN ABRI | MAYA AYU | MUH SYAIFULLAH |
NINIS CHAIRUNNISA**

4. Berita 4



Kasus Korupsi Alkes, Siti Fadilah Supari Divonis 4 Tahun Penjara

Oleh :

Tempo.co

Jumat, 16 Juni 2017 17:53 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Kesehatan, [Siti Fadilah Supari](#), pidana 4 tahun

penjara. Selain itu, terdakwa dikenakan denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan kesatu alternatif keempat dan kedua alternatif ketiga,” ujar ketua majelis hakim, Ibnu Basuki, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 16 Juni 2017.

Baca juga: [Soal Aliran Duit ke PAN, Begini Pengakuan Siti Fadilah Supari](#)

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar. Namun Siti telah mengembalikan Rp 1,35 miliar sehingga tersisa Rp 550 juta. Ibnu menuturkan, apabila dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Siti tidak dapat membayar Rp 550 juta, negara berhak menyita aset-aset terdakwa untuk dilelang. Namun jika tetap belum bisa menutupi pembayaran uang pengganti, terdakwa dijatuhkan hukuman tambahan selama 6 bulan kurungan.

Vonis terhadap Siti lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iskandar Marwanto, pada 31 Mei 2017 menjatuhkan tuntutan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini Siti telah menerima duit senilai total Rp 1,9 miliar. Terdiri atas Rp 1,4 miliar melalui eks Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan, Rustam Syarifudin Pakaya, yang diperoleh dari Direktur Utama PT Graha Ismaya Masrizal Achmad Syarif. Siti juga terbukti menerima duit Rp 500 juta berupa cek pelawat dari Sri Wahyuningsih, Direktur Keuangan PT Graha Ismaya. Duit itu diyakini sebagai bagian dari suap pengadaan alat kesehatan karena perusahaan tersebut terlibat dalam pengadaan.

Simak pula: [Usai Baca Pleidoi, Siti Fadilah Sebut Ada Dokumen yang Digelapkan](#)

Hakim Yohanes Prihana mengatakan Siti telah terbukti melakukan penunjukan langsung terhadap PT Indofarma untuk pengadaan alat kesehatan *buffer stock*. Hakim menilai seharusnya, sebagai menteri, Siti tidak memiliki kewenangan untuk hal teknis tersebut. Selain itu, pengadaan alat kesehatan harus melalui proses lelang.

Adapun perihal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mengakui perbuatannya dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan adalah usia

terdakwa yang sudah lanjut dan terdakwa dinilai telah berjasa menanggulangi wabah flu burung.

Sementara itu, Siti berkukuh tidak merasa bersalah dalam kasus pengadaan alat kesehatan saat ia menjabat. Ia menyayangkan sikap hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ia sampaikan selama persidangan. “Ini namanya memberantas korupsi dengan korup fakta dan data,” ujarnya.

Lihat juga: [Pleidoi Siti Fadilah Tak Singgung Soal Rp 600 Juta ke Amien Rais](#)

[Siti Fadilah Supari](#) menuturkan kemungkinan pihaknya tidak akan mengajukan banding. Ia justru berkali-kali mengkritik penegakan hukum di Indonesia. “Kalau fakta persidangan dipakai, semestinya tidak segini, apa gunanya kami sidang berkali-kali dengan menggunakan biaya negara,” katanya. Namun ia tetap akan mengembalikan uang pengganti Rp 550 juta yang dinilai sebagai kerugian negara.

Jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri, menyatakan pihaknya akan menggunakan waktu 7 hari untuk pikir-pikir. “Kami akan mempertimbangkan,” ucapnya.

DANANG FIRMANTO



Puspom TNI Cari Inisiator Utama Kasus Korupsi Heli AW 101

Oleh:

Tempo.co

Sabtu, 5 Agustus 2017 04:01 WIB



TEMPO.CO, Denpasar -Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko mengatakan pihaknya masih terus menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan ([alutsista](#)) helikopter AugustaWestland 101 (AW101) di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Puspom TNI akan mencari inisiator utama dari terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus ini."Kami akan terus melakukan proses ini dan perkembangan akan terus kami sampaikan," kata dia saat ditemui di Denpasar, Jumat 4 Agustus 2017.

Pada Jumat 4 Agustus 2017 kemarin, Puspom TNI telah menetapkan satu tersangka baru, yaitu Marsekal Muda SB yang pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Baca : [Puspom TNI Tetapkan Satu Lagi Tersangka Korupsi Helikopter AW-101](#)

Menurut Dodik, SB adalah bagian dari inisiator terlaksananya pengadaan enam unit helikopter yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 224 miliar. "Ini belum inisiatornya," kata dia.

Dodik menyatakan penyidiknya sudah mulai melihat 'bayang-bayang' dari inisiator utama dari kasus ini. Namun, Dodik mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyidikinya. "Hukum kan butuh saksi dan keterangan yang lain, sehingga kita tetap menempatkan tersangka lainnya secara sah," ujarnya.

Untuk itu, Dodik mengatakan Puspom TNI menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga lain.

Di antaranya dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara, dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memeriksa aliran dana serta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak juga : [Jokowi: Saya Ingatkan, Tak Ada Toleransi Praktek Korupsi Alutsista !](#)

Hingga saat ini, Puspom TNI telah menetapkan lima tersangka termasuk Marsma SB. Empat orang lainnya adalah Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan TNI AU, Marsekal Muda FA selaku pejabat pembuat komitmen, Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS yang bertugas membantu pengiriman uang.

KPK juga telah menetapkan satu tersangka, yaitu Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Diratama adalah rekanan TNI AU dalam pengadaan proyek pengadaan [alutsista](#) senilai Rp 738 miliar ini.

NINIS CHAIRUNNISA

6. Berita 6



Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Andi Narogong Segera Diadili

Oleh:

[Tempo.co](https://tempo.co)

Senin, 7 Agustus 2017 12:12 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Andi Agustinus alias [Andi Narogong](#), tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (*e-KTP*). Tak lama lagi, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang proyek *e-KTP* itu bakal segera diadili.

"Pagi ini dilakukan pelimpahan berkas perkara dengan terdakwa Andi Agustinus di kasus *e-KTP* ke PN Jakpus," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan pendek, Senin, 7 Agustus 2017.

Baca:

[KPK Dalam Sumber Dana Adik Andi Narogong](#)

Sidang E-KTP, Andi Narogong Ungkap Hubungan dengan Setya Novanto

Febri mengatakan berkas perkara Andi terdiri atas lima ribu halaman. Berkas itu memuat lebih dari enam ribu barang bukti dengan 150 saksi dan 8 ahli.

"Persidangan akan dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus *e-KTP*," kata Febri.

Andi adalah terdakwa ketiga yang diajukan ke persidangan. Andi diduga orang yang mengatur proyek *e-KTP*, mulai tahap pembahasan anggaran, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pengadaan. Beberapa saksi mengatakan Andi adalah teman dekat Setya Novanto.

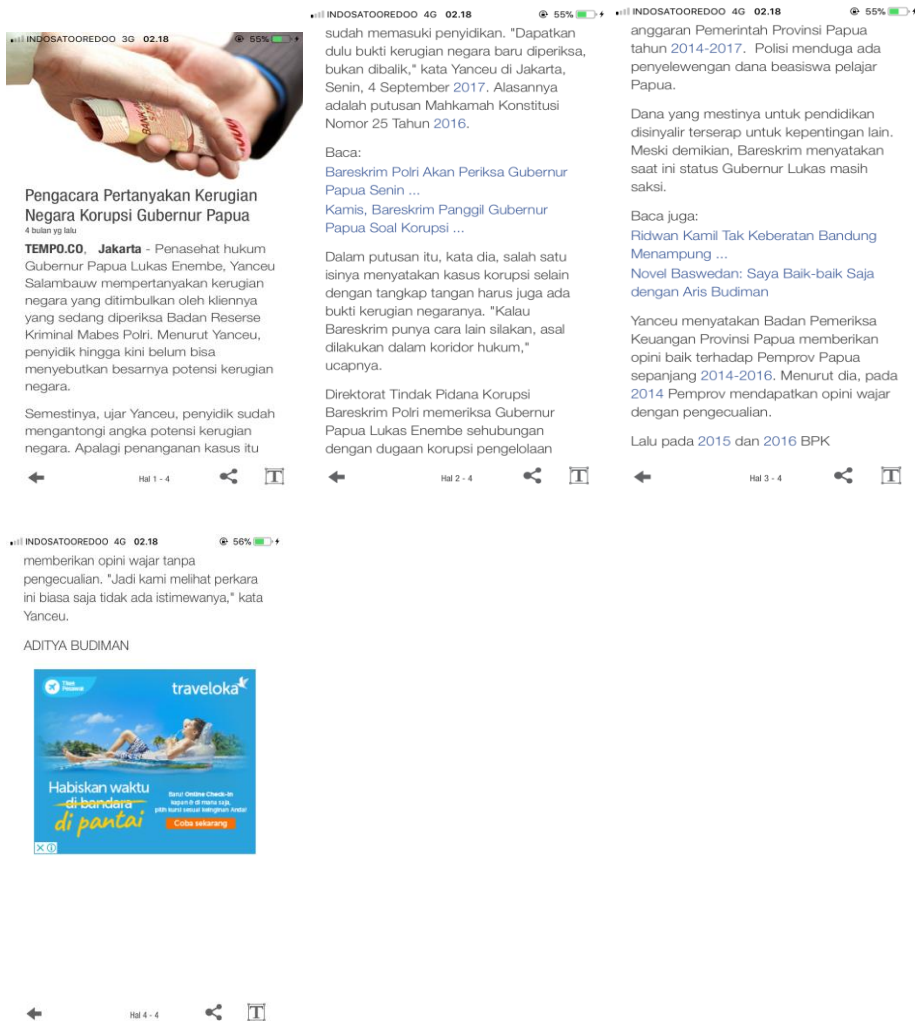
"Pengawasan publik sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan," kata Febri.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Simak pula: [Mantan Dirut PNRI Sebut Andi Narogong Terlibat Proyek E-KTP](#)

Keduanya telah divonis hakim selama 7 tahun dan 5 tahun penjara. Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

MAYA AYU PUSPITASARI



Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Oleh :

Tempo.co

Senin, 4 September 2017 15:53 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Penasehat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Yanceu Salambauw mempertanyakan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kliennya yang sedang

diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Menurut Yanceu, penyidik hingga kini belum bisa menyebutkan besarnya potensi kerugian negara.

Semestinya, ujar Yanceu, penyidik sudah mengantongi angka potensi kerugian negara.

Apalagi penanganan kasus itu sudah memasuki penyidikan. "Dapatkan dulu bukti kerugian negara baru diperiksa, bukan dibalik," kata Yanceu di Jakarta, Senin, 4 September [2017](#).

Alasannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun [2016](#).

Baca:

[Bareskrim Polri Akan Periksa Gubernur Papua Senin ...](#)

[Kamis, Bareskrim Panggil Gubernur Papua Soal Korupsi ...](#)

Dalam putusan itu, kata dia, salah satu isinya menyatakan kasus korupsi selain dengan tangkap tangan harus juga ada bukti kerugian negaranya. "Kalau Bareskrim punya cara lain silakan, asal dilakukan dalam koridor hukum," ucapnya.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe sehubungan dengan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua tahun [2014-2017](#). Polisi menduga ada penyelewengan dana beasiswa pelajar Papua.

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Meski demikian, Bareskrim menyatakan saat ini status Gubernur Lukas masih saksi.

Baca juga:

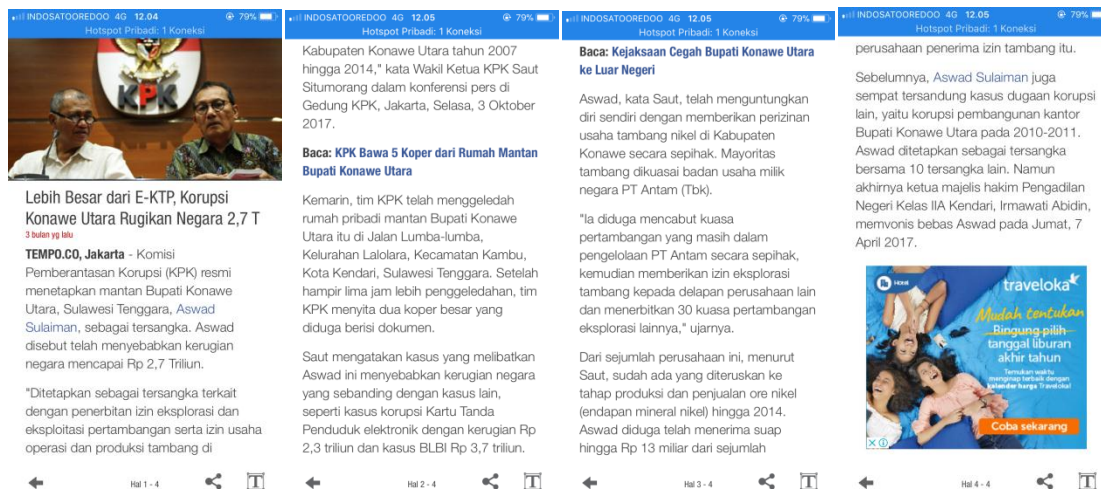
[Ridwan Kamil Tak Keberatan Bandung Menampung ...](#)

[Novel Baswedan: Saya Baik-baik Saja dengan Aris Budiman](#)

Yanceu menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua memberikan opini baik terhadap Pemprov Papua sepanjang [2014-2016](#). Menurut dia, pada [2014](#) Pemprov mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

Lalu pada [2015](#) dan [2016](#) BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. "Jadi kami melihat perkara ini biasa saja tidak ada istimewanya," kata Yanceu.

ADITYA BUDIMAN



Lebih Besar dari E-KTP, Korupsi Konawe Utara Rugikan Negara 2,7 T

Reporter:

Fajar Pebrianto

Editor:

Ninis Chairunnisa

Selasa, 3 Oktober 2017 18:31 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, [Aswad Sulaiman](#), sebagai tersangka.

Aswad disebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,7 Triliun.

"Ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penerbitan izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan serta izin usaha operasi dan produksi tambang di Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 hingga 2014," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

Baca: [KPK Bawa 5 Koper dari Rumah Mantan Bupati Konawe Utara](#)

Kemarin, tim KPK telah menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Konawe Utara itu di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah hampir lima jam lebih pengeledahan, tim KPK menyita dua koper besar yang diduga berisi dokumen.

Saut mengatakan kasus yang melibatkan Aswad ini menyebabkan kerugian negara yang sebanding dengan kasus lain, seperti kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan kerugian Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI Rp 3,7 triliun.

Baca: [Kejaksaan Cegah Bupati Konawe Utara ke Luar Negeri](#)

Aswad, kata Saut, telah menguntungkan diri sendiri dengan memberikan perizinan usaha tambang nikel di Kabupaten Konawe secara sepihak. Mayoritas tambang dikuasai badan usaha milik negara PT Antam (Tbk).

"Ia diduga mencabut kuasa pertambangan yang masih dalam pengelolaan PT Antam secara sepihak, kemudian memberikan izin eksplorasi tambang kepada delapan perusahaan lain dan menerbitkan 30 kuasa pertambangan eksplorasi lainnya," ujarnya.

Dari sejumlah perusahaan ini, menurut Saut, sudah ada yang diteruskan ke tahap produksi dan penjualan ore nikel (endapan mineral nikel) hingga 2014. Aswad diduga telah menerima suap hingga Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan penerima izin tambang itu.

Sebelumnya, [Aswad Sulaiman](#) juga sempat tersandung kasus dugaan korupsi lain, yaitu korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara pada 2010-2011. Aswad ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 tersangka lain. Namun akhirnya ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IIA Kendari, Irmawati Abidin, memvonis bebas Aswad pada Jumat, 7 April 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Suci Rahmadhani

Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 13 Maret 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Kenteng RT 01 RW 03 Paluhombo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Nama Ayah/Ibu : Suyut/ Parmi

Anak ke : 1 (satu) dari 2 bersaudara

No. HP : 087812686238

Email : sucirahma.dhani@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan:

- 2002-2007 : SD N 1 Paluhombo
- 2007-2009 : SMP N 1 Sukoharjo
- 2010-2013 : SMA N 1 Sukoharjo
- 2013-2014 : Sastra Daerah, Universitas Sebelas Maret
- 2014-2018 : S1 Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta